

**EKSISTENSI GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA
DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER DITINJAU DARI HUKUM LAUT
INTERNASIONAL**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

FRIDAININGTYAS PALUPI

NIM. E 0003013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2007

PERSETUJUAN

Penulisan hukum (skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan
Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Dosen Pembimbing Skripsi I

Sri Lestari Rahayu, S.H.
NIP. 131 571 611

Dosen Pembimbing Skripsi II

Siti Muslimah, S.H.
NIP. 132 086 370

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (skripsi) ini telah diterima dan disahkan oleh Tim penguji
Penulisan Hukum (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 28 Juli 2007

DEWAN PENGUJI

1. (JOKO POERWONO, S.H.,M.S.)
KETUA
2. (HANDOJO LEKSONO,S.H.)
ANGGOTA
3. (SRI LESTARI RAHAYU, S.H.)
ANGGOTA

Mengetahui,

Dekan

Moh. Jamin, S.H., M.Hum

NIP. 131 570 154

MOTTO

“Nothing is impossible, if you were trying”

“ I have got a right to be wrong. My mistake will make me strong”
(Joss Stone)

“I’m not a perfect person, theres many things I wish I didn’t do, but I
continue learning”
(HoObastank)

Menjadi orang yang selalu merasa dirinya bodoh adalah lebih baik,
dari pada menjadi orang pandai yang telah puas dengan ilmu yang
didapatnya”

“Dia (4JJl) yang mengajar manusia dengan perantara kalam, Dia
mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”
(Al Alaq 4-5)

“Ilmu itu pembimbing amal. Pemahaman itu wadahnya ilmu. Akal itu
penuntun pada kebaikan. Hawa nafsu itu kendaraan dosa. Harta itu
pakaian orang-orang yang takabbur. Dunia itu pasarnya akhirat”
(Yahya Bin Mu’adz Ar Razi)

PERSEMBAHAN

Semua huruf yang terangkai dalam tiap kata, hingga tiap-tiap kata menjadi kalimat, kalimat-kalimat terangkai menjadi suatu karya sederhana ini, aku persembahkan kepada :

Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya, Rasa syukur terucap tiada henti-hentinya dari ciptaanmu yang tak berdaya tanpa karunia, dan rahmadmu, beserta junjungan dan suritauladan seluruh umat manusi Rasulullah Muhammad SAW.

Ortuku bapak dan Ibu,yang telah menghadirkanku didunia ini, dan selalu memanjatkan doa untukku, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, dan semangat yang tak akan padam sampaikapanpun juga.

Adik-adikku, yang aku sayangi dan selalu menjadi semangat dan hiburan unik bagiku, karena kalian aku menjadi orang nomor satu dan tertua diantara kalian, so that make me learn how to handle my big responsibility.

Keluarga kedua ku Kunthakers “the Refugee of Water” Your all were always beside of me to make me wonder & happier everyday.

Sedulur Merpati Putih
(Mersudi Patitising Tindak Pusaka Titising Hening)
There isSomething Amazing I ever had

My Zoo Friends (Sapi & EmonMiaw), you Teach me how a Friendship are Begins.

Keluarga besar Fakultas Hukum UNS dan Teman-teman angkatan 2003, bersama-sama, kita satu rasa, satu kata Viva Yusticia, kami

bangga disini. Semoga kita selalu dapat menjadi kebanggaan bagi Masyarakat, Nusa-Bngsa, dan Negara.

Finaly and Specialy untuk diriku sendiri...

Allhamdulillah, ku syukuri apa yang telah aku dapat dan aku capai hingga saat ini

Semoga ilmu yang telah aku dapatkan selama ini, menjadi pelajaran dan pengalaman berharga, untuk bekal dikehidupan mendatang, hingga mampu menciptakan mafaat bagiku , orang lain, masyarakat, bangsa dan negara...amin

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim...

Alhamdulillah Rabbil'alam, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“EKSISTENSI GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL”**

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini membahas tentang bagaimana penetapan garis batas Landas Kontinen Gosong Niger yang meliputi pembahasan mengenai eksistensi Gosong Niger, kemudian ketentuan mengenai penetapan Garis Batas Landas Kontinen Gosong Niger, dan tindakan pemerintah dalam menunjukan eksistensi Gosong Niger sebagai bagian landas kontinen Indonesia ditinjau dari segi hukum laut internasional. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat menambah wawasan penulis dan bermanfaat dikemudian hari.

Dengan selesainya penulisan hukum ini maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini :

1. Bapak Mohammad Yamin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
2. Ibu Sri Lestari Rahayu S.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan hukum ini.
3. Ibu Siti Muslimah S.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan-masukan penting dan berarti dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Joko Poerwono, S.H.,M.S. selaku ketua dewan penguji yang telah memberikan bantuan serta masukan-masukan berguna dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak Handojo Leksono,S.H. terimakasih atas saran-saran dan buku-bukunya.
6. Ibu Aminah S.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis sehubungan dengan penulisan hukum ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Internasional dan seluruh Bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keiklasan dan kemurahan hati memberikan bimbingan ilmu selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
8. Bapak dan Ibu Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Tata Usaha, Perpustakaan, dan seluruh jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
9. Bapak Haris Nugroho, selaku Deputy Director Direktorat for Treaties on Political Security and Teritorial Affairs Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta, yang telah memberikan bimbingan dan gambaran mengenai materi sehubungan dengan penulisan hukum ini.
10. Bapak Rizal MF, selaku Kasi Prosedur dan Aplikasi Wilayah Administrasi dan Perbatasan Ditjend Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, yang telah memberikan bimbingan dan gambaran mengenai materi sehubungan dengan penulisan hukum ini.
11. Bapak Rido Wanggono, S.H., M.Hum dan Ibu Wahyudati selaku Orang Tuaku Tercinta terimakasih atas dukungan semangat, segala curahan kasih sayang, dan doa yang selalu mengalir bagaikan air yang menyejukkan, semoga semua kebaikan beliau di balas surga oleh Allah SWT. (Amin)
12. Adik-adikku, Ratri dan Dinar terimakasih, atas semangat dan hiburan Ajaib yang kalian berikan padaku. Contolah sisi Baikku dan jangan ikuti Keburukanku.
13. Saudara-saudaraku penghuni Kunthie *“The Refugee of Water”* (Anjar Kupreetoeng, Luvini Bobok, Danik Deblong, Ratna Jenong, Etik Si Mbah, Liz Kur, Gita MarkeZul, Ika Menjez, Dini, & gak ketinggalan Veteran kunthie Mb Yuyun Oyoet), kalian semua jahil yach?! (Puas!?) *Thanx for the Surprize* “Bukan karena hebatku, namun karena Cintamulah aku bisa berdiri tegak, terimakasih cinta”.
14. My Zoo Friends : Lia (Sapi) & Diana (EmonMiaw), sahabat2ku yang selalu bikin aku tertawa Waaakakak...*but, You’re make me understand how to learned the A,B,C’s of Friendship & Show me the meaning of Wonderful life.*
15. Sedulur Merpati Putih: ThathieX, Sesepuh Mb. Hening, Joko Aneh, DimPeL, Sophi, Topik Aneh², Mas Rahmadi, Wahyu, Yuni, Catur, Lola, Inung, Kunthie, Ning-nong, Mas Sindu, Mas Anom, Mas Martoyo, dan semuanya yang gak disebut aku ucapkan terimakasih atas dukungan dan doannya. *Your’re all, give me*

something Amazing in my Life. “Mersudi Patitising Tindak Pusakaning Titising Hening”.

16. Sohib-sohib FOSMI: Rosita, Dayu, Jannati, Atik Twin, Anik Cilik, Ebta, Mila, adek-adek '04,'05, & '06. Jalin terus Silaturahmi kita.
17. Temen-temen Asdos HI: Agus “*the one of men*”, Ana, Nurula, Lina, Nur Cahyo, “*Experience is the Best Teacher for Us*”.
18. Temen-temen Angkatan '03, yang dah lulus Congratulation yach...yang belum harap bersabar & truz berusaha. Viva Yustitia... “*This Time to Open the Gate with Your Own Key, & Welcome to The Real World*”.
19. *We are apart but closer*: Mosyeng 'Us2', Erna+anak2 Kost Irafan, Sella, Yaska, Tris '3', Tewe SH, Yogi Alex, IG-en, LiesLight, kakak tingkat yang selalu dukung aku: Mb Ira, Mb Deede, Mb Efo, Mas Sigit and etc.
20. Semua orang, teman, dan sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, terimakasih atas kebaikan, kasih sayang, dan rasa cinta yang kalian berikan kepadaku. Berkat kalian semua, hidup ini menjadi sangat berarti dan semakin berwarna. Semoga dukungan, semangat, dan doa kalian semua mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT...(Amin)
21. Dengan segenap kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Mohon maaf penulis tidak dapat membalas dengan sesuatu yang berharga, namun penulis berharap Allah SWT yang akan memberikan balasan yang tak ternilai harganya untuk semuanya.

Demikian karya sederhana ini dibuat semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Juli 2007

Penulis

Fridainingtyas Palupi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN dan GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Skripsi	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 16
A. Kerangka Teoritik	16
1. Tinjauan Umum Mengenai Eksistensi.....	16
2. Tinjauan Umum tentang Wilayah Negara.....	16
a. Pengertian Unsur-unsur Negara	16
b. Cara-cara untuk Memperoleh Wilayah	19
c. Wilayah Negara.....	21
d. Hak dan Kewajiban Negara.....	23
3. Tinjauan Umum tentang Hukum Laut Internasional	24
a. Pengertian Hukum Laut.....	24
b. Sejarah dan Sumber Hukum Laut Internasional	25
c. Pembagian Wilayah Laut.....	26
4. Tinjauan Mengenai Landas Kontinen	32

a. Pengertian Landas Kontinen	32
b. Status Yuridis Landas Kontinen	34
c. Cara Penentuan Garis Batas Landas Kontinen.....	38
4. Tinjauan Tentang Gosong Niger.....	41
B. Kerangka Pemikiran.....	44
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Gosong Niger	
Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional.....	45
1. Gosong Niger Sebagai Landas Kontinen.....	45
2. Penentuan Garis Batas Landas Kontinen Gosong Niger.....	69
B. Tindakan Pemerintah dalam Mewujudkan Eksistensi Gosong	
Niger Sebagai Landas Kontinen.....	87
 BAB IV PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-saran.....	113
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Bagan 1	: Skema Kerangka Pemikiran.....	44
Gambar 1	: Gosong Niger di Kalimantan.....	42
Gambar 2	: Garis Batas Landas Kontinen RI-Malaysia.....	43
Gambar 3	: Continental Margin.....	67
Gambar 4	: Gosong Niger antara Indonesia-Malaysia.....	69
Gambar 5	: Garis Pangkal Normal	71
Gambar 6	: Garis Pangkal Lurus dari Ujung ke ujung	72
Gambar 7	: Garis Pangkal Kepulauan.....	73
Gambar 8	: Bagian-bagian Laut Secara Yuridis.....	78
Gambar 9	: Titik Dasar Nomor 35 Tanjung Datuk.....	86
Gambar 10	: Titik Dasar Nomor 1-35.....	86
Gambar 11	: Posisi Titik Dasar, Garis Pangkal, dan Garis Batas Landas Kontinen.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian.
2. Surat Keterangan Kegiatan Penelitian.
3. Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antar Kedua Negara 1969.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 1969 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antar Kedua Negara 1969.
5. Convention on the Continental Shelf 1958.
6. United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 Part VI Article 76-85.
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
8. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

ABSTRAK

FRIDAININGTYAS PALUPI, E 0003013, EKSISTENSI GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi). 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Gosong Niger sebagai bagian dari landas kontinen, dan cara penentuan Garis Batas Landas Kontinen yang berada di antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional, serta tindakan Pemerintah dalam mewujudkan eksistensi dan kepastian hukum terhadap Gosong Niger.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, jika dilihat dari tujuan, jenis data dan sumber datanya jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Jenis data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang sumber datanya meliputi bahan hukum primer yaitu berupa peraturan yang terkait diantaranya Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia Tahun 1969, ketentuan UNCLOS 1982 Bab VI Pasal 76-85 tentang landas kontinen, serta ketentuan yang terkait lainnya. Kemudian bahan hukum sekunder berupa data yang melengkapi bahan hukum primer yaitu berupa makalah-makalah dari beberapa seminar lokakarya, hasil penelitian terdahulu, buku-buku karya tulis ilmiah, majalah, koran; Cyber media website instansi pemerintah misalnya Bapeda Kalbar, Deplu dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia, kamus Indonesia-Inggris, dan kamus ilmiah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis logis, analisis sistematis, dan analisis yuridis.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka hasil dari penelitian ini adalah, Eksistensi Gosong Niger (*niger banks*) adalah merupakan bentukan alamiah berupa gundukan pasir di perairan dangkal yang keadaan fisiknya selalu terendam air sehingga dalam kamus Bahasa Indonesia disebut Gosong, dalam Bahasa Inggris disebut *banks* atau *sandbar*. Dalam penelitian ini Gosong yang dimaksud bernama Niger, sehingga disebut sebagai Gosong Niger. Gosong Niger tidak dapat dikategorikan sebagai pulau maupun karang kering yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan titik pangkal. Ketentuan Perjanjian Hindia Belanda dan Inggris tahun 1891 hanya berlaku pada wilayah daratan dan tidak menentukan batas wilayah laut maka untuk menentukan delimitasi batas wilayah laut, ketentuan umum yang digunakan adalah Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia tahun 1969, dimana pengaturan mengenai Gosong Niger termasuk didalamnya, namun dalam ketentuan ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai titik-titik dasar batas landas kontinen yang berada pada kedua negara, khususnya di Gosong Niger. berdasarkan aturan tahun 1969 dan ketentuan hukum laut internasional maka Gosong Niger merupakan bagian dari landas kontinen yang berada diantara negara yang saling berdampingan (*adjacent state*). Cara menentukan garis batasnya digunakan sistem *Equidistance* jarak yang sama antara kedua negara, dengan ketentuan titik dasar yang berada di Tanjung Datuk dengan TD No.35 berdasar garis air rendah (*Low Waterline*), dari titik dasar dapat menentukan garis dasar (*reference point*), yang kemudian dapat digunakan untuk menarik garis antara kedua negara dengan jarak yang sama memotong Gosong Niger, sebagian menjadi Landas Kontinen Indonesia dan sebagian menjadi Landas Kontinen Malaysia. Dalam mewujudkan eksistensi

Gosong Niger pada dasarnya pemerintah dapat melakukan dengan beberapa tindakan yaitu penegakan dan perlindungan hukum, perundingan bilateral, menetapkan dan menegaskan garis batas landas kontinen Gosong Niger, demarkasi, perwujudan hak-hak di landas kontinen, melaksanakan kewajiban di landas kontinen, memperkuat sistem pertahanan keamanan, membentuk badan pengelola perbatasan. Tindakan Pemerintah tersebut disamping dapat tetap mempertahankan eksistensi dan menjamin kepastian hukum Gosong Niger sebagai salah satu Landas Kontinen Indonesia, namun diharapkan juga dapat tetap mewujudkan terpeliharanya hubungan baik antar kedua negara, sehingga mencegah timbulnya masalah dan konflik dikemudian hari.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalesveva Jaya Mahe (di laut kita jaya) sebuah slogan yang mengingatkan akan kejayaan nenek moyang Bangsa Indonesia sebagai pelaut ulung yang gemar mengarungi samudra di seluruh wilayah nusantara. Laut luas yang merangkai kepulauan Indonesia merupakan anugerah yang luar biasa yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia, dengan menyandang sebutan negara bahari yang memiliki potensi wilayah kelautan yang sangat besar. Di samping penampilan *landscape* Indonesia berupa hamparan kepulauan yang menjadi ladang subur, namun juga potensi wilayah lautnya tak kalah subur dan melimpah. Disepanjang wilayah perairan, baik secara horisontal yang merupakan kelanjutan dari daratan, dan secara vertikal baik itu yang berada pada permukaan laut maupun didasar laut (*sea bed* dan *subsoil*), yang sangat kaya akan potensi mineral dan sumber daya alam (*natural resource*).

Secara keseluruhan luas wilayah Indonesia mencapai 5,8 juta km² atau sama dengan 5.193.252 km², dengan 1.904.569 km² atau sama dengan 1/3 luas daratan dan dominasi 2/3 atau sama dengan 3.288.683 km² berupa perairan, sehingga Indonesia diakui sebagai negara maritim dan juga negara kepulauan (*archipelagic state*) sejumlah 17.504 pulau, diuntai sepanjang 80.791 km² garis pantai sekaligus terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dan sebagai negara kepulauan terbesar dunia. Hal ini tidak didapatkan dengan mudah, namun inilah hasil perjuangan panjang Ir. H. Djoeanda yang saat itu menjadi Perdana Menteri RI pada saat itu, tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957 mengumumkan kepada dunia bahwa wilayah laut Indonesia mencakup kedaulatan di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Nusantara. (<http://bappeda.kalbar.go.id/?pilih=lihat&id=92>). Dalam buku pintar seri senior disebutkan mengenai letak Gugusan kepulauan Indonesia diantara Garis 6° Lintang Utara 11° Lintang Selatan, dan diantara Garis Meredian 95° dan 141° Timur Greenwich. (Iwan Gayo, 2003:8)

Dengan wilayah dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, maka dibutuhkan peraturan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang berdaulat. Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi pondasi dari adanya tujuan penyelenggaraan pemerintah dan arah pembangunan negara kesatuan

Republik Indonesia, yaitu dalam alinia ke empat yang menyatakan bahwa, "...untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia..."

Tujuan bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, sangat jelas mencerminkan adanya keterkaitan hubungan antara tiga komponen utama (unsur konstitutif) dari negara yang meliputi: wilayah, penduduk, dan pemerintah yang berdaulat. Dalam hukum internasional diketahui terdapat komponen tambahan yaitu, adanya pengakuan (*Recognition*) merupakan unsur deklaratoir, sebagai kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain (*capacity to enter into relations with other state*), namun pengakuan bukanlah komponen yang mutlak dalam eksistensi suatu negara. Seperti yang dikemukakan oleh *the institute de Droit International*, bahwa keberadaan suatu negara baru dengan segala konsekuensi hukum yang mengikutinya diakui secara sah, meskipun terdapat penolakan atau tidak diakui oleh satu atau lebih negara lain (*the existence of the new State with all the legal effects connected with the existence is not affected by the refusal of one or more State to recognize*). Sehingga keberadaan suatu negara tetap akan sah secara kontitusional meskipun secara faktual tidak memperoleh pengakuan dari negara-negara lain. (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006:134)

Terkait dengan wilayah, negara memiliki wilayah darat, laut, dan udara. Untuk mempertahankan kedaulatan wilayah tersebut maka pemerintah harus membentuk dan menetapkan aturan yang jelas mengenai ketentuan perbatasan negara. Tujuan adanya kejelasan ketentuan perbatasan ini adalah untuk menjamin keutuhan wilayah dan kejelasan terhadap pemberlakuan yurisdiksi negara pada wilayah tersebut. Perbatasan-perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam kedaulatan territorial. (J.G. Starke, 1986:105).

Pentingnya penetapan perbatasan bagi suatu negara, ialah bermula ketika perbatasan berperan sebagai pintu gerbang (*gateway*) yang menghubungkan antara

satu negara dengan negara lain. Keberadaan perbatasan merupakan manifestasi utama terhadap wilayah negara, dengan peran penting yang mencakup batas yuridiksi dan kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam (*natural resouces*) dan buatan (*artificial resources*), kepastian hukum bagi penyelenggaraan pembangunan, serta unsur keamanan dan keutuhan nasional. (<http://bappeda.kalbar.go.id/?pilih=lihat&id=92>).

Pertimbangan ini mendasari perlunya aturan hukum (*magna charta*) dalam mengelola pulau kecil terluar, sekaligus mengakomodasi berbagai kepentingan secara komprehensif. Maka pada 29 Desember 2005 telah ditandatangani Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, dengan kebijakan pembangunan berdasarkan Wawasan Nusantara, serta berkelanjutan dan berbasis masyarakat, dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. (<http://bappeda.kalbar.go.id/?pilih=lihat&id=92>)

Sebagai suatu *Archipelagic State* (negara kepulauan) saat ini di Indonesia diketahui terdapat 92 pulau kecil terluar di 20 Provinsi, yang sebagian berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga Berdasarkan data informasi wilayah perbatasan NKRI Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri RI tahun 2005. Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, di wilayah daratan dengan tiga negara dan wilayah laut dengan 10 negara. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2005 disebutkan, 92 pulau terluar di Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga meliputi Negara Malaysia (22 pulau), Vietnam (dua pulau), Filipina (11 pulau), Singapura (4 pulau), Australia (23 pulau), Timor Leste (10 pulau) dan India (12 pulau). (<http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006110578>)

Perbatasan memang tidak hanya ditentukan pada wilayah konvensional seperti daratan, udara, maupun lautan, namun dengan banyaknya pulau dan wilayah daratan yang berhubungan atau berbatasan langsung dengan negara lain, tentunya akan menimbulkan permasalahan tersendiri jika batas yang dimaksud adalah pada bagian landas kontinen. Adanya pengaturan dan penanganan yang khusus dari pemerintah sangatlah urgen dalam hal ini. Batas Landas Kontinen (BLK), adalah landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya

hingga pinggiran laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Garis batas luar kondisi kontinen pada dasar laut, tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (*isobath*) 2500 m. (<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=buku+utama+rencana+induk+perbatasan+negara&meta>).

Di bagian Utara Propinsi Kalimantan Barat terdapat suatu penampakan alamiah yang merupakan bagian wilayah Republik Indonesia yaitu Gosong Niger, yang berbatasan langsung dengan Negara Federasi Malaysia. Dalam rangka pemanfaatan, eksplorasi dan eksploitasi terhadap Gosong Niger yang terletak diantara dua negara yang saling berdampingan (*adjacent state*) Indonesia dan Malaysia, maka dibutuhkan adanya suatu kejelasan mengenai ketentuan garis batas landas kontinen, sehingga tidak menimbulkan adanya permasalahan dikemudian hari.

Isu Gosong Niger muncul pada awal tahun 2006, dilatar belakangi kegiatan survey potensi sumberdaya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, yang ternyata melintas koordinat 2,172804 LU dan 109,677187 BT atau sekitar 0,7 mil di luar garis batas. (Pontianak Post, 23 Januari 2006:1). Lokasi Gosong Niger memang berada di kawasan perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia, berjarak sekitar 5,5 mil laut dari Tanjung Datuk. Dengan perkiraan luas mencapai 50 km², namun kondisi fisik selamanya terendam di bawah permukaan laut sedalam 4-12 (empat-duabelas) meter. Maka secara penampakan (*geographical features*), istilah *gosong* untuk Gosong Niger adalah penyebutan gundukan yang tenggelam di perairan dangkal. Memang perlu penelitian lebih lanjut mengenai aspek geologi, terminologi bahasa maupun bingkai ilmiah, tapi dalam bahasa Inggris telah dikenal sebagai *sand-bar*. (<http://bappeda.kalbar.go.id/?pilih=lihat&id=92>)

Gosong Niger bukan merupakan suatu pulau, sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat 1 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 definisi pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada saat air pasang, sedangkan definisi pulau kecil menurut PP Nomor 78 Tahun 2005 pada bab 1, pasal 1.b, yakni: "Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km², memiliki titik dasar

koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal pulau sesuai hukum internasional dan nasional”. Sehingga dapat ditarik konklusi terhadap definisi pulau kecil terluar bahwa pulau tersebut berada pada bagian terdepan dari wilayah suatu negara yang berhubungan atau berbatasan langsung dengan suatu negara. Gosong Niger walaupun berada pada bagian terdepan dari wilayah Indonesia, belum dapat dikategorikan sebagai pulau seperti dimaksud oleh konvensi. Walaupun demikian tidak menjadikan eksistensi dan peran Gosong Niger terabaikan. (<http://bappeda.kalbar.go.id/?pilih=lihat&id=92>).

Ketentuan titik dasar (TD) No.35 menjadi patokan klaim Indonesia atas Gosong Niger yang berada di sebelah utara Tanjung Datuk dan sekaligus pengakuan Indonesia bahwa Gosong yang berada di sebelah timur Tanjung Datuk adalah wilayah Malaysia. (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/18/sh04.html>). Ujung Tanjung Datuk menjadi patokan klaim batas daratan yang disetujui oleh Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1976 merujuk pada perjanjian batas darat Hindia Belanda dan Inggris pada tahun 1981. namun perjanjian tersebut tidak mengatur penetapan atau delimitasi wilayah laut, sehingga garis batas wilayah laut Indonesia-Malaysia di kawasan Tanjung Datuk dan Cina Selatan, diatur dengan Persetujuan Batas landas kontinen Indonesia-Malaysia tahun 1969. (Pontianak Post, 23 Januari 2006:1)

Berkaitan dengan kesepakatan batas Landas Kontinen pada 27 Oktober 1969 antara Indonesia dengan Malaysia, dan diratifikasi dalam Keppres 89/1969 khususnya titik koordinat timur (LCS 21-25), kawasan Gosong Niger membelah garis batas (dasar) laut di mana 2/3 bagiannya berada di teritorial Indonesia. Sebagai dua negara pantai yang berdampingan (*adjacent states*), Indonesia dan Malaysia memiliki klaim wilayah laut yang tumpang tindih (*overlapping claim*) di sekitar Gosong Niger. Malaysia menafsirkan garis batas landas kontinen antara Indonesia-Malaysia adalah garis ZEE (zona ekonomi eksklusif). (Rusdi Ridwan, Batas-batas Maritim NKRI dengan Negara Teangga, Jakarta 26 Juni 2006). Maka dalam hal ini dapat membuka potensi sengketa antar negara (*dispute*) dalam berbagai kasus menyangkut kegiatan eksploitasi, eksplorasi, dan pengelolaan wilayah. (<http://bappeda.kalbar.go.id/?pilih=lihat&id=92>)

Dengan kondisi geografis Gosong yang berupa gundukan tenggelam jika tidak dilakukan pemetaan secara jelas akan membahayakan navigasi, tidak menutup kemungkinan pemetaan tersebut dilakukan juga diseluruh gosong di kawasan kepulauan di seluruh Indonesia. Dalam PLI (Peta Laut Indonesia), Gosong digambarkan biru muda. PLI terakhir dibuat tahun 1992 dan belum diperbaharui. (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/19/sh08.html>)

Isu Gosong Niger menunjukkan pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya mengendalikan wilayah administrasinya. Ketidakmampuan itu antara lain karena aparat pemerintah daerah terlalu lama berada dalam sistem sentralisasi sehingga belum mampu menyesuaikan diri sepenuhnya dengan sistem desentralisasi. (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/18/sh04.html>)

Adanya aktifitas yang dilakukan oleh malaysia disekitar kawasan tersebut, jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan maka dalam jangka waktu 25 tahun maka Gosong Niger akan bernasib sama dengan Pulau Simpadan Ligitan atau bahkan akan menimbulkan ketegangan seperti yang dialami oleh Blok Ambalat, dimana awal tahun 2007 ini permasalahanya kembali tercium. Pembiaran terhadap keberadaan Gosong Niger dapat menimbulkan bibit masalah bila Malaysia sudah terlebih dahulu mengelola Gosong tersebut. Negara yang melakukan *effective occupation* akan lebih diakui di muka hukum dibandingkan dengan negara yang melakukan pembiaran terhadap kawasan yang diklaim sebagai miliknya. (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/19/sh08.html>)

Gosong Niger sebagai kelanjutan dari wilayah daratan Indonesia dan Malaysia, oleh karena itu perlu adanya ketegasan menyangkut keberadaan Garis batasnya, selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan eksistensi terhadap keberadaan, yang tak kalah pentingnya adalah agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari antara kedua negara yang bersangkutan.

Bedasarkan uraian tentang Gosong Niger tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang:

“EKSISTENSI GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL”

B. Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian ilmiah hal penting yang pertama kali harus dirumuskan adalah rumusan masalah. Mengapa perumusan masalah sangatlah penting dalam penelitian? Hal ini dikarenakan suatu rumusan masalah menjadi suatu acuan mengenai hal atau obyek apa yang akan diteliti untuk ditemukan jawabannya. Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu harus merumuskan masalah terlebih dahulu, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian. (Soerjono Soekanto,1984:109)

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut,

1. Bagaimanakah penetapan garis batas landas kontinen di Gosong Niger antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia menurut ketentuan hukum Laut Internasional?
2. Bagaimanakah tindakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan eksistensi Gosong Niger sebagai landas kontinen yang merupakan yurisdiksi Indonesia sebagai Negara pantai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya maka untuk mengarahkan suatu penelitian maka diperlukan adanya tujuan dari adanya suatu penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut (Soerjono Soekanto,1984:119).

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. (Bambang Sunggono,1996:109).

Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam yaitu Tujuan Objektif dan Tujuan Subyektif, dimana tujuan obyektif merupakan tujuan yang berasal dari tujuan dari penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan subyektif berasal dari peneliti, maka dari itu dalam penelitian ini tujuan obyektif dan subyektif adalah,

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui eksistensi Gosong Niger sebagai fenomena alamiah berupa landas kontinen yang berada diantara wilayah Indonesia dan Malaysia.
- b. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penetapan garis batas landas kontinen Gosong Niger antara Indonesia dengan Malaysia.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian penetapan garis batas Gosong Niger antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan ketentuan hukum laut internasional.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, yang khususnya Hukum Internasional.
- b. Untuk memperoleh data-data yang digunakan untuk penulisan Hukum Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana dibidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan faedah atau manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis yang meliputi,

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dibidang Hukum, khususnya Hukum Internasional dan lebih spesifik lagi yaitu terkait dengan hukum laut internasional mengenai ketentuan landas kontinen.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada Masyarakat pada Umumnya dan kalangan akademisi yang menggeluti Hukum Internasional pada khususnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup Hukum Internasional khususnya hukum laut internasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah dalam hal penentuan dan penetapan ketentuan delimitasi garis batas landas kontinen Gosong Niger yang berada diantara negara Indonesia dan Malaysia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dan bahan kajian untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terkait dengan penentuan garis batas landas kontinen antara Negara-negara yang saling berdampingan (*adjacent states*) seperti halnya Indonesia dengan Malaysia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui pentingnya penentuan delimitasi garis batas landas kontinen, sehingga masyarakat dapat menyadari peranannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat Internasional.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, Sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. (Soerjono Soekanto, 1984:42).

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. (Bambang Sunggono, 1996: 38)

Sedangkan metode adalah suatu cara atau jalan (Soerjono Soekanto, 1984: 5). Menurut kamus ilmiah metode adalah cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu, cara kerja. (Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, 1994: 461). Sehingga metode digunakan sebagai suatu cara yang teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan yang diteliti dalam suatu penelitian.

Adapun dalam metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Eksistensi rangkaian suatu metode penelitian dapat diawali dari penentuan jenis penelitiannya, dimana jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Penelitian normatif, adalah merupakan penelitian pustaka, sehingga dalam pengumpulan data-data penulis tidak perlu mencari langsung ke lapangan akan tetapi cukup dengan pengumpulan data sekunder yang kemudian dikonstruksikan dalam satu rangkaian hasil penelitian.

Penelitian normatif sebagai studi pustaka, pada dasarnya adalah berfungsi untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. (Bambang Sunggono, 1996: 112).

Dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif (doktrin) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Soerjono Soekanto, 1984:43).

Dari uraian teori tersebut maka penulis berusaha mengkaji tentang eksistensi garis batas landas kontinen Gosong Niger antara Indonesia dengan Malaysia berdasarkan tinjauan dari sudut pandang Hukum laut internasional dengan metode penelitian hukum normatif.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan penulis untuk mendukung data-data penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Perjanjian Internasional Sub Direktorat Perjanjian Politik Wilayah bagian Perjanjian Politik dan Keamanan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
3. United Nation Information Center (UNIC), Jakarta.
4. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Cyber Media.

c. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini jenis data digunakan adalah data sekunder yaitu, data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia, atau dapat disebut sebagai data *given* begitu adanya karena tidak diketahui metode pengambilannya dan validitasnya. (Bambang Sunggono, 1996:37). Dimana data sekunder yang dimaksud adalah data yang memberikan informasi terkait mengenai Gosong Niger. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari studi kepustakaan, berupa literature, majalah, koran, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, korespondensi, dan semua bahan sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

d. Sumber Data

Penelitian hukum normatif berdasarkan ketentuan jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1). Bahan Hukum Primer,

Berupa bahan hukum yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa, norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman kolonial belanda yang masih

berlaku.(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985:14-15). Bahan Primer dari penelitian ini adalah, berupa persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia Tentang penetapan Garis Batas Landas Kontinen tahun 1969, yang di sahkan dalam Keputusan Presiden R.I Nomor 89 Tahun 1969 tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang penetapan garis batas landas kontinen Negara 1969, dan Ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Bagian VI Pasal 76-85 yang mengatur tentang landas kontinen.

2). Bahan Hukum Sekunder,

Bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, dimana dalam penelitian ini sumber bahan sekunder berasal dari buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, makalah-makalah ilmiah, korespondensi, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini dokumen-dokumen, makalah, atau karya tulis dari penulis terdahulu, adalah berasal dari arsip yang dimiliki oleh Departemen Luar Negeri RI, dan Departemen Dalam Negeri RI, yang memberikan informasi mengenai eksistensi garis batas Gosong Niger yang berada di antara negara yang saling berdampingan (*adjacent state*) yaitu Indonesia dan Malaysia.

3). Bahan Hukum Tersier,

Bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan Hukum Primer dan Sekunder yang berupa Ensiklopedia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Bibliografi.

e. Teknik Pengumpulan Data

Suatu teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian ada banyak macamnya tergantung pada masalah yang dipilih serta metode penelitian yang digunakan. (Bambang Sunggono, 1996: 53). Sesuai dengan yang telah ditegaskan sebelumnya bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, sehingga data-data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari membaca, mengkaji, dan menelaah data yang berasal dari buku-buku, literature, makalah, dokumen-dokumen, Koran, majalah, karya tulis ilmiah, serta berbagai sumber kajian yang mengulas mengenai

penentuan dan penetapan garis batas landas kontinen oleh penulis dikaitkan dengan ketentuan yang diaplikasikan pada Gosong Niger yang berada di antara Indonesia dengan Malaysia berdasarkan tinjauan dari sudut pandang Hukum Laut Internasional.

f. Teknik Analisis Data

Pada penelitian Hukum Normatif yang menelaah data sekunder, penulis disini menggunakan teknik analisis logis, sistematis, dan yuridis, untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan, guna mencapai tujuan dari penelitian yaitu untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pengertian dari teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1). Analisis Logis.

Analisis yang mempersoalkan rasionalitas deskriptif (deduksi-induksi) terhadap data yang diperoleh termasuk didalamnya penggunaan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang dikaji, yaitu tentang penetapan garis batas landas kontinen Gosong Niger yang berada di antara wilayah RI dan Malaysia.

Rasionalitas deskriptif (deduksi-induksi), dimana yang dimaksud deduksi dalam penelitian ini adalah, menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu. Sedangkan induksi adalah, digunakan untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun dan ditata melalui usaha koleksi dan inventarisasi. (Bambang Sunggono, 1996:71)

2). Analisis Sistematis.

Analisis yang hasil penelitiannya merupakan rangkaian hal-hal yang tidak terlepas dalam hubungannya dengan suatu sistem, yaitu adanya bagian yang saling berhubungan dan bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, analisis sistematis adalah mempersoalkan saling keterkaitan data yang diperoleh sebagai suatu system, dimana dalam kajian penelitian ini dengan menghubungkan adanya pemikiran penulis dengan teori-teori yang terkait dengan penelitian tentang penetapan garis batas landas kontinen Gosong Niger yang berada di antara wilayah RI dan Malaysia.

3). Analisis Yuridis.

Analisis yang menyajikan dan mengkaitkan hasil penelitian ini dengan ketentuan hukum internasional dan ketentuan ketentuan lain yang berlaku di Indonesia, maksudnya bahwa dari keterkaitan semua teori, pemikiran penulis dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang terkait, dimana dalam penelitian ini peraturan yang digunakan adalah meliputi persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia Tentang penetapan Garis Batas Landas Kontinen tahun 1969 dan ketentuan mengenai landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah sudah lazim jika terdapat suatu sistematika, agar suatu penelitian hukum dapat disajikan secara sistematis dan terarah. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Pembatasan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pikir yang berisi tentang Tinjauan umum mengenai eksistensi; Tinjauan umum tentang wilayah negara, meliputi : Pengertian unsur-unsur negara, cara memperoleh wilayah, wilayah negara, dan hak-hak kewajiban negara; Tinjauan Mengenai Hukum Laut, meliputi: Pengertian Hukum Laut, sejarah dan sumber-sumber hukum laut, dan pembagian wilayah laut; Tinjauan tentang landas kontinen, meliputi: Pengertian landas kontinen, status yuridis landas kontinen, dan cara penentuan garis batas landas kontinen; Tinjauan mengenai Gosong Niger.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini yang pertama akan dibahas adalah mengenai ketentuan yang menunjukkan eksistensi garis batas Gosong Niger yang berada di antara wilayah Indonesia dengan Malaysia sebagai negara yang berdampingan

(*adjacent state*), meliputi pembahasan eksistensi Gosong Niger sebagai landas kontinen dan penentuan garis batas landas kontinen Gosong Niger berdasarkan aspek Hukum Laut Internasional serta pembahasan kedua, mengenai tindakan pemerintah dalam mempertahankan eksistensi Gosong Niger sebagai bagian landas kontinen Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini terdapat dua bagian yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Eksistensi

Penelitian sebagai suatu langkah untuk menemukan jawaban dari suatu masalah, sebelum membahas mengenai suatu permasalahan maka perlu kiranya seorang peneliti dapat memahami judul yang telah ditentukan. Sesuai dengan judul dalam penelitian ini dijumpai adanya istilah eksistensi. Untuk memperjelas makna eksistensi yang dimaksud maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai pengertian istilah tersebut. Sesuai dengan pengertian Kamus Ilmiah Populer Eksistensi adalah keberadaan; wujud (yang tampak); adanya; sesuatu yang membedakan antara suatu benda dengan benda yang lain. (Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, 1994:133) Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia eksistensi mengandung arti adanya atau keberadaan. (tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988:221)

Sesuai dengan beberapa pengertian tersebut dapat ditentukan bahwa eksistensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah eksistensi mengenai keberadaan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Gosong Niger ditinjau dari hukum laut internasional. Dalam penelitian ini berdasarkan judul adanya eksistensi yang dimaksud meliputi, pertama merupakan eksistensi dari Gosong Niger sebagai landas kontinen yang menerangkan keadaan penampilan fisik Gosong Niger dan kedua adalah eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Gosong Niger yang menjelaskan mengenai dasar keberadaan dan cara-cara penentuan garis batas landas kontinen di Gosong Niger.

2. Tinjauan Umum tentang Wilayah Negara

a. Pengertian Unsur-unsur Negara.

Negara adalah merupakan subyek utama dari Hukum Internasional baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. (I Wayan Parthiana, 1990:59). Negara merupakan subyek Hukum Internasional yang paling utama dibandingkan dengan subyek Hukum Internasional lainnya, sebab negara memiliki unsur-unsur konstitutif yang meliputi:

1). Penduduk yang tetap.

Menurut Boer Mauna Penduduk adalah sekumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk adalah unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara. (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006:106)

2). Wilayah tertentu.

Sering dikatakan orang, tidak akan ada negara tanpa penduduk. Juga dapat dikatakan tidak akan ada negara tanpa wilayah. Oleh karena itu, adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Tidak mungkin adanya suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Disamping itu suatu wilayah tidak perlu luas bagi didirikannya suatu negara. Sejak dulu kita mengenal adanya negara-negara mikro dan keberadaannya tidak pernah ditolak oleh masyarakat internasional. Perubahan-perubahan tapal batas, baik yang mengakibatkan berkurangnya maupun bertambahnya wilayah suatu negara tidak akan mengubah identitas suatu negara tersebut.

Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya. Wilayah sebagai unsur konstitutif negara dalam hukum internasional tidak menentukan berapa harusnya luas wilayah, seperti beberapa contoh negara-negara kecil yaitu Seychelles dengan luas 278 km, Nauru hanya 21 km, Singapura hanya 218 km, dan Togo dengan 56.000 km, selain itu negara India dengan luas 3.287.598 km dan Cina dengan 9.596.961 km semuanya diakui oleh hukum internasional sebagai negara berapapun itu luasnya. Adapun negara tertentu yang memiliki wilayah yang terpisah wilayahnya pada kawasan tertentu misalnya seperti negara Perancis yang memiliki daerah di seberang lautan pasifik yaitu Kaledonia, Wallis, Fortuna, dan Polinesia Perancis. (Boer Mauna, 2005:20-21)

3). Pemerintah .

Sebagai suatu person yuridik negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Sebagai tituler dari kekuasaan, negara hanya dapat melaksanakan kekuasaan tersebut melalui organ-organ yang terdiri dari individu-individu.

Pemerintah, adalah badan eksekutif dalam suatu negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya. Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat ini yang diinginkan oleh hukum internasional ialah bahwa Pemerintah tersebut mempunyai kekuasaan yang efektif atas seluruh penduduk dan wilayah negaranya. Yang dimaksud dengan efektif ialah pemerintah tersebut mempunyai kapasitas riil untuk melaksanakan semua fungsi kenegaraan termasuk memelihara keamanan dan tata tertib di dalam negeri dan pelaksanaan berbagai komitmen diluar negeri. Dalam hukum internasional suatu pemerintah yang stabil dan efektif memudahkan hubungan dengan negara lain. Pemerintah suatu negara bertindak atas nama negara dalam berhubungan dengan negara lain. (Boer Mauna, 2005: 20-21)

4). Kedaulatan.

Negara dapat saja lahir dan hidup tetapi belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. (Boer Mauna, 2005:23)

Dalam hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu;

- i). Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- ii). Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk

membuat Undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk memetui.

- iii). Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat diwilayah tersebut. (Boer Mauna, 2005:24)

Seperti yang telah dinyatakan oleh Boer Mauna bahwa aspek teritorial kedaulatan meliputi “kekuasaan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda diwilayah tersebut”.

Sedangkan, Menurut Brownlie wilayah dibagi menjadi empat kelompok yaitu;

- i). Wilayah berdaulat (*territorial sovereignty*) umumnya meliputi daratan, perairan dalam, dan dasar laut (*sea bed dan subsoil*). Konsep wilayah meliputi pulau-pulau, selat, batu, karang;
- ii). Wilayah yang tidak menjadi subyek kedaulatan dari Negara lain dan yang memiliki status khusus seperti mandate;
- iii). Wilayah *res nullius* adalah wilayah yang dapat dikuasai oleh suatu Negara tapi sampai saat ini masih belum ada yang menguasainya;
- iv). Wilayah *res communis* adalah wilayah yang dijadikan kepemilikan bersama bagi seluruh umat manusia. (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006:178)

b. Cara-cara untuk Memperoleh Wilayah.

a. Okupasi

Okupasi adalah suatu cara untuk memperoleh wilayah melalui pendudukan. Hal mana pendudukan disini dilakukan terhadap suatu wilayah, yang sebelum terjadinya pendudukan di wilayah tersebut tidak terdapat kekuasaan atau disebut wilayah tak bertuan, *terra nullius*. Namun saat ini sudah tidak ada wilayah seperti yang dimaksud, walaupun saat ini sangat banyak sengketa yang berdasarkan klaim atas wilayah *terra nullius* misalnya dalam *Eastern Greendland Case*.

b. Preskripsi

Preskripsi adalah suatu tindakan yang mencerminkan kedaulatan atau penguasaan terhadap suatu wilayah dengan cara-cara damai dalam waktu tertentu dengan tanpa adanya keberatan dari negara-negara lain. Preskripsi dilakukan terhadap wilayah *terra nullius*, namun dituntut jangka waktu yang lama untuk melakukan penguasaan (*the effective control*) dibandingkan dengan okupasi. Misalnya dalam dua kasus *The Island of Palmas Case* dan *Eastern Greenland case*.

Untuk kasus pertama, dimana kedaulatan Pulau Palmas disebelah selatan Pulau Mindan Filipina, dimana AS mengklaim berdasar atas Traktat Paris 1898, dan memahaminya sebagai pewaris Spanyol. Disamping itu Belanda memiliki pemahaman lain berdasarkan aspek historis negara yang bersebelahan dimana pulau tersebut adalah bagiannya, sehingga dalam Putusnya pengadilan memenangkan Belanda.

Kemudian kasus yang kedua, terkait klaim atas Greenland yang dilakukan oleh Norwegia yang menyatakan wilayah tersebut adalah *terra nullius*. Sedangkan Denmark menyatakan klaim telah menguasai Greenland sejak tahun 1721 dimana saat itu Denmark dan Norwegia adalah satu negara. Sehingga pengadilan memutuskan bahwa Denmark yang menjadi pemilik sah wilayah yang disebut Greenland.

c. Cession

Cession adalah suatu transfer kekuasaan dari satu kedaulatan ke kedaulatan lainnya, pada umumnya melalui sebuah perjanjian. Ditambahkan oleh Malcolm N.Shaw yang pada umumnya terjadi setelah peperangan. Bahkan menurutnya pengalihan kekuasaan dari penguasa kolonial terhadap koloninya bisa dikatakan sebagai *quasy cession*. Proses *cession* merupakan pengalihan kedaulatan yang satu keying lainnya, maka negara penerima akan memperoleh hak dan kewajiban seperti negara yang memiliki sebelumnya.

Semisal dalam kasus pengalihan (*cession*) atas Pulau Palmas yang diserahkan Spanyol kepada AS melalui perjanjian Paris 1898, dimana dijelaskan

bahwa Palmas adalah bagian dari Filipina. Namun saat pengambilan Pulau tersebut berada pada kekuasaan Belanda, sehingga putusan dari Arbitrator Max Huber memenangkan Belanda karena telah menerapkan kedaulatannya sejak awal abad 18, walaupun awalnya Spanyol telah menguasainya dan kemudian menyerahkan pada AS.

d. Akresi

Akresi adalah suatu nama yang ditujukan pada suatu proses untuk mendapatkan wilayah baru melalui proses alamiah, yakni tanpa campur tangan manusia. Hal ini dapat kita temukan padanannya dalam pembentukan suatu daratan baru yang terhubung dengan wilayah daratan yang telah ada. Dalam hal kemunculan suatu wilayah baru tersebut dalam wilayah suatu negara maka wilayah tersebut secara otomatis menjadi bagian dari wilayah negara tersebut. Contohnya terjadinya letusan volkano di bawah laut pada Januari 1986 di kawasan Pasifik, hingga memunculkan pulau baru yang masuk wilayah teritorial Jepang, dimana daratan tersebut disebut sebagai Pulau Iwo Jima.

e. Aneksasi (annexation)

Istilah penaklukan atau *conquest* memiliki padanan dengan aneksasi atau *annexation*. Penggunaan teknik ini pada saat ini sudah ditinggalkan mengingat hal ini dapat merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam hubungan internasional sebagaimana yang tercantum dalam piagam PBB. Yang mana sejak LBB penggunaan kekerasan (perang) sebagai instrument bagi kebijakan nasional telah dilarang. Bahkan secara eksplisit terdapat dalam *the stimson doctrine of non recognition (1932)* yang menyatakan apabila dalam upaya untuk perolehan suatu wilayah dengan menggunakan kekerasan maka perolehan tersebut tidak akan diakui. Oleh karena itu, pada saat ini teknik penaklukan hanya menjadi kajian akademik. (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 179-182).

c. Wilayah Negara.

Wilayah Negara meliputi,

- i). Wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya, yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang

bersangkutan. Demikian pula di wilayah itu pula pemerintah negara melaksanakan dan mengendalikan segala kegiatan pemerintahannya. Antara wilayah daratan negara haruslah tegas batas-batasnya. Pada umumnya batas-batas wilayah daratan itu ditetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian garis batas wilayah antara negara-negara yang berbatasan itu.

ii). Wilayah perairan, disebut juga sebagai perairan territorial yang merupakan bagian wilayah suatu Negara yang tunduk pada kedaulatan suatu negara. Wilayah perairan dibagi menjadi dua yaitu,

a. Laut territorial

Laut territorial, merupakan jalur laut yang terletak pada sisi luar garis pangkal dan sebelah luar yang dibatasi oleh garis atau batas luar. Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional disepakati lebar laut territorial adalah 12 mil diukur dari garis pangkal yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut.

b. Perairan pedalaman, yang meliputi:

1). Laut pedalaman

Perairan dalam adalah perairan yang berada pada sisi darat (dalam) garis pangkal lurus dan sisi luar dari bekas garis pangkal normal. Terjadi karena penarikan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung. Dengan penerapan penarikan garis pangkal lurus pada pantai yang berliku-liku atau pada pantai yang di depannya terdapat gugusan pulau maka akan mengakibatkan adanya bagian perairan atau laut yang terletak disebelah dalam dari garis pangkal lurus.

2). Perairan darat

Bagian perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal normal maupun bekas garis pangkal normal. Perairan darat dapat terdiri atas, perairan sungai, danau, terusan, waduk, perairan pada pelabuhan.

iii). Wilayah dasar laut dan tanah yang terletak dibawahnya. Wilayah kedaulatan negara meliputi dasar laut dan tanah yang ada dibawahnya yang terletak dibawah perairan. Segala sumber daya alam yang terkandung didalamnya menjadi hak dan kedaulatan negara sepenuhnya, sehingga wilayah kedaulatan negara menyatu dalam wilayah daratan, tanah dibawahnya, serta wilayah perairan, dasar laut, dan tanah yang ada dibawah wilayah perairan tersebut.

vi). Wilayah Ruang Udara.

Ruang udara merupakan bagian dari wilayah Negara yang terletak diatas permukaan wilayah daratan dan diatas permukaan wilayah perairan seperti yang disebutkan dalam UNCLOS Pasal 2 ayat 1 dan 2. (I Wayan Parthiana,1990:103-119)

d. Hak dan Kewajiban Negara.

Hasil konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara-negara, yang disusun oleh komisi hukum Internasional (ILC) PBB pada tahun 1949 meliputi ketentuan sebagai berikut:

Hak-hak Negara:

- 1) Hak atas kemerdekaan (Pasal 1);
- 2) Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada didalam wilayahnya (Pasal 2);
- 3) Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan Negara-negara lain (Pasal 5);
- 4) Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (Pasal 12).

Sedangkan Kewajiban-kewajiban Negara adalah:

- 1) Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Negara lain (Pasal 3);
- 2) Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain (Pasal 4);
- 3) Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia (Pasal 6);
- 4) Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7);

- 5) Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 8);
- 6) Kewajiban untuk tidak menggunkan kekuatan atau ancaman senjata (Pasal 9);
- 7) Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya Pasal 9 diatas;
- 8) Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan (Pasal 12);
- 9) Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik (Pasal 13);
- 10) Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (Pasal 14). (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006:112-113).

2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional

a. Pengertian Hukum Laut

Definisi laut adalah, keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi, definisi ini hanya bersifat fisik semata. Definisi laut menurut hukum laut adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di permukaan bumi.

Peranan laut, pertama adalah sebagai jalan raya yang menghubungkan pelosok dunia. Masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Sehingga dapat dimengerti laut merupakan sarana penting dalam hubungan internasional. Kedua, selain sebagi potensi komersial dan starategis laut juga merupakan sumber makanan berupa ikan, dan dasar laut yang merupakan sumber minyak, gas bumi, dan mineral lainnya. Ketiga, laut juga berguna untuk riset mengingat luas laut adalah 2/3 dari permukaan bumi.

Kekayaan laut, tanah dibawah dasar laut menghasilkan bahan tambang yaitu:

- *Continental Shelf*, mengandung minyak bumi sulphur, hard mineral, batu-bara, diamonds, dan lain-lain.
- *Continental Slope*, mengandung phosphor.

- *Abyssal Plain* dan dasar laut dalam, mengandung nodules yang terdiri dari kira-kira 25% mangan, 15% besi, cobalt, nikel, dan copper. (Boer Mauna, 2005: 305-307)

Penengertian hukum laut adalah, hukum dimana negara pantai yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan (*land locked*) dan atau organisasi internasional mengatur hubungan-hubungannya dalam hubungannya dengan wilayah-wilayah tersebut tunduk kepada Yurisdiksi negara pantai dan dalam hubungannya dengan wilayah laut tersebut dan dasar laut di bawah yurisdiksi nasional. Peraturan yang mengatur laut disusun berdasar kebiasaan dan perjanjian. (Rebecca M M Wallace, 1985:141)

Pentingnya hukum laut, terkait dengan arti pentingnya dalam hukum internasional, tujuan hukum ini adalah, mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan dan sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan oleh kendaraan khusus yaitu kapal-kapal, sehingga hukum laut harus menetapkan status kapal-kapal tersebut. Selain itu hukum laut juga memiliki kompetensi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan laut terutama antara negara maju dan negara berkembang. (Boer Mauna, 2005: 307).

b. Sejarah dan Sumber Hukum Laut Internasional

Awal mula pengaturan mengenai hukum laut adalah berdasar pada hukum kebiasaan internasional mengenai laut, kemudian ada upaya dari masyarakat internasional untuk melakukan kodifikasi terhadap peraturan kebiasaan tersebut pada tahun 1930. Dalam waktu itu diadakan suatu konferensi diplomatik di Den Haag akan tetapi gagal. Hingga tahun 1958, ketentuan-ketentuan hukum laut tetap mengacu pada hukum kebiasaan, dimana hukum kebiasaan sendiri lahir dari suatu perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus atas dasar kebutuhan dilaut sepanjang zaman. Perkembangan hukum laut pasca Perang Dunia II, dimulai dengan munculnya gagasan mengenai pengaturan tentang Hukum Laut. Diantaranya pada tanggal 29 April 1958 diselenggarakan suatu Konferensi PBB I tentang Hukum Laut

di Jenewa yang dihadiri 86 negara, dimana perundingan tersebut dilakukan selama 2 bulan dan berhasil mencetuskan 4 konvensi yaitu:

- 1). *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan), mulai berlaku 10 September 1964.
- 2). *Convention on the High Seas* (Konvensi mengenai Laut Lepas), mulai berlaku 30 September 1962.
- 3). *Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of the High Seas* (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966.
- 4). *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi mengenai Landas Kontinen), mulai berlaku 10 Juli 1964. (Boer Mauna, 2005:308)

Namun konferensi tahun 1958, ini tidak berhasil menentukan lebar laut wilayah, sehingga pada tahun 1960 diselenggarakan kembali Konferensi PBB II tentang Hukum Laut (UNCLOS II), membahas secara khusus mengenai hal ini akan tetapi juga gagal untuk menghasilkan konvensi tentang laut wilayah, dikarenakan kekurangan 1 suara dalam proses pemungutan suara, dan adanya perbenturan kepentingan antara kepentingan negara maritim dan negara pantai yang tidak dapat diatasi.

Konferensi Hukum Laut III yang diterima pada tanggal 30 April 1982 dalam sidang yang ke-11 di Montego Bay New York ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982. Konvensi tersebut merupakan karya fenomenal yang terbesar dalam sejarah hukum laut internasional, karena konferensi ini merupakan titik kulminasi dari perundingan antar negara yang dimulai sejak sebelum tahun 1973. Dengan adanya UNCLOS III mulai ada kesepakatan secara internasional mengenai pengaturan tentang hukum laut, yang berlaku hingga saat ini dan merupakan penyempurna dari ketentuan hukum laut yang pernah ada.

c. Pembagian Wilayah Laut

Secara topografi laut dibagi atas:

- 1). Dataran Kontinen (*Continental Shelf*), sampai pada kedalaman 200 meter.

- 2). Lereng Kontinental (*Continental Slope*), dengan kedalaman antara 200 dan 2.000 meter.
- 3). Kaki Kontinen (*Continental Rise*), dengan kedalaman antara 2.000 dan 3.000 meter.
- 4). *Abbyssal Plain* dengan kedalaman lebih dari 3.000 meter. (Boer Mauna, 2005:306-307).

Semua pembagian wilayah laut didasarkan pada garis pangkal. Dalam ketentuan UNCLOS 1982, dewasa ini dikenal adanya 3 macam garis pangkal yaitu:

1). Garis Pangkal Normal (*Normal Base Lines*)

Dalam keadaan biasa (normal) garis pangkal dipergunakan sebagai titik mula pengukuran bagian laut , dimana garis pangkal normal (*Normal Base Lines*) merupakan garis air surut sepanjang pantai seperti yang ditandai dalam peta skala besar yang diakui secara resmi oleh negara pantai.

2). Garis Pangkal Lurus (*Straight Base Line from Point to Point*)

Dalam keadaan khusus jika wilayah pada garis pantainya bervariasi dan terputus-putus atau ada suatu rumbai pulau-pulau sepanjang pantai yang dalam hubungannya sangat berdekatan sehingga digunakan cara atau metode garis pangkal lurus (*Straight Base Line*), yang menghubungkan titik-titik yang bertepatan sebagai pangkal mula pengukuran bagian laut.

3). Garis Pangkal Kepulauan (*Archipelagic Base Lines*)

Pada suatu negara yang memiliki keadaan sangat khusus yakni hingga memenuhi syarat disebut sebagai negara kepulauan, sehingga dipergunakan metode pengukuran dengan menentukan garis pangkal kepulauan (*Archipelagic Base Lines*), yaitu garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang-karang kering dari kepulauan, asalkan dalam garis semacam itu termasuk didalamnya pulau-pulau induk dari suatu wilayah, yang ratio dari wilayah perairan dan daratan, termasuk atol adalah satu banding satu dan sembilan banding satu.

Menurut Hasyim Djalal menentukan pembagian wilayah laut berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982), membagi wilayah laut secara horizontal dan vertikal yaitu:

- 1). Pembagian wilayah laut secara Horizontal, meliputi :
 - a. Perairan Pedalaman, yakni perairan yang berada pada sisi dalam garis pangkal. Perairan pedalaman terdiri atas : pelabuhan, muara, sungai, terusan, dan teluk. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas perairan pedalaman karena diakui sebagai bagian wilayah integral negara pantai.
 - b. Laut Teritorial, adalah jalur laut yang ada di sisi luar atau di laut garis pangkal selebar tidak lebih dari 12 mil laut. Dimana menjadi hak tiap-tiap negara untuk menentukan lebar laut teritorialnya sampai batas tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Batas terluar laut teritorial ialah garis yang setiap titik-titiknya ada suatu jarak yang terdekat dengan titik-titik garis pangkal sejauh lebar laut teritorial yang telah ditentukan.

Mengenai kedaulatan negara pantai meluas sampai diluar wilayah daratannya, perairan pedalamannya dan dalam hal negara kepulauan, di luar perairan kepulauannya, yakni sampai pada laut teritorial dan tanah dibawah laut teritorial, selain itu kedaulatan yang dimiliki meluas sampai pada ruang udara, dasar laut teritorial dan tanah di bawah laut teritorial, dimana kedaulatan negara pantai atas laut teritorial tunduk pada ketentuan hukum internasional. Meskipun laut teritorial tunduk pada kedaulatan negara pantai, namun terdapat hak lintas damai bagi kapal negara semua negara berpantai ataupun tidak berpantai untuk melalui perairan teritorial negara pantai. Kapal yang melintas dengan hak lintas damai (*Innocent Passage*) harus memenuhi persyaratan hak lintas damai dengan menunjukkan identitas negara bendera, untuk kapal selam selama menggunakan hak lintas damai harus berlayar dipermukaan air dan menunjukkan identitas negaranya berupa bendera.

Negara pantai memiliki hak untuk membuat peraturan hukum di wilayah laut teritorialnya berdasarkan ketentuan hukum internasional, dimana dapat berupa peraturan yang meliputi ketentuan:

1. Ketentuan mengenai hak lintas damai melalui laut teritorial, selain hak tersebut jika dengan alasan keselamatan navigasi dapat mensyaratkan hak lintas damai bagi kapal asing yang melalui laut teritorialnya;
2. Ketentuan menggunakan alur laut dan jalur terpisah sebagaimana disediakan, ditujukan atau diwajibkan bagi peraturan lintas kapal;
3. Ketentuan mengenai perlindungan bagi negara pantai, untuk mencegah hal-hal yang terkait dengan hak lintas yang tidak untuk maksud damai;
4. Negara pantai berhak tanpa diskriminasi menahan wilayah yang ditentukan pada laut teritorialnya lintas damai kapal asing apabila penahanan tersebut terkait dengan esensi bagi perlindungan keamanan wilayahnya.

Disamping memiliki hak terhadap wilayah teritorialnya, negara pantai juga memiliki kewajiban yang patut dipatuhi yaitu:

1. Tidak menghambat hak lintas damai kapal asing yang melalui laut teritorialnya;
2. Mengumumkan dengan tepat bahaya apapun bagi navigasi yang ia ketahui di laut teritorialnya.

c. Zona Tambahan, adalah jalur yang merupakan kelanjutan dari laut territorial yang lebarnya tidak melebihi jarak 24 mil laut dari garis pangkal yang bersangkutan. Dalam wilayah zona tambahan negara pantai mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terkait dengan hal:

- 1) Pencegahan terhadap pelanggaran hukum dan perundang-undangan bea cukai, pajak, imigrasi, atau kesehatan di wilayah atau di laut teritorialnya;
- 2) Menghukum pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan tersebut yang dilakukan di wilayah hukumnya atau di laut teritorialnya.

d. Zona Ekonomi Eksklusif, adalah jalur laut yang terletak di luar dan berdekatan dengan laut territorial selebar 200 mil laut dari garis pangkal laut territorial.

Pada zona ekonomi eksklusif, negara pantai memiliki:

- 1) Hak berdaulat (*Sovereign Right*) untuk tujuan eksploitasi dan eksplorasi, pelestarian dan pengelolaan sumberdaya alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan air yang berdekatan diatasnya dan hak berdaulat dalam berbagai aktifitas lain untuk ekplorasi dan eksploitasi ekonomi dari zona ekonomi eksklusif, seperti produk energi dari air laut dan angin;
- 2) Yurisdiksi sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan yang relevan mengenai:
 - a) pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya;
 - b) penelitian ilmiah laut;
 - c) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam hal ini bahwa negara pantai juga mempunyai hak eksklusif atau yurisdiksi eksklusif atas hal tersebut dalam butir 1 dan 2.

Disamping terdapat hak bagi negara pantai, tapi juga terdapat kewajiban untuk menentukan berbagai sarana untuk melestarikan sumber hayati dalam zona ekonomi eksklusif, sehingga bagi negara lain pun di berikan hak dan dibebani kewajiban dalam lingkup zona ekonomi eksklusif yang meliputi:

- 1) Semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai, menikmati kebebasan berlayar, terbang diatasnya, menempatkan kabel dasar laut dan pipa saluran dan penggunaan laut lain yang secara internasional adalah sah sehubungan dengan kebebasan tersebut;
- 2) Dalam melaksanakan hak dan kewajiban di zona ekonomi eksklusif, negara harus memperhatikan seperlunya hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati hukum dan perundang-undangan negara pantai dan ketentuan hukum internasional lain;
- 3) Semua negara harus melestarikan zona ekonomi eksklusif untuk tujuan damai;
- 4) Negara tidak berpantai dan negara yang mempunyai keadaan geografis khusus, mempunyai hak atas dasar keadilan, untuk berpartisipasi dalam

eksploitasi bagian yang sesuai dengan surplus sumber hayati dan zona ekonomi eksklusif negara pantai yang ada dalam subdaerah atau daerah yang sama, dengan memperhatikan keadaan geografi dan ekonomi yang relevan dari semua negara yang bersangkutan;

- 5) Negara tidak berpantai yang maju dan negara yang mempunyai keadaan geografis khusus yang maju, berhak berpartisipasi dalam eksploitasi sumber hayati di zona ekonomi eksklusif negara pantai yang maju yang berada dalam subwilayah atau wilayah yang sama, (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 55,57,58,69,70).

- e. Laut Lepas, adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman.

Pada prinsipnya di laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuatu negara. Laut lepas merupakan *res communis*, yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi dan bebas bagi semua Negara. Beberapa kebebasan itu yakni:

- a. kebebasan berlayar; b. kebebasan penerbangan; c. kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut; d. kebebasan untuk memangun pulau buatan dan instalasi buatan dan instalasi lainnya; e. kebebasan menangkap ikan; f. kebebasan riset.

Penegakan peraturan laut lepas diserahkan pada Negara yang memiliki kebangsaan dari kapal tersebut. Sehingga kapal yang tidak memiliki kebangsaan akan kehilangan haknya. Dengan pengecualian terhadap kejahatan-kejahatan yang tergolong kejahatan bersama seperti pembajakan, perdagangan budak tiap Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan tersebut. (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006:189)

- 2). Pembagian wilayah alaut secara Vertikal, meliputi :

- a. Ruang Udara yang ada diatas laut
- b. Kolom Air Laut (*Water Coloumn*)
- c. Dasar Laut (*Sea Bed*)
- d. Tanah di bawah laut (*Sub Soil*)

tanah yang ada dibawah laut dibagi kembali menjadi :

- i. dasar laut dan tanah dibawahnya dari bagian laut secara horizontal;
- ii. landas kontinen (*Continental Shelf*), adalah dasar laut dan tanah dibawahnya sampai sejauh batas kontinennya (*Continental Margin*) atau sejauh 200 mil laut atau 350 mil laut dari garis pangkal laut territorial.
- iii. area (kawasan), adalah laut dan dasar samudra dalam dan tanah dibawahnya yang ada di luar batas yurisdiksi nasional.

3. Tinjauan Mengenai Landas Kontinen

a. Pengertian Landas Kontinen

Pada awal mulanya landas kontinen hanya mempunyai pengertian geografis dan geologis. Yang dimaksud landas kontinen adalah *plate reforme* atau daerah dasar laut menurun secara tajam, dan dimana mulai daerah dasar laut baru yang disebut sebagai lereng kontinen. Biasanya penurunan dasar laut secara tajam ini terjadi pada kedalaman sekitar 200 meter .

Dalam ensiklopedia amerika disebutkan mengenai pengertian landas kontinen secara geologis yaitu,

“the part of ocean floor that is adjacent to the shores of continens and is covered by water of shalow depth, less than 80-100 fathoms (490-600 feet,or 145-180 meters)”

(bagian dari dasar samudra (lautan) yang bersambung dengan pantai dari suatu benua dan yang ditutup oleh perairan yang dangkal, yaitu kurang dari 80-100 fathoms (490-600 kaki, atau 145-100 meter). (I Wayan Parthiana, 2005:6)

Secara geografis landas kontinen adalah kemiringan yang landai tertutup oleh air yang dangkal yang mengalir dari garis pantai sekumpulan daratan sebelum turun secara tajam ke perairan samudra. (Rebecca M M Wallace, 1985:169)

Kemudian ditegaskan lagi dengan pernyataan sebagai berikut;

“on all ocean floors three distinct kind of relief features are found: the continental shelf, which is a shallow gently shelving section adjacent to the shore; the continental slope, which is relatively steep slope the outer edge of the shallow section; and the so called abyssal floor or oceanic plain, where water depths exceed 1.000 fathoms (6.000 feet, or 1.800 meters)”.

(pada dasar samudra (lautan) tersebut, terdapat tiga jenis wujud lekukan, yaitu: landas kontinen, yang merupakan dasar laut dangkal, yang merupakan bagian yang membentang yang bersambungan dengan pantai; kaki kontinen yang merupakan kaki yang relatif curam sepanjang tepi luar dari bagian yang dangkal; dan yang ketiga adalah apa yang disebut samudra yang datar yang kedalamannya melebihi dari 1000 fathoms (6000 kaki, atau 1800 meter).

Dalam ilmu bahasa landas kontinen dapat diartikan sebagai landas benua, oleh karena kata kontinen jika dialih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia sama dengan benua atau kontinen, sehingga dari segi geologi dapat dikatakan hanya benua saja yang memiliki landas kontinen, sedangkan pulau atau gugusan pulau, tidak memiliki landas kontinen.

Dalam perkembangannya istilah landas kontinen diadopsi menjadi istilah bidang hukum yaitu “landas kontinen”, dalam pengertian yuridis pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Harry S Truman (1945-1953) dalam suatu proklamasi, yang disebut sebagai Proklamasi Truman pada tanggal 28 September 1945, diktum proklamasi tersebut menegaskan sebagai berikut:

“Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, the government of the United State regard the natural resources of the seabed and the subsoil of the continental shelf beneat the high seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control. In cases where the continental shelf extend to the shores of another state, or is shared with an

adjacent State, the boundary shall be determined by the United State and the State concerned in accordance with equitable principles. The character as high seas of the waters above the continental shelf and the right to their free and unimpeded navigation are in no way thus affected”.

(Dengan mempertimbangkan urgensi dari pencadangan dan pemanfaatan yang layak atas sumber-sumber daya alamnya, Pemerintah Amerika Serikat memandang sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalam dasar laut dan tanah dibawahnya dari landas kontinen yang berada dibawah laut lepas tetapi yang merupakan kelanjutan dari pantai Amerika Serikat, sebagai kepunyaan Amerika Serikat, dan dengan demikian tunduk pada yurisdiksi dan pengawasan Amerika Serikat. Dalam hal landas kontinen itu meluas hingga sampai pada pantai negara-negara lain, atau harus dibagi bersama dengan negara yang dihadapannya maka garis batasnya akan ditentukan oleh Amerika Serikat dan negara yang bersangkutan, sesuai dengan prinsip jarak sama. Hakekat dari perairan di atas landas kontinen itu sebagai perairan laut lepas disertai dengan hak atas kebebasan pelayaran yang tidak boleh dihalang-halangi, tidak akan dipengaruhi). (I Wayan Parthiana, 2005:6-9)

b. Status Yuridis Landas Kontinen

Status yuridis landas kontinen, pada dasarnya tergantung pada letak dan keberadaan landas kontinen. Jika berada di luar laut teritorial atau tepatnya dibawah zona ekonomi eksklusif/atau laut lepas, maka landas kontinen bukanlah bagian wilayah negara pantai. Regime landas kontinen adalah mulai dari batas luar laut wilayah sampai batas luar tepian kontinen, berlaku hak berdaulat yang bersifat khusus (eksklusif) untuk dasar laut dan tanah di bawahnya, tidak termasuk kolom air dan ruang udara di atasnya. (Syahmin A K, 1988:111). Landas kontinen dipandang sebagai perpanjangan secara alamiah (*natural prologation*) dan daratan atau kekanjutan (*continuity*) dari daratan bukan karena landas kontinen itu berdekatan dengan daratan, sehingga sebagai area yang bukan wilayah negara pantai maka landas kontinen tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai, atau dengan kata lain negara pantai tidak memiliki kedaulatan atas landas kontinen, melainkan hanya memiliki hak-hak tertentu yang sifatnya terbatas.

Hak-hak dan yurisdiksi negara pantai pada landas kontinen, adalah sebagai berikut:

- 1). Hak berdaulat untuk mengeksplorasi landas kontinen dan mengeksploitasi sumber daya alamnya;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, hak berdaulat dari negara pantai atas landas kontinen adalah untuk maksud mengeksploitasi landas kontinen yaitu sumber daya alam (*natural resources*) yang terkandung didalamnya.

Dalam Pasal 77 ayat 2 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, hak berdaulat adalah hak eksklusif yang diberikan kepada negara pantai itu sendiri, jika negara pantai tidak menggunakan haknya maka siapapun tidak dapat melakukan kegiatan tanpa izin negara pantai.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 77 ayat 3, bahwa landas kontinen bersifat *ipso facto* dan *ab initio*, maksudnya adalah hak berdaulat sudah ada dengan sendirinya sejak berdirinya negara, tanpa harus didahului dengan tindakan pendudukan (*accupation*) ataupun pernyataan atau proklamasi yang menunjukkan maksud untuk menguasai. Jika sebelumnya telah ada suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menguasai, maka tindakan tersebut hanyalah pernyataan yang bersifat deklaratif semata yang tentunya tidak menimbulkan konsekuensi hukum apapun.

- 2). Hak untuk memasang kabel-kabel dan pipa saluran;

Menjadi yurisdiksi negara pantai atas kabel dan pipa yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, pengoprasian pulau buatan (*artificial island*), dan instalasi lainnya yang dipasang pada landas kontinen (Pasal 79 ayat 4 Konvensi Hukum Laut PBB 1982). Negara pantai tidak memiliki hak yurisdiksi untuk mengatur atau menghalang-halangi pemasangan kabel atau pipa saluran pada landas kontinennya tanpa memasuki laut teritorial negara pantai.

3). Hak yang berhubungan dengan pencemaran atau polusi;

Secara implisit hak negara pantai pada landas kontinen yaitu, hak untuk mengatur pencegahan, pengurangan, dan pengawasan atas polusi yang bersumber dari kabel-kabel dan pipa saluran tersebut, memasuki wilayah teritorial negara pantai atau tidak, atau hanya melalui landas kontinen saja. Hal ini dihubungkan dengan adanya aktifitas eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen, namun disisi lain negara pantai juga tidak boleh menghalang-halangi aktifitas tersebut. (Pasal 79 ayat 2 Konvensi Hukum Laut PBB 1982)

4). Hak membangun pulau buatan, instalasi-instalasi dan struktur-struktur pada atau di atas landas kontinen;

Menurut ketentuan Pasal 60 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, menyatakan bahwa untuk membangun pulau buatan, instalasi-instalasi, dan struktur yang terkait erat dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dari landas kontinen itu sendiri. Ketentuan Pasal 60 konvensi ini berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan Pasal 80 konvensi, dimana pembangunan instalasi tidak hanya berlaku pada kawasan landas kontinen pada zona ekonomi eksklusif, namun juga landas kontinen laut lepas berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang landas kontinen.

5). Hak memberikan wewenang melakukan pengeboran pada landas kontinen;

Ditegaskan dalam ketentuan pasal 81, negara pantai memiliki hak eksklusif (*exclusive right*) untuk memberikan wewenang pengeboran pada landas kontinennya untuk berbagai keperluan, selain itu juga ada hak negara pantai untuk melakukan pengeboran dalam rangka mengeksplorasi dan mengeksploitasi melalui terowongan (*tunnelling*). Hak melakukan pengeboran harus didahului dengan pengakuan oleh negara pantai atas segala aktifitas pengeboran dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi yang berlangsung pada landas kontinen tersebut seperti yang ditegaskan didalam ketentuan Pasal 85 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

6). Hak untuk menetapkan zona keselamatan (*safety zone*) ;

Dalam ketentuan Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 Pasal 5 ayat 2 dan 3, ditegaskan bahwa negara pantai berhak menetapkan zona keselamatan (*safety zone*) sejauh radius 500 meter disekeliling pulau buatan, instalasi, dan struktur yang telah dibangun. Dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Pasal 60 ayat 4,5, dan 6 mengenai hak negara untuk menetapkan zona keselamatan, berkenaan dengan hak negara pantai pada zona ekonomi eksklusifnya. Keterkaitan tersebut menyebabkan penentuan zona keselamatan meliputi permukaan perairan laut di sekitarnya dan perairan laut di bawah permukaannya hingga sampai pada landas kontinen itu sendiri.

7). Yurisdiksi eksklusif negara pantai.

Adanya hak dan kewajiban negara pantai pada landas kontinen, dan terhadap segala kegiatan yang berlangsung di atasnya, sehingga negara pantai memiliki *yurisdiksi eksklusif* atas obyek yang ada di atasnya, dimana yurisdiksi tersebut meliputi,

- a. yurisdiksi untuk membuat peraturan perundang-undangan (yusdiksi legislatif), yang terkait dengan obyek tersebut, misalnya mengenai ketentuan pemeliharaan, perbaikan, penambahan, ataupun pembatasan berdasarkan kepentingan negara pantai atau negara/pihak lain yang terkait dengan obyek tersebut.
- b. yurisdiksi untuk pemberlakuan dan menerapkan peraturan perundang-undangan (yurisdiksi eksekutif), misalnya mengenai penerapan peraturan hukum pidana terhadap peristiwa pidana yang terjadi di dalam atau di atas obyek tersebut, selain itu dapat pula menerapkan peraturan hukum perdata atas masalah-masalah perdata yang terjadi, atau terkait masalah lingkungan hidup.
- c. yurisdiksi untuk mengadili (yurisdiksi yudikatif), peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada obyek tersebut.

Selain terdapat hak, adapun negara pantai juga memiliki kewajiban yaitu:

- 1) Kewajiban untuk menghormati hak-hak negara lain sebagaimana dijamin oleh konvensi, seperti hak negara atau pihak lain untuk memasang kabel-kabel atau pipa-pipa saluran. Negara pantai tidak boleh menghalang-halangi pemasangan atau pemeliharaan kabel-kabel dan pipa pada landas kontinen;
- 2) Menghormati kaidah hukum laut internasional yang berlaku pada landas kontinen tersebut, misalnya kewajiban untuk menghormati pelayaran selat yang biasa digunakan pada pelayaran internasional;
- 3) Negara pantai menghormati kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara ataupun pihak lain pada landas kontinen berdasarkan ijin dan persetujuannya;
- 4) Negara pantai berkewajiban membayar sejumlah pembayaran atau sumbangan kepada International Sea Bed Authority atas eksploitasi yang dilakukan pada landas kontinen diluar 200 mil laut seperti dalam ketentuan Pasal 82 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

c. Cara Penentuan Garis Batas Landas Kontinen

Batas Landas Kontinen (BLK), adalah landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Garis batas luar kondisi kontinen pada dasar laut, tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (*isobath*) 2500 m, kecuali untuk elevasi dasar laut yang merupakan bagian alamiah tepian kontinen, seperti pelataran (*plateau*), tanjakan (*rise*), puncak (*caps*), ketinggian yang datar (*banks*) dan puncak gunung yang bulat (*spurs*).
<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=buku+utama+rencana+induk+perbatasan+negara&meta>).

Mengenai persoalan garis batas landas kontinen baik antara dua negara atau lebih yang saling berdekatan, memang bukanlah suatu hal yang mudah, karena dipengaruhi keadaan geografis, geologi dari dasar laut, topografi negara pantai, dan faktor lainnya yang mempersulit penentuan batas landas kontinennya, oleh karena itu perlu adanya suatu aturan tegas dan tata cara penentuannya, yaitu sebagai berikut:

(1). Berdasarkan ketentuan konvensi tentang landas kontinen 1958.

Dalam ketentuan konvensi 1958 disimpulkan ada empat cara menentukan batas landas kontinen yaitu;

- a) dengan membuat perjanjian atau persetujuan dengan pihak yang berkepentingan. Cara seperti ini dapat dilakukan oleh negara-negara yang letak geografisnya berhadapan (*opposite*), atau negara yang letak geografinya saling bersebelahan atau berdampingan (*adjacent*). Cara seperti ini cukup ideal karena melalui proses perjanjian atau persetujuan tentang garis batas landas kontinen antara negara yang berkepentingan, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan.
- b) menerapkan metode garis tengah (*median line*), yang merupakan suatu garis yang setiap titik pada garis tengah mempunyai jarak yang sama dari titik-titik terdekat dari garis pangkal tempat lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Metode seperti ini dapat diterapkan pada negara-negara yang kondisi geografinya saling berhadapan (*opposite*).
- c) menerapkan metode jarak yang sama (*equidistance principle*) dari titik terdekat dari garis pangkal tempat mengukur lebar laut teritorial dari masing-masing pihak, yang nantinya akan menghasilkan suatu garis yang mempunyai jarak yang sama dari titik terdekat garis pangkal tempat mengukur lebar laut teritorial masing-masing pihak. Penerapan cara ini dapat dilakukan oleh negara yang secara geografi berdampingan (*adjacent*).
- d) penentuan garis batas landas kontinen dengan cara lain yang dibenarkan berdasarkan keadaan-keadaan khusus (*special*

circumstance). Namun konvensi tidak dijelaskan mengenai keadaan-keadaan khusus tersebut.

(2). Dalam ketentuan konvensi 1982, penetapan batas landas kontinen dalam rumusan pasal 83 untuk menentukan delimitasi landas kontinen dilakukan dengan dua pendekatan pokok yaitu:

- a) Prinsip *equidistance/median line special circumstance*, adalah merupakan prinsip penentuan batas landas kontinen dengan metode garis tengah sebagai prinsip umum dan akan melakukan penyesuaian garis tengah tersebut berdasarkan situasi khusus tertentu.
- b) Prinsip *equitable*, adalah prinsip yang menyatakan bahwa garis batas dinilai adil oleh kedua belah pihak.

Namun kedua prinsip ini masih menjadi perdebatan, sehingga terdapat rumusan sederhana yang menyatakan bahwa,

“...shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the international court of justice, in order to achive an equitable solution...”

Pada dasarnya Mahkamah Internasional, sejak tanggal 20 Februari 1969, menolak prinsip *equidistance* dan hanya mengakui prinsip yang didasarkan pada keadilan seperti pernyataan Truman, dalam keadaan khusus landas kontinen akan dibagi-bagi, dengan demikian Mahkamah Internasional memberikan suatu petunjuk dalam upaya penentuan batas-batas landas kontinen yang meliputi ketentuan:

- a) dalam penentuan batas landas kontinen, seharusnya negara yang bersangkutan memperoleh keseluruhan landas kontinennya, yang merupakan kelanjutan natural dari dasar laut wilayahnya untuk menghindarkan agar landas kontinen tidak mengambil daerah-daerah laut pihak-pihak lain.
- b) bila penentuan pembatasan landas kontinen menyebabkan adanya bagian-bagian dasr laut yang dituntut bersama, dasar-dasar laut tersebut harus dibagi-bagi sama rata bagi negara-negara yang bersangkutan, kecuali negara-negara tersebut menerima suatu rezim

yurisdiksi penggunaan dan eksploitasi bersama dari sebagian atau keseluruhan daerah-daerah dasar laut yang sama-sama dituntut tersebut.

- c) Makamah juga mengingatkan supaya diperhatikan semua keadaan-keadaan khusus yang disebut oleh konvensi 1958. Yang dimaksud dengan keadaan khusus menurut Makamah Internasional adalah:
 - i. Konfigurasi umum dari pantai dengan segala ciri-ciri khususnya atau ciri-ciri luar biasa yang ada.
 - ii. Kesatuan sumber alam yang menunjukkan struktur fisik dan geologi dari daerah landas kontinen yang akan dibagi.
 - iii. Hubungan yang wajar antara luasnya landas kontinen yang berada di bawah kedaulatan negara pantai dan panjangnya pantai negara tersebut diukur menurut jurusan umum pantai.

Namun dalam keadaan khusus tersebut juga harus memperhatikan prinsip keadilan (*equity*) setinggi mungkin. (Boer Mauna, 2005:355-356)

4. Tinjauan Tentang Gosong Niger

Gosong Niger, adalah nama sebuah tempat dimana belum banyak orang yang mengenal. Gosong dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai timbunan pasir di muara sungai atau tepi laut. Sedangkan dalam istilah Bahasa Inggris disebut sebagai *Banks* atau *sand bar*, merupakan penyebutan dari tumpukan pasir. Gosong merupakan salah satu penyebutan dari suatu fenomena alamiah, yang mana nama dari Gosong yang dimaksud adalah Niger, sehingga disebut sebagai Gosong Niger. Kondisi fisik Gosong Niger, jika dipantau dari udara akan terlihat berwarna hitam, namun jika dilihat lebih dekat maka hanya berupa gundukan pasir yang terendam air sedalam 4-12 meter. Penduduk setempat lebih mengenal Gosong Niger dengan sebutan Pematang Naga atau disebut juga Beting Kepala Tanjung, luasnya \pm 50 hektar memanjang dari barat ke timur. (Pontianak Post, 26 Januari 2006:7). Letaknya sekitar 100 meter atau 5,5 mil dari ujung sebelah utara semenanjung wilayah administratif Dusun Tanjung Datuk, di desa Temajuk, Kecamatan Paloh Kalimantan Barat. (<http://bappeda.kalbar.go.id/?pilih=lihat&id=92>)

Dengan sebutan Gosong, maka Gosong Niger bukanlah merupakan pulau, menurut UNCLOS 1982 Pasal 121 Ayat 1 yang dimaksud dengan pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada saat air pasang, sedangkan PP Nomor 78 tahun 2005 menyebutkan bahwa, yang disebut sebagai Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km², memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal pulau sesuai hukum internasional dan nasional, namun luas Gosong Niger hanya berkisar 50 km². Definisi pulau kecil terluar jika dihubungkan dengan definisi konvensi maka dapat ditarik konklusi bahwa pulau tersebut berada pada bagian terluar dengan kata lain adalah pulau terdepan dari wilayah suatu negara yang berhubungan langsung atau berbatasan langsung dengan suatu negara. Gosong Niger walaupun berada pada bagian terdepan dari wilayah Indonesia, tidak dapat dikategorikan sebagai pulau seperti yang dimaksud oleh konvensi, namun eksistensi Gosong Niger juga tidak dapat dipandang sebelah mata.

Ketentuan yang mengatur mengenai keberadaan Gosong Niger berdasarkan pada Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tahun 1969, dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1969, kemudian diratifikasi dengan Keppres Nomor 89 Tahun 1969, khususnya titik koordinat timur (LCS 21-25). Namun dalam ketentuan ini tidak secara spesifik menyebutkan titik-titik yang dimaksud untuk menentukan batas landas kontinen antara kedua negara, sehingga menimbulkan implikasi terhadap Gosong Niger, yang hampir tidak dijumpai gambaran Gosong Niger di dalam peta. Terkait mengenai keselamatan navigasi dan pelayaran, keberadaan Gosong Niger, tentunya perlu diperhitungkan juga, mengingat kondisi fisiknya. Keberadaan Gosong Niger berdasarkan ketentuan Persetujuan 1969, garis batas (dasar) membelah kawasan perairan Indonesia dan Perairan Malaysia, sebagai negara berdampingan (*adjacent states*), di mana 2/3 bagian Gosong Niger berada di Indonesia dan selebihnya Malaysia.

Gambar 1 : Gosong
Kalimantan

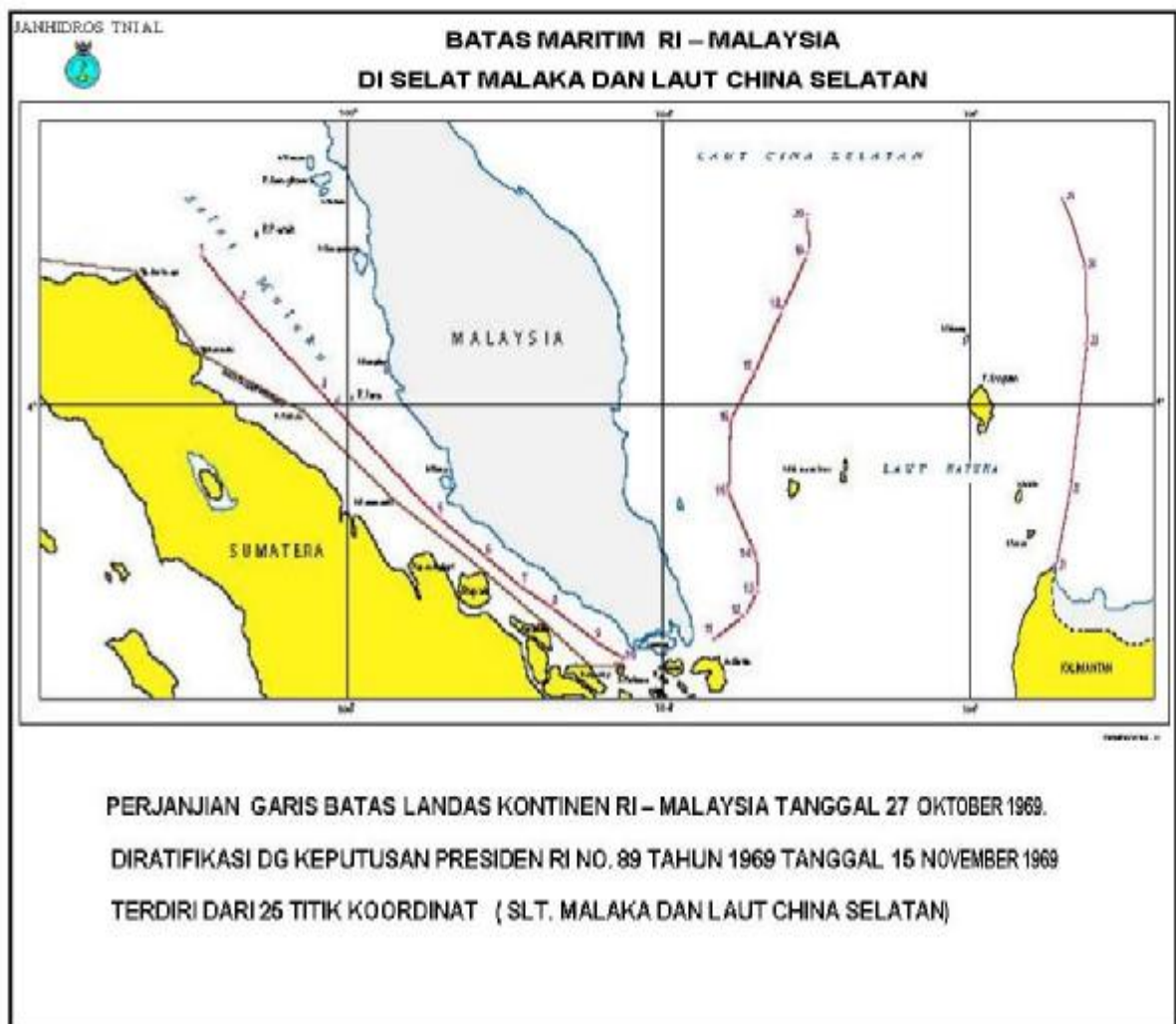


Niger di

Berdasarkan Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia tanggal 27 Oktober 1969, Diratifikasi Dalam Keppres No 89 1969 pada Tanggal 15 November 1969 disetujui 25 titik Koordinat, yaitu :

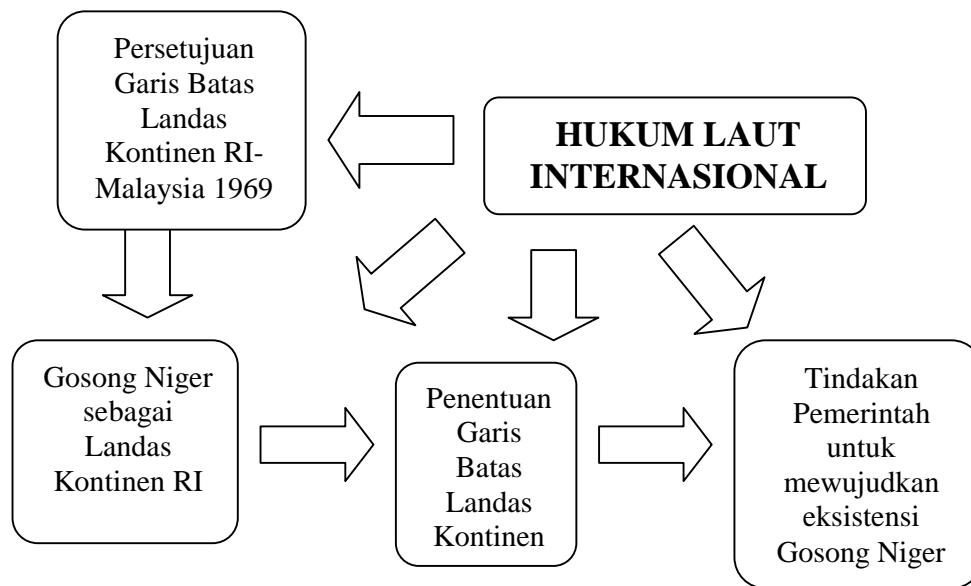
- a. Selat Malaka (1-10)
- b. LCS Bagian Barat (11-20)
- c. LCS Timur (21-25)

Gambar 2 : Garis Batas Landas Kontinen RI-Malaysia



(Rusdi Ridwan, Batas-batas Maritim NKRI dengan Negara Teangga 2006)

B. Kerangka Pemikiran



Bagan 1 : Skema Kerangka Pemikiran

Awal mulanya Indonesia dan Malaysia telah membuat suatu Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen pada tahun 1969, namun dari persetujuan tersebut kurang tegas dan spesifik dalam menyebutkan titik-titik terluar yang dijadikan patokan batas, sehingga klaim laut antara kedua negara menjadi tumpang tindih (*overlapping claim*). Gosong Niger sebagai salah satu wilayah yang merupakan kelanjutan dari daratan Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara yang berdampingan (*adjacent state*), dimana garis batas landas kontinen diatur berdasarkan persetujuan tersebut. Penentuan garis batas landas kontinen antara negara yang berdampingan tentunya harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar kedua negara berlandaskan ketentuan hukum laut internasional. Secara sepihak pemerintah Indonesia dapat mengupayakan dengan melakukan beberapa tindakan yang merupakan langkah-langkah untuk tetap mewujudkan eksistensi Gosong Niger sebagai bagian landas kontinen Indonesia, disamping keharusan untuk tetap mempertahankan dan membina hubungan baik dengan negara tetangga Malaysia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Gosong Niger Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional.

1. Gosong Niger Sebagai Ladas Kontinen

Bercermin pada sejarah perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam bidang kemaritiman, saat semangat bahari begitu bergelora pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang mampu menyatukan wilayah nusantara dari satu nusa ke nusa yang lain dalam satu negeri. Menjadi sebuah renungan dan tantangan bagi bangsa Indonesia saat ini untuk tetap mempertahankan dan melestarikan tradisi bahari, sebagai tindak lanjut setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia. Setelah di proklamirkan kemerdekaan Indonesia, secara Konstitutif Negara Indonesia belum lahir, mengingat akan adanya unsur-unsur terbentuknya suatu negara harus memenuhi unsur Konstitutif dan Deklaratif. Unsur Konstitutif suatu negara harus memiliki Wilayah, Penduduk, dan Pemerintah yang berdaulat, sedangkan unsur Deklaratif adalah dimana suatu negara dapat melakukan hubungan dengan negara lain. Dalam ketentuan Hukum Internasional dikenal adanya pengakuan (*recognition*), dengan adanya unsur ini suatu negara dinyatakan eksis jika mendapatkan pengakuan dari negara lain, namun ketentuan ini tidaklah mutlak karena suatu negara tetap dinyatakan eksis selama memenuhi ketentuan unsur Konstitutif terbentuknya suatu negara yang meliputi wilayah, penduduk, dan pemerintah yang berdaulat, walaupun ada negara-negara tertentu yang tidak mengakuinya.

Adanya wilayah sebagai salah satu unsur pendukung berdirinya suatu negara yang menjadi manifestasi terhadap penempatan kekuasaan pemerintah yang berdaulat, dan merupakan tempat dimana penduduk suatu negara bertempat tinggal. Penduduk merupakan kumpulan orang yang menghuni suatu wilayah negara, dan penduduk yang menempati wilayah negara tersebut disebut warga negara yang tunduk dan patuh pada ketentuan hukum negara yang bersangkutan, serta memiliki pengaruh terhadap lingkungan dan peranserta dalam kehidupan bernegara misalnya dalam hal PEMILU (Pemilihan Umum) untuk menunjuk

Pemimpin Negara. Sedangkan pemerintah yang berdaulat memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memimpin, membuat peraturan dalam dan luar negeri hingga menangani urusan hubungan luar negeri dengan negara lain. Ketiga unsur ini adalah unsur pokok yang harus di penuhi untuk pembentukan suatu negara, jika tidak ada salah satunya maka belum dapat disebut sebagai negara, walaupun terdapat pengecualian terhadap PLO (*Palestine Liberation Organization*), adalah organisasi pembebasan atau bangsa yang telah berjuang untuk mendirikan sebuah Negara Palestina Merdeka sejak tahun 1948, dimana selama ini dikuasai Israel. Tanggal 15 November 1988, Dewan Nasional Palestina (*Palestine National Council*) yang berada di pengasingan telah memproklamasikan kemerdekaan Negara Palestina dan telah memperoleh pengakuan dari masyarakat Internasional walaupun wilayahnya belum jelas. Sehingga baru setelah 1996 Palestina menyatakan kemerdekaan penuh dengan hadirnya Raja Husein dari Yordania. (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006:125). Dengan demikian walaupun Palestina tidak memenuhi unsur wilayah, namun hukum internasional telah mengakui PLO (*Palestine Liberation Organization*) sebagai salah satu subyek Hukum Internasional yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Subyek hukum Internasional lainnya. Dengan unsur-unsur tersebut negara diakui sebagai suatu negara, sekaligus menjadi Subyek Hukum Internasional.

Suatu negara yang akan berdiri hendaknya dapat memenuhi unsur-unsur pokok suatu negara. Indonesia merupakan negara yang memperoleh kemerdekaan dengan cara Proklamasi. Kemerdekaan merupakan hal yang perlu dibicarakan terlebih dahulu sebelum membahas persoalan wilayah, sebab sebagaimana dimaklumi wilayah merupakan salah satu sendi eksistensi suatu negara merdeka. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersifat eksistensial, merupakan pernyataan kehendak seluruh rakyat Indonesia untuk merdeka dan mendirikan negara merdeka. (Dimiyati Hartono, 1983:1). Pengertian proklamasi sendiri sama dengan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa suatu negara telah lahir, namun hal ini hanyalah bersifat deklaratif, negara baru secara utuh berdiri jika memiliki kedaulatan.

Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang

dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Internasional. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. (Boer Mauna, 2005:24)

Dalam hukum internasional kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara memiliki tiga aspek utama yaitu:

- a) Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- b) Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- c) Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat diwilayah tersebut. (Boer Mauna, 2005:24)

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 belumlah secara utuh berdiri sebagai negara, namun baru mulai seutuhnya berdiri sebagai negara yang berdaulat adalah pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada tanggal ini merupakan tindak lanjut dari proklamasi kemerdekaan untuk mewujudkan wewenang eksistensial suatu negara yang terkandung kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk negara, sistem pemerintahan, struktur sosial, dan system ekonomi, hingga tujuan dan cara mencapai tujuan nasional. (Dimiyati Hartono, 1983:6). Hal yang terpenting tindak lanjut Proklamasi kemerdekaan RI adalah dihasilkannya 3 (tiga) hal utama yang tercatat dalam sejarah negara Indonesia yaitu, 1). Dibentuknya Badan Konstituante; 2). Disahkan dan diberlakukannya UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara; 3). Diangkatnya Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama RI dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Perjuangan Bangsa Indonesia tidak berhenti sampai

disitu saja, namun harus dapat bangkit untuk memulai pembangunan diberbagai sektor dan mempertahankan keutuhan wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke.

Luas Negara Indonesia seluruhnya mencapai 5.193.252 km², dengan 1.904.569 km² luas daratan dan 3.288.683 km² lautan. Dengan perbandingan antara 25% daratan dan 75% lautan, sudah selayaknya jika Indonesia disebut sebagai negara maritime. Dikukuhkan dengan rangkaian catatan sejarah nenek moyang bangsa Indonesia yang sebagian besar berpenghasilan dari melaut, hal ini dibuktikan dengan napak tilas kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang terkenal dengan kemampuannya mengarungi lautan dan menyatukan nusantara. (Gatra, Januari 2006: 16)

Secara lintang Indonesia berada pada koordinat titik Garis 6° Lintang Utara 11° Lintang Selatan, dan diatara Garis Meredian 95° dan 141° Timur Greenwich. Secara georafis posisi Indonesia sangatlah strategis karena berada tepat pada garis Equator atau disebut juga sebagai garis Khatulistiwa, yang membelah bumi, menjadi dua bagian selatan dan bagian utara. Garis Equator memiliki fungsi sebagai patokan dalam pembagian daerah berdasarkan suhu dan iklim, sehingga membedakan pula potensi alam yang dimiliki oleh tiap-tiap negara.

Dari segi georafis Indonesia, merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang membentang sejumlah 17.504 pulau, yang diuntai sepanjang 80.791 km dari sabang sampai merauke. Dengan kondisi yang demikian merupakan suatu anugrah yang tak ternilai jika dibandingkan dengan berbagai negara kepulauan diseluruh dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar ke dua setelah negara Kanada. (<http://bappeda.kalbar.go.id/?pilih=lihat&id=92>). Dilain pihak luas kepulauan Indonesia menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan keutuhan wilayahnya, walaupun dalam kenyataan tak dapat disangkal lagi Indonesia sering kali kecolongan. Lepasnya pulau simpadan dan ligitan pada tahun 2002 yang diklaim oleh negara jiran Malaysia, berdasarkan keputusan Makamah Internasional dengan pertimbangan terhadap asas *effective accupatio* tentunya menjadi salah satu bukti yang mengukuhkan bahwa pembangunan yang diselenggarakan di Indonesia belum merata ke pelosok

wilayah-wilayah terpencil seperti halnya pulau-pulau yang berada pada garis perbatasan.

Perbatasan laut negara (*maritime delimitation*) dan pulau-pulau terluar, merupakan manifestasi utama terhadap teritorial wilayah dengan peran penting yang mencakup batas yurisdiksi dan kedaulatan; pemanfaatan sumber daya (alam dan buatan); kepastian hukum bagi penyelenggaraan pembangunan; serta unsur keamanan dan keutuhan nasional. (<http://bappeda.kalbar.go.id/?pilih=lihat&id=92>). Kurangnya perhatian terhadap wilayah terluar atau perbatasan, dapat mempengaruhi pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar yang berada di titik perbatasan antara negara. Setelah lepasnya Simpadan ligitan, tahun 2005 kembali muncul adanya ancaman serupa terhadap keutuhan wilayah Indonesia, yaitu Blok Ambalat yang berada di wilayah Indonesia, tepatnya di Propinsi Kalimantan Timur.

Sejarah hukum laut di Indonesia, dilatar belakangi oleh zaman penjajahan Belanda, sehingga hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Hindia Belanda. Dalam penentuan wilayah perairan harus didahului dengan penentuan titik-titik terluar dari kepulauan, sebagai dasar untuk menentukan lebar laut teritorial. Berdasarkan ketentuan TZMKO (*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* tahun 1939), dalam pasal 1 ayat 1 a.l. menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah (*laagwaterlijn*) dari pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian daratan (*grondgebied*) dari Indonesia...” namun ketentuan ini tidak sesuai lagi, dengan pertimbangan bahwa suatu negara yang berdaulat dalam perairan teritorialnya berhak melakukan tindakan-tindakan seperlunya untuk menjamin 1). Pertahanan keselamatan negara terhadap gangguan dari luar, 2). Pengawasan terhadap kelur masuknya orang asing (imigrasi), 3) penyelenggaraan aturan fiscal (bea dan cukai), 4). Perikanan, 5). Kepentingan perikanan, 6). Pertambangan dan hasil-hasil lainnya, dengan pertimbangan tersebut maka ketentuan yang ditetapkan oleh TZMKO mengenai wilayah teritorial, tidak cukup menjamin keutuhan dan kepentingan rakyat dan negara Indonesia sebagai Negara kesatuan. (Mochtar Kusumaatmadja, 1978:3).

Diawali dengan lahirnya konsepsi negara nusantara yang dikenal juga sebagai konsep wawasan nusantara, pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu Deklarasi yang berbunyi sebagai berikut:

“bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari pada Negara Republik Indonesia.

Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang”.
(Mochtar Kusumaatmadja, 1978: 25-26)

Perkembangan sejarah kemaritiman Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan yaitu:

- a) Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak yang memerlukan pengaturan tersendiri;
- b) Bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat;
- c) Bahwa penetapan batas-batas laut territorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam “*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939*” pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia;

- d) Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya. (Mochtar Kusumaatmadja, 1978:26)

Perjuangan memperoleh pengakuan konsep Wawasan Nusantara, yang mengatur semua laut dan kekayaan antara satu pulau dan pulau lainnya memakan waktu 25 tahun. Namun tidak semua negara mengakuinya. (Gatra, Januari 2006:19)

Untuk memperoleh pengakuan mengenai peraturan tentang konsep archipelago ditempuh dengan perjuangan melalui suatu forum internasional. Pada tanggal 29 April 1958 diselenggarakan suatu Konferensi PBB I tentang Hukum Laut di Jenewa yang dihadiri 86 negara, dimana perundingan tersebut dilakukan selama 2 bulan dan berhasil mencetuskan 4 konvensi yaitu:

1. *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan), mulai berlaku 10 September 1964.
2. *Convention on the High Seas* (Konvensi mengenai Laut Lepas), mulai berlaku 30 September 1962.
3. *Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of the High Seas* (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966.
4. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi mengenai Landas Kontinen), mulai berlaku 10 Juli 1964. (Boer Mauna, 2005:308)

Konferensi tahun 1958 ini tidak berhasil menentukan lebar laut wilayah, namun pada tahun 1960 diselenggarakan kembali Konferensi PBB II tentang Hukum Laut (UNCLOS II) dengan konvensi ini diharapkan dapat memberikan harapan bagi negara-negara kepulauan. Persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah mengundang ketentuan perairan Indonesia, dengan Undang-undang No.4/Prp tahun 1960. UNCLOS II membahas secara khusus mengenai penentuan lebar laut wilayah akan tetapi juga gagal karena tidak ditemukan kesepakatan antara kepentingan negara pantai dan negara maritime. Konferensi Hukum Laut III, yang diterima pada tanggal 30 April 1982 dalam sidang yang ke-11 di New York ditandatangani 10 Desember 1982, merupakan karya fenomenal

yang terbesar dalam sejarah hukum laut, konferensi ini merupakan titik kulminasi dari perundingan antar negara yang dimulai sejak sebelum tahun 1973. Dengan adanya UNCLOS III mulai ada kesepakatan secara internasional mengenai pengaturan tentang hukum laut, yang berlaku hingga saat ini dan merupakan penyempurna dari ketentuan hukum laut yang pernah ada. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985, sehingga ketentuan tersebut sepenuhnya berlaku mengikat bagi pengaturan hukum laut di Indonesia.

Dalam ketentuan UNCLOS 1982 wilayah laut dibagi menjadi beberapa bagian secara vertikal dan horisontal yaitu:

1. Pembagian wilayah laut secara Horisontal, meliputi :
 - a. Laut Pedalaman, yakni perairan yang berada pada sisi dalam garis pangkal. Perairan pedalaman terdiri atas : pelabuhan, muara, sungai, terusan, dan teluk. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas perairan pedalaman karena diakui sebagai bagian wilayah integral negara pantai.
 - b. Laut Teritorial, adalah jalur laut yang ada di sisi luar atau di laut garis pangkal selebar tidak lebih dari 12 mil laut. Dimana menjadi hak tiap-tiap negara untuk menentukan lebar laut teritorialnya sampai batas tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Batas terluar laut teritorial ialah garis yang setiap titik-titiknya ada suatu jarak yang terdekat dengan titik-titik garis pangkal sejauh lebar laut teritorial yang telah ditentukan.

Mengenai kedaulatan negara pantai meluas sampai diluar wilayah daratannya, perairan pedalamannya dan dalam hal negara kepulauan, di luar perairan kepulauannya, yakni sampai pada laut teritorial dan tanah dibawah laut teritorial, selain itu kedaulatan yang dimiliki meluas sampai pada ruang udara, dasar laut teritorial dan tanah di bawah laut teritorial, dimana kedaulatan negara pantai atas laut teritorial tunduk pada ketentuan hukum internasional. Meskipun laut teritorial tunduk pada kedaulatan negara pantai, namun terdapat hak lintas damai bagi kapal negara semua negara berpantai ataupun tidak berpantai untuk melalui perairan teritorial negara pantai. Kapal yang melintas dengan hak lintas damai (*Innocent Passage*) harus memenuhi persyaratan hak lintas damai dengan menunjukkan identitas negara bendera, untuk kapal selam selama menggunakan

hak lintas damai harus berlayar di permukaan air dan menunjukkan identitas negaranya berupa bendera.

Negara pantai memiliki hak untuk membuat peraturan hukum di wilayah laut teritorialnya berdasarkan ketentuan hukum internasional, dimana dapat berupa peraturan yang meliputi ketentuan:

- (1) Ketentuan mengenai hak lintas damai melalui laut teritorial, selain hak tersebut jika dengan alasan keselamatan navigasi dapat mensyaratkan hak lintas damai bagi kapal asing yang melalui laut teritorialnya;
- (2) Ketentuan menggunakan alur laut dan jalur terpisah sebagaimana disediakan, ditujukan atau diwajibkan bagi peraturan lintas kapal;
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan bagi negara pantai, untuk mencegah hal-hal yang terkait dengan hak lintas yang tidak untuk maksud damai;
- (4) Negara pantai berhak tanpa diskriminasi menahan wilayah yang ditentukan pada laut teritorialnya lintas damai kapal asing apabila penahanan tersebut terkait dengan esensi bagi perlindungan keamanan wilayahnya.

Disamping memiliki hak terhadap wilayah teritorialnya, negara pantai juga memiliki kewajiban yang patut dipatuhi yaitu:

- (1) Tidak menghambat hak lintas damai kapal asing yang melalui laut teritorialnya;
- (2) Mengumumkan dengan tepat bahaya apapun bagi navigasi yang ia ketahui di laut teritorialnya.

c. Zona Tambahan, adalah jalur yang merupakan kelanjutan dari laut territorial yang lebarnya tidak melebihi jarak 24 mil laut dari garis pangkal yang bersangkutan. Dalam wilayah zona tambahan negara pantai mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terkait dengan hal:

- (1) Pencegahan terhadap pelanggaran hukum dan perundang-undangan bea cukai, pajak, imigrasi, atau kesehatan di wilayah atau di laut teritorialnya;

(2) Menghukum pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan tersebut yang dilakukan di wilayah hukumnya atau di laut teritorialnya.

- d. Zona Ekonomi Eksklusif, adalah jalur laut yang terletak di luar dan berdekatan dengan laut territorial selebar 200 mil laut dari garis pangkal laut territorial.

Pada zona ekonomi eksklusif, negara pantai memiliki:

- (1) Hak berdaulat (*Sovereign Right*) untuk tujuan eksploitasi dan eksplorasi, pelestarian dan pengelolaan sumberdaya alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan air yang berdekatan diatasnya dan hak berdaulat dalam berbagai aktifitas lain untuk ekplorasi dan eksploitasi ekonomi dari zona ekonomi eksklusif, seperti produk energi dari air laut dan angin;
- (2) Yurisdiksi sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan yang relevan mengenai:
 - a) pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya;
 - b) penelitian ilmiah laut;
 - c) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam hal ini bahwa negara pantai juga mempunyai hak eksklusif atau yurisdiksi eksklusif atas hal tersebut dalam butir 1 dan 2.

Disamping terdapat hak bagi negara pantai, tapi juga terdapat kewajiban untuk menentukan berbagai sarana untuk melestarikan sumber hayati dalam zona ekonomi eksklusif, sehingga bagi negara lain pun di berikan hak dan dibebani kewajiban dalam lingkup zona ekonomi eksklusif yang meliputi:

- (1) Semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai, menikmati kebebasan berlayar, terbang diatasnya, menempatkan kabel dasar laut dan pipa saluran dan penggunaan laut lain yang secara internasional adalah sah sehubungan dengan kebebasan tersebut;

- (2) Dalam melaksanakan hak dan kewajiban di zona ekonomi eksklusif, negara harus memperhatikan seperlunya hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati hukum dan perundang-undangan negara pantai dan ketentuan hukum internasional lain;
 - (3) Semua negara harus melestarikan zona ekonomi eksklusif untuk tujuan damai;
 - (4) Negara tidak berpantai dan negara yang mempunyai keadaan geografis khusus, mempunyai hak atas dasar keadilan, untuk berpartisipasi dalam eksploitasi bagian yang sesuai dengan surplus sumber hayati dan zona ekonomi eksklusif negara pantai yang ada dalam subdaerah atau daerah yang sama, dengan memperhatikan keadaan geografi dan ekonomi yang relevan dari semua negara yang bersangkutan;
 - (5) Negara tidak berpantai yang maju dan negara yang mempunyai keadaan geografis khusus yang maju, berhak berpartisipasi dalam eksploitasi sumber hayati di zona ekonomi eksklusif negara pantai yang maju yang berada dalam subwilayah atau wilayah yang sama, (Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Pasal 55,57,58,69,70).
- e. Laut Lepas, adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman.

Pada prinsipnya di laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuatu Negara. Laut lepas merupakan *res communis*, yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi dan bebas bagi semua Negara. Beberapa kebebasan itu yakni:

- a). kebebasan berlayar; b). kebebasan penerbangan; c). kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut; d). kebebasan untuk memangun pulau buatan dan instalasi buatan dan instalasi lainnya; e). kebebasan menangkap ikan; f). kebebasan riset.

Penegakan peraturan laut lepas diserahkan pada negara yang memiliki kebangsaan dari kapal tersebut. Sehingga kapal yang tidak memiliki kebangsaan akan kehilangan haknya. Dengan pengecualian

terhadap kejahatan-kejahatan yang tergolong kejahatan bersama seperti pembajakan, perdangan budak tiap Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan tersebut.

2. Pembagian wilayah alaut secara Vertikal, meliputi :

- a) Ruang Udara yang ada diatas laut
- b) Kolom Air Laut (*Water Coloumn*)
- c) Dasar Laut (*Sea Bed*)
- d) Tanah di bawah laut (*Sub Soil*)

tanah yang ada dibawah laut dibagi kembali menjadi :

- i) dasar laut dan tanah dibawahnya dari bagian laut secara horizontal;
- ii) landas kontinen (*Continental Shelf*), adalah dasar laut dan tanah dibawahnya sampai sejauh batas kontinennya (*Continental Margin*) atau sejauh 200 mil laut atau 350 mil laut dari garis pangkal laut territorial.
- iii) area (kawasan), adalah laut dan dasar samudra dalam dan tanah dibawahnya yang ada di luar batas yurisdiksi nasional.

Wilayah laut jika dikaji dan diekplor secara vertikal dan horisontal, memang sangatlah luas cakupannya, hingga perlu kiranya diadakan penelitian lebih lanjut. Klasifikasi wilayah laut. Sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 wilayah laut dibagi menjadi beberapa zona yang memberikan hak dan kewajiban yang berbeda-beda, disesuaikan dengan ukuran masing-masing zona yang telah ditetapkan. Secara spesifik dari pembagian laut wilayah, diketahui bahwa bagian laut territorial yang lebih menonjol dalam hal manifestasi yuridis dari suatu negara, dibandingkan dengan bagian laut wilayah yang lainnya, dikarenakan diatas wilayah territorial terdapat hak kedaulatan penuh dari suatu negara (pantai), sehingga mutlak bagi negara pantai untuk menerapkan yurisdiksinya, dan negara lain harus tunduk pada hukum yang ditetapkan oleh negara pantai jika akan melintas diatas wilayah teritorialnya dengan syarat damai, hak lintas ini di sebut juga sebagai hak lintas damai (*innocent passage*). Sedangkan pada wilayah selain wilayah territorial hanya terdapat hak berdaulat, maksudnya adalah negara pantai hanya mempunyai hak-hak tertentu, dikarenakan terdapat hak negara lain pada wilayah tersebut misalnya pada wilayah zona tambahan, sama halnya dengan zona ekonomi eksklusif berlaku juga hak berdaulat, namun

dalam wilayah ini ditekankan pada hak negara lain baru ada jika negara pantai telah melaksanakan haknya diatas wilayah ZEE. Sedangkan pada wilayah laut lepas tidak berlaku yurisdiksi suatu negara, karena laut lepas seperti yang dinyatakan dalam diktum Hugo Grotius tentang *mare liberum* dan doktrin John Seldom tentang *mare clausum*, dimana pada wilayah laut lepas (*high seas*) berlaku doktrin *mare liberum*, hak kebebasan di laut lepas, meskipun terdapat beberapa pembatasan harus diadakan, sedangkan pada wilayah laut teritorial (*teritorial seas*), perairan pedalaman (*internal*) berlaku doktrin *mare clausum*, wilayah laut negara pantai tertutup bagi semua negara, namun masih terdapat beberapa unsur kebebasan yang harus tetap diberikan. (Adi Sumardiman, 1992:58)

Secara vertikal wilayah laut juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ruang udara diatas laut, kolom air laut (*water coloum*), dasar laut (*seabead*), dan meliputi tanah dibawah laut (*sub soil*). Potensi sumberdaya alam (*natural resource*) didalam laut yang merupakan infestasi kekayaan alam bagi suatu negara agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Maka diperlukan adanya tindakan khusus dari pemerintah terhadap pemanfaatan dan pengelolaannya, beserta pengaturan-pengaturannya, hingga dapat menjamin kepastian hukum, dan tetap terpeliharanya hubungan baik dengan negara lain yang bersangkutan dengan penggunaan laut yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) Indonesia, tak luput dari beragam permasalahan kewilayahan, salah satunya mengenai masalah perbatasan. Seperti halnya Pulau Kalimantan termasuk dalam kategori rekor pemilik potensi strategis masalah perbatasan antar negara, walaupun tidak menutup kemungkinan pulau-pulau lain baik besar atau kecil yang tersebar diseluruh Indonesia seringkali menghadapi masalah serupa. Berdasarkan data informasi wilayah perbatasan NKRI Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen dalam negeri RI tahun 2005. Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, di wilayah daratan dengan tiga negara dan wilayah laut dengan 10 negara. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2005 disebutkan, 92 pulau terluar di Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga meliputi Negara Malaysia (22 pulau), Vietnam (dua pulau), Filipina (11 pulau), Singapura (4 pulau), Australia (23 pulau), Timor Leste (10 pulau) dan India (12 pulau). Dengan

demikian tidak mengherankan jika perjanjian-perjanjian mengenai perbatasan negara sering kali dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sebagai upaya untuk menjaga keutuhan wilayah dan memelihara hubungan baik dengan negara lain.

Kalimantan merupakan wilayah Indonesia letaknya sangat strategis ditengah-tengah kawasan Asia tenggara (*south east asia*), yang diapit 2 (dua) jalur pelayaran internasional yaitu laut cina selatan dan laut sulawesi/sulu. Selain itu Kalimantan juga berbatasan langsung dengan negara jiran Malaysia (bagian timur), yaitu Sabah dan Sarawak sepanjang $\pm 1200 \text{ km}^2$, garis perbatasan 70,58% atau sepanjang $\pm 847 \text{ km}^2$ berada di Propinsi Kalimantan Barat, melintasi 5 (lima) daerah Kabupaten yaitu, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sangau, Sintang, dan Kapuas Hulu yang meliputi 14 kecamatan. Sedangkan perbatasan Kalimantan Timur dengan Sabah dan Sarawak $\pm 850 \text{ km}^2$ meliputi 3 (tiga) daerah kabupaten yaitu Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan, yang meliputi 9 kecamatan. (Tim Penyusun Deddy Koespramoedyo dkk, 2003:4)

Wilayah perbatasan Kalimantan memiliki interaksi besar terhadap hubungan dengan negara-negara tetangga baik dalam bidang perdagangan, lintas tenaga kerja, dan hubungan sosial kekerabatan lainnya. Batas negara yang cukup panjang membentang dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur dapat memberikan celah-celah adanya hubungan yang bersifat positif maupun negataif. (Tim Penyusun Deddy Koespramoedyo dkk, 2003:5). Untuk itu hubungan yang bersifat negatif tersebut perlu diwaspadai dan harus segera ditangani oleh pemerintah. Di kawasan perbatasan Kalimantan terdapat beberapa titik tapal batas yang belum disepakati, selain itu penentuan beberapa batas maritime masih belum disepakati antara Indonesia dengan negara tetanga. (Tim Penyusun Achmad Jusnadi dkk, 2004:69)

Arti pentingnya perbatasan, karena menyangkut aspek ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan. Dikutip dari kata pengantar buku Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan yang disusun oleh Deddy Koespramoedyo dkk, dari data yang berasal dari ketentuan Rencana Pembangunan Tahunan (Reperta) yang disusun tiap tahunnya, untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikan perbatasan sebagai halaman depan Negara melalui delimitasi dan demarkasi batas, pengamanan wilayah

perbatasan dan pembangunan sosial ekonomi wilayah sepanjang perbatasan. Untuk merealisasikan pembangunan wilayah perbatasan tahun 2004, terdapat 3 (tiga) kelompok kegiatan yang dilaksanakan yaitu; (1). Kelompok kegiatan penetapan garis batas; (2). Kelompok pengamanan wilayah; (3). Kelompok pengembangan wilayah.

Terkait dengan penetapan garis batas landas kontinen, di salah satu wilayah Indonesia di Propinsi Kalimantan Barat, yang letaknya ± 100 meter di ujung utara Tanjung Datuk Desa Temajuk Kecamatan Paloh, yaitu Pulau Gosong Niger yang sering kali menjadi pemberitaan media pada awal 2006. Dari pemberitaan yang beredar dimana berdasarkan plotting Peta Laut Indonesia No. 420, di duga ada kapal nelayan Indonesia yang melanggar garis batas $\pm 0,7$ mil, pada koordinat 2,172804 LU dan 109,677187 BT yang tentunya melampaui batas wilayah Indonesia, hingga memasuki wilayah Malaysia.

Tentang Pulau Gosong Niger juru bicara Deplu RI Yuri O Tamrin menjelaskan, dimana memang sangat diperlukan adanya kajian lebih mendalam mengenai eksistensi Gosong Niger sebagai bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Gosong Niger merupakan wilayah yang sedikit terpengaruh ketentuan garis batas negara pada wilayah daratan antara Indonesia dan Malaysia di ujung Tanjung Datu, dimana telah disepakati oleh kedua negara pada tahun 1976 yang mengacu pada perjanjian Batas Darat Hindia Belanda-Inggris tahun 1891. Sehingga ketentuan Hindia Belanda yang menjadi dasar hukum penetapan batas darat Indonesia dan Malaysia, namun dalam ketentuan tersebut belum diatur pembagian, penetapan, ataupun delimitasi wilayah lautnya. (http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=829,2006)

Gosong Niger berada diantara wilayah Indonesia-Malaysia, yang merupakan *adjacent state* (negara yang berdampingan), sehingga untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum di Gosong Niger diperlukan adanya ketentuan yang dapat mengkover perlindungan dan kepastian hukumnya. Garis perbatasan wilayah perairan Indonesia dan Malaysia di kawasan Tanjung Datuk dan Laut Cina Selatan telah diatur dalam Persetujuan Batas Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia 1969. Namun dalam ketentuan perjanjian batas landas kontinen tersebut, masih terlalu umum dan kurang spesifik terutama terkait dengan Gosong Niger. Sehingga perlu adanya pengaturan dan penegakan mengenai garis batas Gosong Niger

yang tentunya terkait hal lintas batas dan segala aktifitas yang terjadi di dalamnya, maka suatu peraturan yang bersifat mengikat dan pasti menjadi hal yang penting bagi penentu eksistensi yuridis Gosong Niger.

Sebagai perwujudan ketentuan UU No.4 Prp Tahun 1960 yang diubah dengan ketentuan baru UU No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Sebagai pelaksanaan dari peraturan tentang perairan Indonesia tersebut, maka berdasarkan PP No.38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Terkait dengan Persetujuan Batas Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia 1969, maka ketentuan PP No.38 Tahun 2002 menjadi pelengkap dan pembaharuan, untuk mencantumkan posisi letaknya dalam daftar titik dasar dan titik koordinat wilayah-wilayah yang belum terdaftar dalam ketentuan sebelumnya. Dalam ketentuan PP No.38 Tahun 2002, sebagai langkah sepihak dari pemerintah Indonesia terhadap batas Gosong Niger telah terdaftar pada titik dasar (TD) No. 35 yang terletak pada koordinat 02°05' 10" LU dan 109° 38'43"BT, yang ditetapkan berdasar garis air rendah (*low water line*). Koordinat Gosong Niger yang terletak pada 109° 40' 3,78° Bujur Timur dan 2° 10' 22,9° Lintang Utara masih berada dalam kawasan laut teritorial Indonesia. (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/19/sh08.html>).

Garis air rendah (*low water line*), dalam pengertian garis pangkal normal dalam UNCLOS 1982 adalah berupa muka surutan peta atau *chart datum*. (Adi Sumardiman, 1992:65). Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 PP No.38 Tahun 2002 yang dimaksud dengan garis air rendah adalah datum hidrografi peta kenavigasian yang ditetapkan pada kedudukan rata-rata garis air rendah perbani. Pembuatan peta hidrografi untuk penetapan garis air rendah digunakan peta dengan skala ukuran besar (*large scale chart*) yang didasarkan bukan dari muka surutnya akan tetapi sifat dari pada peta itu sendiri. Penggunaan peta ukuran besar dilakukan agar lebih teliti dalam menentukan garis air rendah untuk menarik garis sejauh 12 mil untuk menentukan lebar laut wilayah. Mengingat bahwa bagian laut yang berdekatan dengan pantai selalu mengandung banyak bahaya seperti adanya pendangkalan, karang, dan arus pantai. Kualifikasi garis air rendah (*low water line*) meliputi *mean low water*, *lowes low water*, dan *low water spring* tergantung ketetapan negara yang bersangkutan yang mana terbaik untuk lingkungan hidrografinya dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran. (Adi Sumardiman, 1992:65-66)

Penetapan garis batas Pulau Gosong Niger, diatur dengan ketentuan Perjanjian Batas Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia 1969, karena berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim interdep pada tanggal 18 Januari 2006, bahwa diperairan Tanjung Datuk, $\pm 5,5$ mil kearah utara, hanya ditemukan adanya dangkalan, berupa gundukan pasir yang keadaan fisiknya selalu terendam air sedalam 4-12 (empat-duabelas) meter. Berdasarkan keadaan fisik dari Gosong Niger tersebut, untuk menyebutnya sebagai Pulau Gosong Niger tidaklah tepat, karena untuk menyebut suatu bentukan alamiah sebagai suatu pulau, Menurut ketentuan UNCLOS Pasal 121 Ayat 1, yang dimaksud pulau adalah, daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada saat air pasang, sedangkan menurut ketentuan PP Nomor 78 tahun 2005, bahwa yang disebut sebagai Pulau Kecil adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km², memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal pulau sesuai ketentuan hukum internasional dan nasional. Definisi pulau kecil terluar jika dihubungkan dengan definisi konvensi maka dapat ditarik konklusi bahwa pulau tersebut berada pada bagian terluar dengan kata lain adalah pulau terdepan dari wilayah suatu negara yang berhubungan langsung atau berbatasan langsung dengan suatu negara. Luas Gosong Niger hanya berkisar 50 km² tidak masuk kriteria ukuran luas minimum suatu pulau. Gosong Niger walaupun berada pada bagian terdepan dari wilayah Indonesia, belum dapat dikategorikan sebagai pulau seperti dimaksud oleh konvensi. Selain itu keadaan Gosong Niger yang selalu terendam air dengan kedalaman 4-12 (empat-duabelas) meter, sehingga Gosong Niger juga tidak dapat disebut sebagai karang (*Reefs* atau *Rocks*). Berdasarkan Peta Laut No.420 yang diterbitkan oleh Dinas Oseanografi TNI AL dan Bakorsurtanal juga tidak ditemukan atau dikenal adanya pulau yang disebut Gosong Niger, namun hanya berupa Gosong dangkalan berupa gundukan pasir yang selalu terendam air, dalam bahasa Inggrisnya disebut juga sebagai *sandbar* atau *banks*, sehinga Gosong tersebut hanya di sebut sebagai Gosong Niger atau *Niger Banks*. Penduduk setempat mengenal Gosong Niger dengan sebutan Pematang Naga atau Beting Kepala Tanjung. Mengenai ketentuan yang digunakan sebagai penetapan batas Gosong Niger menggunakan Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia 1969.

Gosong Niger sebagai Landas Kontinen tentunya memiliki kriteria tertentu yang melatar belakangi eksistensinya. Pada awal mulanya landas kontinen hanya

mempunyai pengertian geografis dan geologis yaitu, *plate reforme* atau daerah dasar laut menurun secara tajam, dan dimana mulai daerah dasar laut baru yang disebut sebagai lereng kontinen. Biasanya penurunan dasar laut secara tajam ini terjadi pada kedalaman sekitar 200 meter, disamping itu landas kontinen juga memiliki pengertian secara ekonomis, karena memiliki kandungan mineral yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomis, dimana dalam hal ini tergantung pada kemajuan teknologi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasinya. (Boer Mauna, 2005:340-341)

Disamping mengenai Eksistensi Gosong Niger sebagai bagian landas kontinen, perlu diuraikan juga mengenai Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Gosong Niger, mengingat letaknya di antara negara yang berdampingan yaitu Indonesia dan Malaysia, dimana jika ditelaah dari sejarah pengaturan batas negara antara kedua negara bahwa berdasarkan perjanjian Inggris dan Belanda tahun 1981 telah menyepakati batas wilayah darat, dengan demikian tentunya mengenai batas maritim belum ada kesepakatan. Sehingga sering menimbulkan klaim wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia menjadi tumpang tindih (*overlapping claim*), maka tahun 1969 dibuat suatu Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, namun adanya ketentuan ini terlalu umum dan kurang spesifik, sehingga perlu adanya penegasan terhadap garis batas landas kontinen khususnya terhadap Gosong Niger.

Dari segi hukum yang berhak atas landas kontinen adalah, jika letak landas kontinen tersebut berada di bawah laut wilayah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara diatas laut wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya, dengan demikian negara pantai mempunyai wewenang penuh bukan saja terhadap udara di atas laut wilayah tetapi atas semua sumber-sumber kekayaan yang terdapat di dalam laut, didasar laut, dan lapisan tanah yang ada dibawahnya. maka yurisdiksi dan kedaulatan negara pantai itulah yang berlaku, namun jika landas kontinen berada diluar laut wilayah maka yurisdiksi yang berlaku, dapat dikaji dalam beberapa solusi kompromi yang diterima oleh hukum internasional positif yaitu sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan sejarah Landas Kontinen sebelum 1958, dimana diawali dengan adanya Truman Proclamation 1945, yang berisi gagasan mengenai yurisdiksi Landas Kontinen adalah sebagai berikut:

“Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, the government of the United State regard the natural resources of the seabed and the subsoil of the continental shelf beneat the high seas but contiguous to the coasts ot the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control. In cases where the continental shelf extend to the shores of another state, or is shared with an adjacent State, the boundary shall be determined by the United State and the State concerned in accordance with equitable principles. The character as high seas of the waters above the continental shelf and the right to their free and unimpeded navigation are in no way thus affected”.

(Dengan mempertimbangkan urgensi dari pencadangan dan pemanfaatan yang layak atas sumber-sumber daya alamnya, Pemerintah Amerika Serikat memandang sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalam dasar laut dan tanah dibawahnya dari landas kontinen yang berada dibawah laut lepas tetapi yang merupakan kelanjutan dari pantai Amerika Serikat, sebagai kepunyaan Amerika Serikat, dan dengan demikian tunduk pada yurisdiksi dan pengawasan Amerika Serikat. Dalam hal landas kontinen itu meluas hingga sampai pada pantai negara-negara lain, atau harus dibagi bersama dengan negara yang dihadapannya maka garis batasnya akan ditentukan oleh Amerika Serikat dan negara yang bersangkutan, sesuai dengan prinsip jarak sama. Hakekat dari perairan di atas landas kontinen itu sebagai perairan laut lepas disertai dengan hak atas kebebasan pelayaran yang tidak boleh dihalang-halangi, tidak akan dipengaruhi).

Dari proklamasi truman tersebut, sebagai dasar yurisdiksi eksklusif Amerika Serikat atas landas kontinen yang merupakan kelanjutan dari daratan negara pantai yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya yang kaya akan sumberdaya alam, memberikan hak untuk melakukan tindakan efektif untuk memelihara dan mengeksploitasi secara wajar atas kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Dengan demikian perlu adanya batas-batas landas kontinen antar negara teangga atas dasar persetujuan bersama. Hak pengawasan dan perlindungan negara pantai atas landas kontinennya tidak boleh mengganggu kebebasan berlayar di atas laut yang menutupinya sehingga dalam pengaturannya tunduk pada hukum dan yurisdiksi negara pantai. Di laut lepas kekuasaan terhadap landas kontinen tidak akan mempengaruhi status perairan dan hak kebebasan yang ada diatasnya.(Boer Mauna, 2005:342-343)

Mengenai batas dari *continental shelf* dari proklamasi Truman ini adalah 100 fathoms of water (600 feet). Namun banyak negara yang memiliki definisi yang berbeda-beda sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional masing-masing negara.

2). Konvensi Jenewa 1959 tentang Landas Kontinen

Dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1959, dalam ketentuan Pasal 1 mengemukakan tentang penegertian Landas Kontinen yaitu,

- a) dasar lapisan tanah dibawah laut yang berbatasan dengan pantai tetapi berada diluar daerah laut wilayah sampai kedalaman 200 meter atau daerah yang lebih dalam lagi dimana dalam airnya memungkinkan eksploitasi sumber-sumber alam daerah tersebut;
- b) dasar dan lapisan tanah di bawah laut seperti di atas yang berbatasan dengan pantai kepulauan.

Dengan pengertian landas kontinen dalam ketentuan tersebut, tidak masuk lagi landas kontinen yang berada dibawah laut wilayah karena, secara otomatis landas kontinen tersebut berada dibawah kedaulatan negara pantai, sehingga dalam Konvensi ini hanya mengatur landas kontinen yang berada diluar laut wilayah hingga kedalaman 200 meter atau daerah yang lebih dalam, namun tidak ditetapkan dalam ukuran tertentu. Selain itu dalam konvensi ini memperluas pengertian landas kontinen yang mencakup pantai-pantai kepulauan. Kelemahanya adalah definisinya kurang memperhatikan aspek eksploitasi, dan menimbulkan kesukaran dalam interpretasi dan pelaksanaannya. (Boer Mauna, 2005:345-346)

3). Ketentuan Konvensi 1982

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, definisi landas kontinen adalah,

The continental shelf of a coastal State comprises:

- a. the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prologation of its land territory to the outer edge of continental margin, or*
- b. to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up that distance.*

(a. landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau

b. hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut).

Indonesia membuat suatu ketentuan mengenai landas kontinen berdasarkan acuan yang diberikan oleh hukum internasional dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 1 a, disebutkan mengenai pengertian Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau dikenal sebagai UNCLOS 1982, merupakan penyempurnaan dari konvensi sebelumnya, bahkan pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dalam ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Dalam Konvensi ini disebutkan bahwa negara pantai memiliki hak atas landas kontinen tidak hanya yang berada di bawah laut

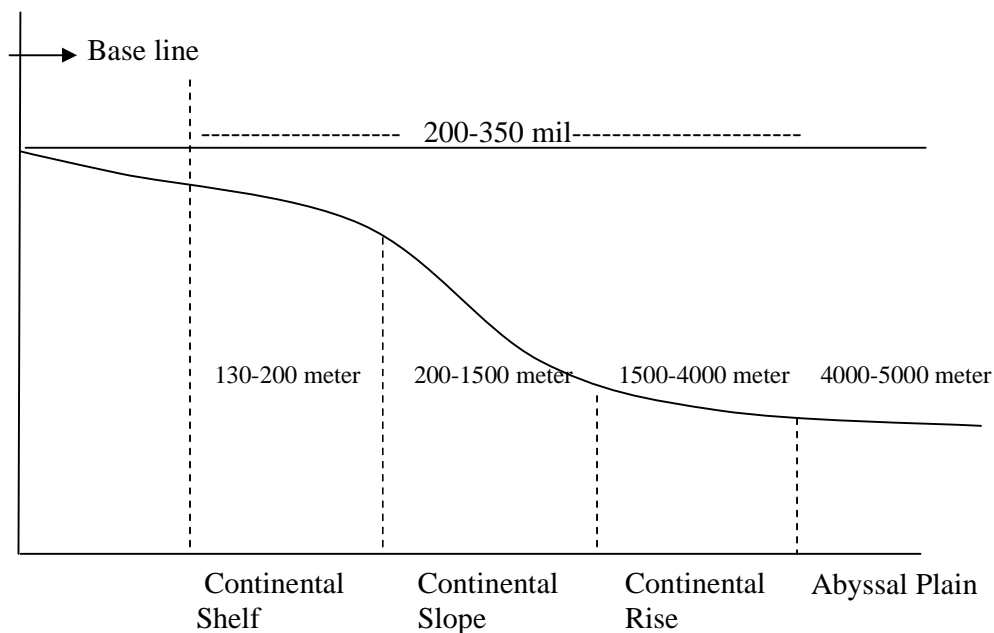
teritorialnya, namun hingga sejauh 200 mil dari pangkal lebar laut wilayah diukur. Batas luar landas kontinen berdasarkan perkembangan terbaru tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman (*isobath*) 2.500 meter, dimana dalam ketentuan lama hanya menyebutkan batas kedalaman hingga 200 meter + x. dalam hal klaim atas landas kontinen sejauh 350 mil negara pantai harus mengikuti prosedur yang dapat dilakukan oleh *Commision on the Continental Sheff* (CCS), pada tanggal 14-18 Mei 2001, 14 (empat belas) negara telah tercatat secara teknis memenuhi syarat untuk mengajukan klaim maksimum landas kontinen, dan Indonesia termasuk di dalamnya. (Boer Mauna, 2005:351).

Dengan meninjau kembali karakter Gosong Niger yang bukanlah pulau namun *plate reformnya* hanya berupa dangkalan yang selalu tergenang air sedalam 4-12 (empat-duabelas) meter dari permukaan dasar dangkalan tersebut. Lokasinya yang \pm 100 meter atau \pm 5,5 mil di sebelah utara ujung Tanjung Datuk, tidak lebih dari 12 mil dari titik pangkal (*base point*), berarti masih dalam kawasan perairan Teritorial Indonesia. (<http://bappeda.kalbar.go.id/?pilih=lihat&id=92>). Secara georafis Gosong Niger merupakan kelanjutan daratan dari pantai atau ujung kepulauan, maka secara fisiografi meliputi bagian-bagian yaitu *continental shelf*, *continental slope*, *continental rise*, dan *abysal plain* yang mendatar didasar laut disebut sebagai *continental margin*. (Dimyati Hartono, 1977:89). Konvensi Jenewa 1959, menyatakan dalam bagian tersebut mengandung sumber daya alam dan mineral-mineral alam yang potensial. Secara ekonomis mineral dalam landas kontinen sangat berguna bagi perkembangan teknologi, eksplorasi, dan eksploitasi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh komite Ad Hoc untuk penggunaan secara damai dasar lautan diluar yurisdiksi nasional yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB dalam resolusinya No. 2340 (XXII), 18 Desember 1967, menunjukkan bahwa di dalam landas kontinen mengandung kekayaan alam yang meliputi:

- a) Di sepanjang pantai, di dasar laut yang tidak begitu dalam, terdapat *placers* berisikan emas, ilmen, berlian, dan sumber-sumber lain seperti minyak bumi.
- b) Bagian tertentu pada lereng kontinen berisi kumpulan minyak dan gas bumi dan bagian-bagian tertentu dasar laut dalam.

- c) Bagian laut dalam juga terdapat nodule dari mangan yang berisi logam lain seperti cobalt, nikel, tembaga.
- d) Bagian sebelah luar landas kontinen, dibagian sebelah atas lereng kontinen terdapat pospor yang berbentuk lapisan nodule.
- e) Pada daerah tertentu seperti laut merah, yang merupakan daerah laut panas yang sangat asin mengandung lumpur-lumpur logam yang kaya dengan tembaga dan zinc. (Boer Mauna, 2005:341)

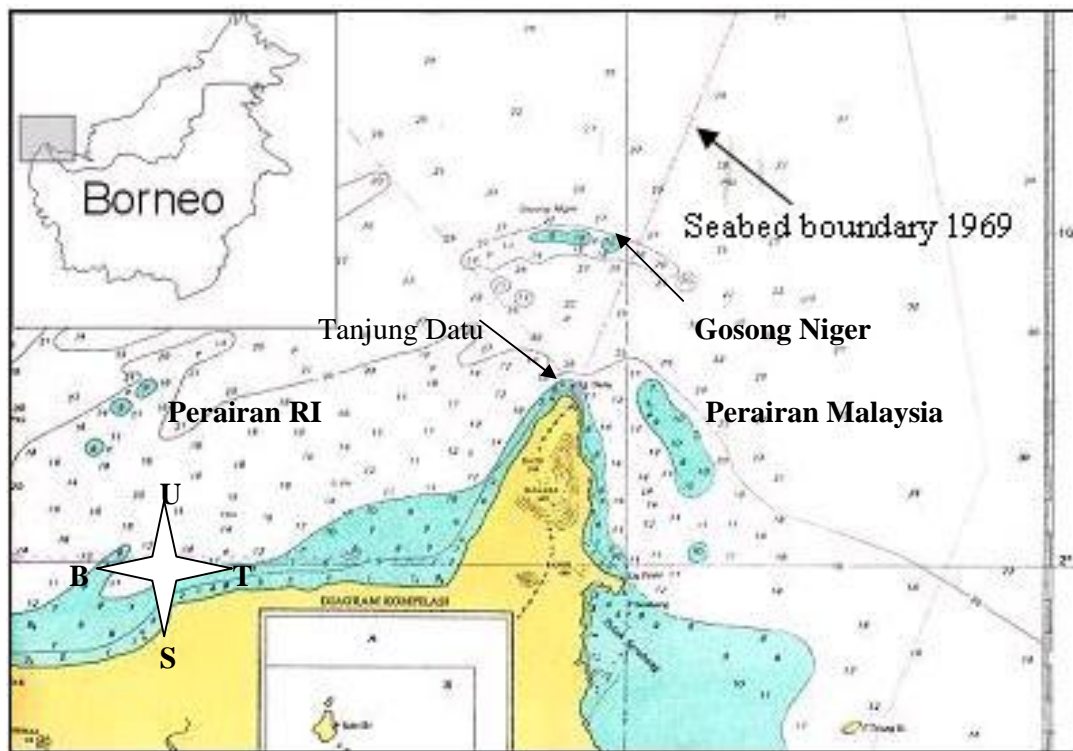
Gambar 3: Continental Margin



Dengan penelitian dan eksplorasi lebih mendalam terhadap Gosong Niger tentunya dapat membuktikan adanya kekayaan alam yang terkandung di bawah Gosong Niger, karena berdasarkan pernyataan Bupati Sambas Burhanudin A Rasyid, bahwa sejak dulu di lokasi Gosong Niger terindikasi mengandung kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi. (Equator, 25 Januari 2006:1). Disamping itu potensi panorama alamnya sangat menakjubkan dan juga sebagai kantong ikan terbesar. Sementara Bupati Sambas, Ir H Burhanuddin A Rasyid juga menyatakan bahwa pernah ada penelitian yang menunjukkan bebatuan di Gosong Niger mengandung besi. (<http://www.equator-news.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=51548>)

Jarak Gosong Niger yang hanya 100 meter atau 5,5 mil dari sebelah utara ujung Tanjung Datuk, jika ditinjau dari ketentuan hukum laut internasional, mengenai

laut wilayah tentunya masih berada pada kawasan wilayah laut Indonesia. Namun jika digunakan untuk menetapkan titik dasar untuk menetapkan laut territorial Gosong Niger tidak dapat memenuhi kriteria, sebab berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 Pasal 47 “penentuan garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau karang kering terluar...”, berdasarkan kondisi fisiknya justru terendam air sedalam 4-12 (empat-duabelas) meter, sehingga penentuan titik dasar ditentukan dari ujung Tanjung Datuk, yang kemudian dengan titik dasar tersebut, ditarik garis untuk menentukan garis pangkal/dasar (*reference point*) berdasarkan garis air rendah (*low waterline*). Dengan ketentuan garis air rendah (*low waterline*) tersebut ditentukan suatu titik dasar di Tanjung Datuk, karena Gosong Niger tidak dapat dijadikan titik pangkal karena kondisi fisiknya berupa dangkalan yang berwujud gundukan pasir tenggelam, sehingga statusnya hanya sebagai bagian dari landas kontinen Indonesia. Ketentuan penetapan garis batas landas kontinen Gosong Niger didasarkan pada Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia 1969, namun dalam ketentuan ini belum secara spesifik mencantumkan posisi titik dasar untuk menentukan garis batas landas kontinennya, sehingga perlu adanya ketentuan baru yang dapat mewadahi kepastian hukum terhadap eksistensi garis batas landas kontinen Gosong Niger. Minimal dengan tindakan sepihak Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu, PP No.38 Tahun 2002, tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia, dimana titik dasar penentuan garis batas Gosong Niger ada pada posisi titik dasar (TD) No. 35 dengan koordinat 02°05’ 10” LU dan 109° 38’43”BT, sedangkan koordinat Gosong Niger terletak pada 109° 40’ 3,78” Bujur Timur dan 2° 10’ 22,9” Lintang Utara masih berada dalam kawasan laut territorial Indonesia. Disamping itu ketentuan UU No.4 Prp Tahun 1960 telah diperbaharui dengan ketentuan UU No.6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia.



Gambar 4: Gosong niger di antara RI dan Malaysia

2. Penentuan Garis Batas Landas Kontinen Gosong Niger

Pentingnya penetapan garis batas adalah agar ada kejelasan dan kepastian hukum terhadap eksistensi batas dan keberadaan suatu wilayah negara. Dimana tiap-tiap negara tentunya memiliki wilayah yang meliputi darat, laut, dan udara, tentunya masing-masing wilayah tersebut memiliki ketentuan tersendiri dalam pengaturan dan penentuan batas-batasnya baik yang diatur oleh hukum internasional maupun yurisdiksi hukum nasional. Sebelum menentukan batas-batas landas kontinen Gosong Niger perlu adanya suatu tinjauan terhadap wilayah laut, dimana akan terdapat keterkaitan antara bagian-bagian laut wilayah tersebut. Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Gosong Niger Berdasarkan pada ketentuan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia yang diharapkan dapat sesuai dengan ketentuan Hukum Laut Internasional PBB 1982. Dalam ketentuan Hukum Laut Internasional wilayah laut suatu negara memiliki beberapa bagian wilayah perairan yang meliputi:

- a) Perairan Pedalaman;
- b) Laut Teritorial;

- c) Zona Tambahan;
- d) Zona Ekonomi Eksklusif;
- e) Landas Kontinen;
- f) Laut Lepas;
- g) Dasar Samudra.

a) Perairan Pedalaman

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, perairan pedalaman adalah berupa perairan pada sisi darat garis pangkal laut territorial, meliputi sungai, danau, pelabuhan, muara, dan teluk. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas perairan pedalaman karena diakui sebagai bagian wilayah integral negara pantai. Keterkaitan perairan pedalaman dengan laut territorial, adalah dalam hal penentuan titik pangkal, dimana dimulai dari garis pangkal laut territorial tersebut kearah darat dapat ditentukan adanya perairan pedalaman. Dalam penentuan garis pangkal dalam kondisi georafis tertentu dapat menimbulkan adanya perairan pedalaman yaitu,

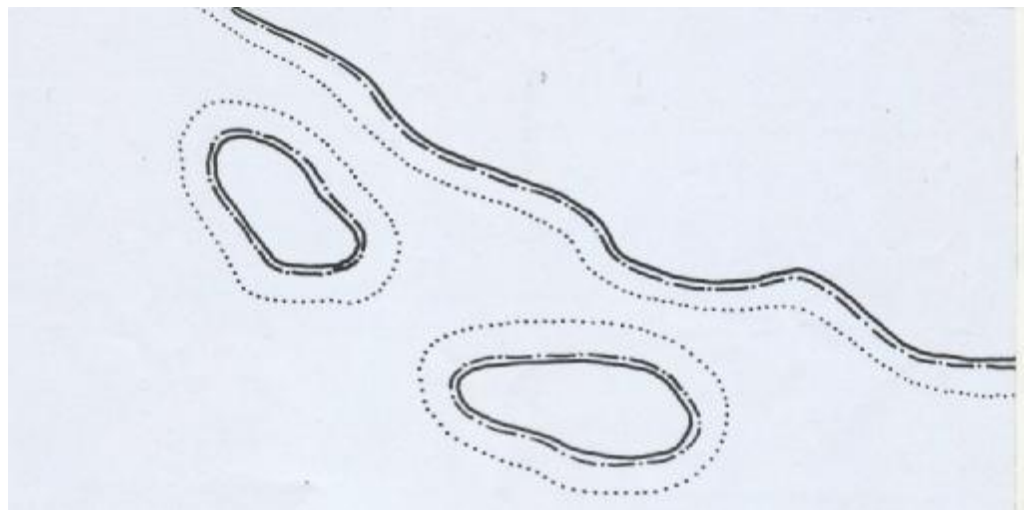
- (1) Kondisi pantai yang sangat menjorok ke arah dalam, atau di sepanjang pantai terdapat pulau-pulau, maka penarikan garis pangkal dapat dimulai dari titik tertentu pada pantai atau pada pulau-pulau tersebut (Pasal 7 UNCLOS 1982). Sehingga didalam garis pangkal tersebut adalah perairan pedalaman.
- (2) Kondisi daratan sangat cekung kedalam, atau lebih dari setengah lingkaran, maka penarikan garis pangkal dapat dilakukan mulai dari garis penutup mulut lekukan. Sehingga perairan di sekeliling lekukan tersebut hingga penutup lekukan tersebut adalah perairan pedalaman.
- (3) Apabila terdapat sungai yang langsung bermuara kelaut, maka garis pangkal dapat ditarik melintasi mulutnya, dengan menghubungkan titik garis air rendah ditepi muara tersebut. Sungai termasuk bagian dari perairan pedalaman hingga sampai pada batas tepi muara. (Albert W Koers, 1991:5)

b. Laut Teritorial

Adalah merupakan bagian wilayah yang berada diluar garis pangkal pulau terluar hingga sejauh 12 mil. Untuk mengukur lebar laut territorial terdapat beberapa garis pangkal yang meliputi:

- (1) Garis Pangkal Normal (*Normal Base Lines*), Dalam keadaan biasa (normal) garis pangkal dipergunakan sebagai titik mula pengukuran bagian laut, dimana garis pangkal normal (*Normal Base Lines*) merupakan garis air surut sepanjang pantai seperti yang ditandai dalam peta skala besar yang diakui secara resmi oleh negara pantai (Pasal 5 UNCLOS 1982). Garis pangkal normal titik pangkal diukur berdasar keadaan yang sebenarnya dari pantai, pada waktu air surut, sehingga dari titik tersebut mulai ditarik garis hingga 12 mil untuk menentukan lebar laut territorial.

Gambar 5:



Garis Pangkal Normal

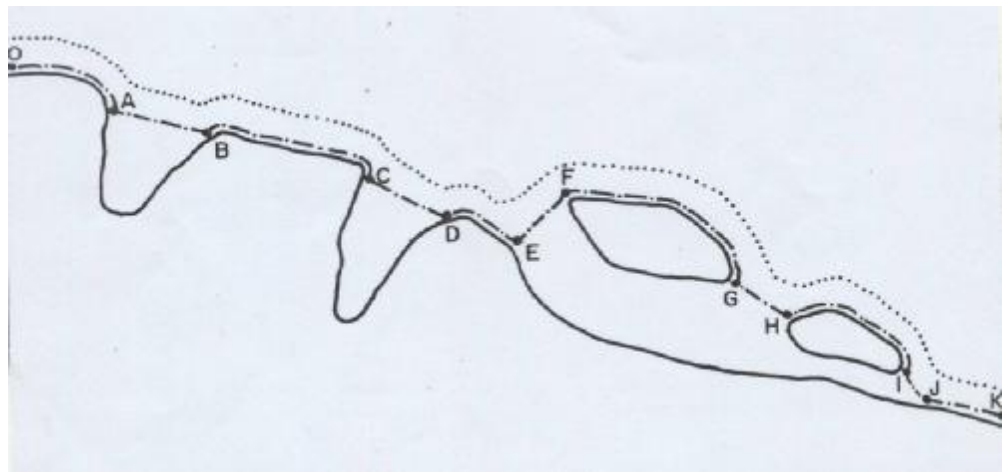
--- -- -- -- -- Garis Pangkal Normal

..... Garis atau Batas Luar (*outer limit*). (I Wayan Parthiana, 1990:110)

- (2) Garis Pangkal Lurus (*Stright Base Line*), Dalam keadaan khusus jika wilayah pada garis pantainya bervariasi dan terputus-putus

atau ada suatu rumbai pulau-pulau sepanjang pantai yang dalam hubungannya sangat berdekatan sehingga digunakan cara atau metode garis pangkal lurus (*Stright Base Line*), yang menghubungkan titik-titik yang bertepatan sebagai pangkal mula pengukuran bagian laut (Pasal 7 UNCLOS 1982). Dari garis yang menghubungkan titik-titik tersebut menjadi titik pangkal untuk menentukan lebar laut teritorial dapat ditarik garis hingga 12 mil.

Gambar 6:



Garis Pangkal Lurus dari Ujung ke Ujung

Garis AB,CD,EF,GH dan IJ adalah garis pangkal lurus dari ujung ke ujung

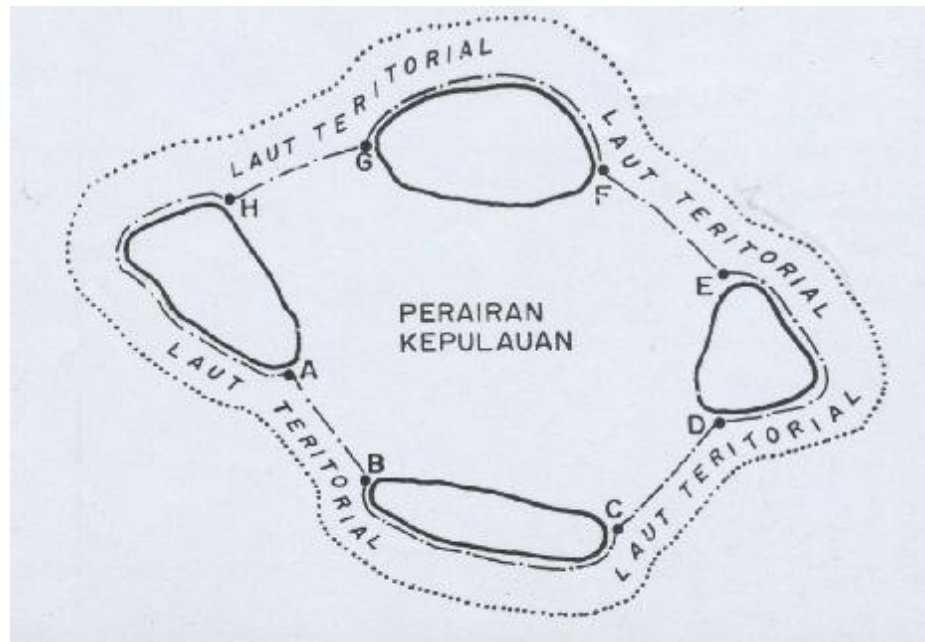
Garis OA,BC,DE,FG,HI dan JK adalah garis pangkal normal.

..... Garis Batas Luar (*outer limit*). (I Wayan Parthiana,1990:114)

(3) Garis Pangkal Kepulauan (*Archipelagic Base Lines*), Pada suatu negara yang memiliki keadaan sangat khusus yakni hingga memenuhi syarat disebut sebagai negara kepulauan, sehingga dipergunakan metode pengukuran dengan menentukan garis pangkal kepulauan (*Archipelagic Base Lines*), yaitu garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang-karang kering dari kepulauan, asalkan dalam garis semacam itu termasuk didalamnya pulau-pulau induk

dari suatu wilayah, yang ratio dari wilayah perairan dan daratan, termasuk atol adalah satu banding satu dan sembilan banding satu (Pasal 47 UNCLOS 1982).

Gambar 7:



Garis Pangkal Kepulauan (*archipelagic base lines*)

Garis AB,CD,EF,GH adalah garis pangkal kepulauan.

..... Garis Batas Luar (*outer limit*). (I Wayan Parthiana,1990:117)

Baik wilayah perairan pedalaman dan laut territorial adalah bagian laut wilayah yang merupakan kedaulatan penuh suatu negara, dalam ketentuan Pasal 2 UNCLOS 1982:

“bahwa kedaulatan negara pantai meliputi laut territorialnya, termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah dibawahnya”.

c. Zona Tambahan

Bagian wilayah laut yang keberadaanya setelah landas kontinen, sejauh 24 mil dari titik pangkal pulau terluar. Dalam zona ini hanya terdapat hak-hak tertentu bagi negara pantai untuk melakukan tindakan dan pencegahan terhadap pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku di wilayah territorialnya misalnya terhadap pelanggaran, perundang-undangan bea cukai, pajak, imigrasi, atau kesehatan.

d. Zona Ekonomi Eksklusif

Adalah wilayah laut yang berada diluar laut territorial yang tidak boleh melebihi 200 mil dari titik pangkal yang digunakan untuk mengukur laut territorial (Pasal 55 dan 57 UNCLOS 1982), dalam wilayah ini hanya terdapat hak berdaulat bukan kedaulatan mutlak dari suatu negara, namun hanya dapat menikmati hak eksplorasi, eksploitasi, riset, dan pelestarian lingkungan, kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

f. Landas Kontinen

Adalah wilayah laut yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut territorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai kebatas terluar tepian kontinen (*continental margin*), atau sampai jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut territorial apabila sisi terluar tidak mencapai jarak tersebut (Pasal 76 UNCLOS 1982), maka berdasarkan ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 UNCLOS 1982, maka landas kontinen negara pantai tidak boleh melebihi:

- (1) Batas luar laut territorial, adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan laut territorial. (Pasal 4 UNCLOS 1982)
- (2) Garis pangkal biasa (*normal baselines*), adalah garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut territorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui oleh negara pantai tersebut. (Pasal 5 UNCLOS 1982)
- (3) Dalam hal terletak pada atol atau pulau yang mempunyai karang-karang disekitarnya, maka garis pangkal untuk mengukur lebar laut territorial adalah garis air rendah pada sisi karang ke arah laut sebagaimana ditunjukkan oleh tanda yang jelas untuk itu pada peta tidak diakui resmi oleh negara pantai yang bersangkutan. (Pasal 6 UNCLOS 1982)

Dalam rumusan Pasal 83 UNCLOS 1982 untuk menentukan delimitasi landas kontinen dilakukan dengan dua pendekatan pokok yaitu:

- (1) Prinsip *equidistance/median line special circumstance*, adalah merupakan prinsip penentuan batas landas kontinen dengan metode garis tengah sebagai prinsip umum dan akan melakukan penyesuaian garis tengah tersebut berdasarkan situasi khusus tertentu.
- (2) Prinsip *equitable*, adalah prinsip yang menyatakan bahwa garis batas ini dinilai adil oleh kedua belah pihak.

Namun kedua prinsip ini masih menjadi perdebatan, sehingga terdapat rumusan sederhana yang menyatakan bahwa,

“...shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the international court of justice, in order to achive an equitable solution...”

Pada dasarnya Makamah Internasional, sejak tanggal 20 Februari 1969, menolak prinsip *equidistance* dan hanya mengakui prinsip yang didasarkan pada keadilan seperti pernyataan Truman, dalam keadaan khusus landas kontinen akan dibagi-bagi, dengan demikian Makamah Internasional memberikan suatu petunjuk dalam upaya penentuan batas-batas landas kontinen yang meliputi ketentuan:

- a) dalam penentuan batas landas kontinen, seharusnya negara yang bersangkutan memperoleh keseluruhan landas kontinennya, yang merupakan kelanjutan natural dari dasar laut wilayahnya untuk menghindarkan agar landas kontinen tidak mengambil daerah-daerah laut pihak-pihak lain.
- b) bila penentuan pembatasan landas kontinen menyebabkan adanya bagian-bagian dasar laut yang dituntut bersama, dasar-dasar laut tersebut harus dibagi-bagi sama rata bagi negara-negara yang bersangkutan, kecuali negara-negara tersebut menerima suatu rezim yurisdiksi penggunaan dan eksploitasi bersama dari sebagian atau keseluruhan daerah-daerah dasar laut yang sama-sama dituntut tersebut.

- c) Makamah juga mengingatkan supaya diperhatikan semua keadaan-keadaan khusus yang disebut oleh Konvensi 1958. Yang dimaksud dengan keadaan khusus menurut Makamah Internasional adalah:
- i) Konfigurasi umum dari pantai dengan segala ciri-ciri khususnya atau ciri-ciri luar biasa yang ada.
 - ii) Kesatuan sumber alam yang menunjukkan struktur fisik dan geologi dari daerah landas kontinen yang akan dibagi.
 - iii) Hubungan yang wajar antara luasnya landas kontinen yang berada di bawah kedaulatan negara pantai dan panjangnya pantai negara tersebut diukur menurut jurusan umum pantai.

Namun dalam keadaan khusus tersebut juga harus memperhatikan prinsip keadilan (*equity*) setinggi mungkin. (Boer Mauna, 2005:355-356)

Berbeda dengan Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen 1958, yang merupakan hasil kompromi negara-negara pantai, dimana menyatakan bahwa batas terluar landas kontinen sampai kedalaman 200 meter dan kriteria eksplotabilitas, digantikan dengan kriteria geologis (batas terluar tepian kontinen) serta kriteria (batas 200 mil). (Albert W Koers, 1991:9-10). Negara Canada menerapkan kriteria eksplotabilitas Konvensi Jenewa 1958 untuk menetapkan batas landas kontinen, berdasarkan latar belakang keteguhan pendapat akan hak-hak diseluruh landas kontinen, bagi negara yang menginginkan kawasan internasional seluas mungkin.

Cara penetapan batas landas kontinen menurut Konvensi Jenewa 1958 adalah:

- (1) dengan membuat perjanjian atau persetujuan dengan pihak yang berkepentingan. Cara seperti ini dapat dilakukan oleh negara-negara yang letak geografisnya berhadapan (*opposite*), atau negara yang letak geografinya saling bersebelahan atau berdampingan (*adjacent*). Cara seperti ini cukup ideal karena melalui proses perjanjian atau persetujuan tentang garis batas landas kontinen antara negara yang berkepentingan, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan.

- (2) menerapkan metode garis tengah (*median line*), yang merupakan suatu garis yang setiap titik pada garis tengah mempunyai jarak yang sama dari titik-titik terdekat dari garis pangkal tempat lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Metode seperti ini dapat diterapkan pada negara-negara yang kondisi geografinya saling berhadapan (*opposite*).
- (3) menerapkan metode jarak yang sama (*equidistance principle*) dari titik terdekat dari garis pangkal tempat mengukur lebar laut teritorial dari masing-masing pihak, yang nantinya akan menghasilkan suatu garis yang mempunyai jarak yang sama dari titik terdekat garis pangkal tempat mengukur lebar laut teritorial masing-masing pihak. Penerapan cara ini dapat dilakukan oleh negara yang secara geografi berdampingan (*adjacent*).
- (4) penentuan garis batas landas kontinen dengan cara lain yang dibenarkan berdasarkan keadaan-keadaan khusus (*special circumstance*). Namun konvensi ini tidak dijelaskan mengenai keadaan-keadaan khusus tersebut. (I Wayan Parthiana, 2005:68-69)

f. Laut Lepas

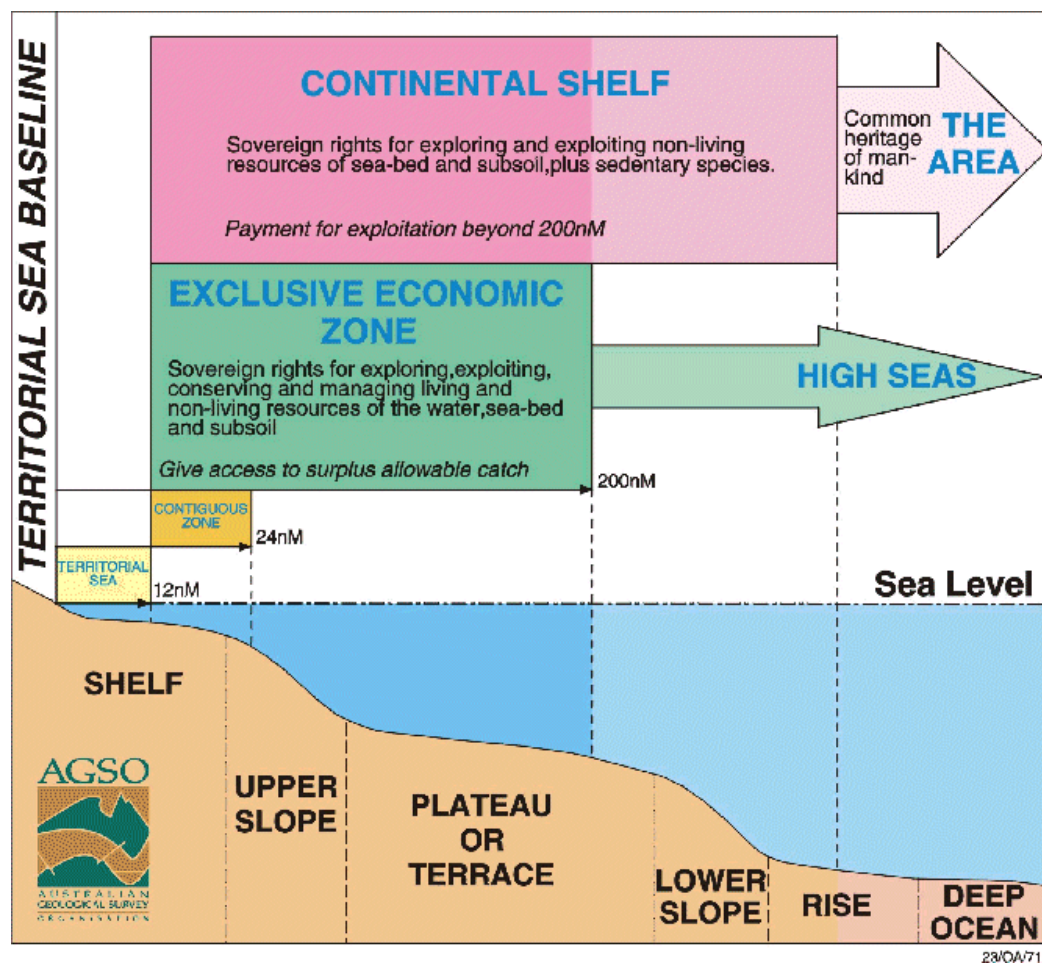
Adalah perairan di luar batas 200 mil laut zona ekonomi eksklusif, atau merupakan semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman. Dalam wilayah laut lepas terdapat kebebasan bagi semua negara meliputi: a. kebebasan berlayar; b. kebebasan penerbangan; c. kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut; d. kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi buatan dan instalasi lainnya; e. kebebasan menangkap ikan; f. kebebasan riset.

Namun kebebasan tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan Negara lain (Pasal 87 UNCLOS 1987). Laut lepas hanya digunakan untuk maksud damai dan tidak ada satu pun negara yang menyatakan kedaulatan di atasnya.

g. Dasar Samudra.

Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 menyebutnya sebagai kawasan, merupakan dasar laut diluar zona ekonomi eksklusif lebih dari 200 mil, atau wilayah laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman. Kawasan merupakan sumber kekayaan alam dan warisan bersama seluruh umat manusia, tidak ada satupun negara dapat menyatakan klaim atau kedaulatannya pada kawasan (Pasal 137 UNCLOS 1982).

Gambar 8 : Bagian-bagian Laut secara Yuridis



Sumber : www.google.co.id.

Kembali pada pembahasan Gosong Niger dimana telah dibahas dan ditegaskan dalam pembahasan sebelumnya wilayah Gosong Niger adalah merupakan bagian landas kontinen Indonesia berdasarkan penetapan garis air rendah dinyatakan sebagai

bagian landas kontinen Indonesia berdasarkan Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia 1969. Dalam kenyataannya Indonesia dan Malaysia memiliki klaim terhadap wilayah laut yang tumpang tindih (*overlapping claim*), seperti halnya Gosong Niger, dalam penentuan titik dasar sebagai patokan untuk menentukan batas landas kontinen, dalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan secara spesifik, jika ditinjau lebih jauh bahwa yang menjadi titik dasar Gosong Niger adalah Tanjung Datuk, dimana selama pada kawasan ini belum ditentukan lokasi titiknya maka kawasan tersebut merupakan status quo. (Pontianak Post, 2006:7). Dalam implikasinya terkait erat dengan penetapan Garis Batas Gosong Niger yang letaknya hanya ± 100 meter atau 5,5 mil dari Tanjung Datuk. Melihat sejarah mengenai keberadaan mercusuar di Tanjung Datuk, yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1891, dicantumkan dalam peta buatan 1905 berbentuk bintang, kemudian pada tahun 1921 diikuti oleh Inggris yang membangun dua mercusuar, berdasarkan hasil pengukuran bersama Hindia Belanda dan Kerajaan Inggris dalam resolusi 1912, namun implikasi deviasinya tidak berpengaruh terhadap kepemilikan Hindia Belanda terhadap Gosong Niger. Hingga saat ini keberadaan mecusuar tersebut menjadi acuan dalam penerapan prinsip efektif dan patokan penentuan tapal batas antara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datuk. (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/19/sh08.html>)

Dari kacamata hukum internasional, cara penentuan Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia di Gosong Niger adalah dengan mempertimbangkan faktor geografis antara kedua negara yang mana merupakan negara yang saling berdampingan (*adjacent state*). Dengan kondisi demikian, perlu kita tinjau juga bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) sedangkan Malaysia adalah negara benua, sehingga dalam penentuan garis batas harus mempertimbangkan pula aspek ini, karena akan terkait dengan penentuan titik atau garis pangkal. Disamping itu Malaysia telah menyatakan dukungannya terhadap regime hukum negara kepulauan (Wawasan Nusantara) Indonesia. (Syahmin A K, 1988:66).

Untuk menentukan batas Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia di Gosong Niger, tentunya harus diawali dengan penentuan titik pangkal laut wilayahnya. Indonesia yang berupa negara kepulauan (*archipelagic state*), sebelum menentukan lebar laut wilayah maka terlebih dahulu harus meninjau kedaulatan wilayah negara

berdasarkan Pasal 2 UNCLOS 1982. Ketentuan lebar laut untuk wilayah Laut Teritorial tidak boleh lebih dari 12 mil dari titik pangkal pulau terluar, kemudian dilanjutkan dengan Zona Tambahan selebar 24 dari titik pangkal penentuan laut teritorial, kemudian Zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil dari titik pangkal teritorial, meliputi pula Landas Kontinen yaitu dasar laut yang ada dibawahnya hingga sejauh 200 mil, dalam *Commission on the Limits of the Continental Shelf* menyatakan bahwa, *facilitates the implementation of UNCLOS in respect of the outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of territorial sea is measured*. (Vladimir Jares, Lokakarya Hukum Laut Internasional 2004:3). Untuk *adjacent state* (negara yang berdampingan) seperti Indonesia dan Malaysia, diawali dengan perundingan antara kedua negara untuk menyepakati titik dasar yang digunakan untuk menentukan laut wilayah, dari tepi pulau terluar dari wilayah Indonesia yang berhubungan dengan wilayah Malaysia dimana terkait dengan ketentuan PP No.38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan UU No.4 prp Tahun 1960 yang telah diganti dengan UU No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Hingga ditetapkan titik pangkal terluar tersebut ada di sebelah utara Tanjung Datuk Propinsi Kalimantan Barat.

Dari penentuan laut wilayah, maka penentuan garis batas Landas Kontinen Gosong Niger yang berada diantara Indonesia dan Malaysia dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1958, menerapkan serangkaian metode yaitu:
 - a) Mengingat bahwa Indonesia dan Malaysia adalah *adjacent state* (negara yang berdampingan), maka penetapan batas landas kontinen dilakukan dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat 2 yaitu;

“apabila suatu landas kontinen merupakan kelanjutan dari wilayah dua negara yang saling berdampingan (*adjacent*), garis batas landas kontinennya ditentukan berdasar perjanjian atau persetujuan antara kedua negara yang bersangkutan. Apabila persetujuan itu tidak atau belum ada, dan kecuali jika garis batas lain dapat dibenarkan berdasarkan keadaan-keadaan khusus, maka garis batas tersebut ditentukan dengan penerapan prinsip jarak sama yang merupakan suatu

garis yang diukur dari titik-titik yang jaraknya sama dari garis pangkal tempat lebar laut teritorial”.

- b) Dengan ketentuan tersebut maka penentuan garis batas landas kontinen Gosong Niger, ditentukan berdasar perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak antara Indonesia dan Malaysia, dalam hal ini ketentuan perjanjian berdasarkan pada Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia tahun 1969, namun dalam ketentuan ini masih terlalu universal sehingga belum secara spesifik dalam memberikan kejelasan terhadap semua batas landas kontinen yang ada, sehingga pada ketentuan daftar koordinat titik dalam ketentuan ini, titik dasar dan koordinat Gosong Niger belum di cantumkan. Dengan ketentuan yang baru diharapkan dapat menunjukkan kepastian hukum terhadap eksistensi Gosong Niger sebagai bagian landas kontinen Indonesia. PP No.38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, telah mencantumkan titik dasar yang digunakan untuk menentukan keberadaan Gosong Niger, yaitu berada pada kawasan Tanjung Datuk dengan titik dasar (TD) No. 35 dan titik koordinatnya adalah 02°05' 10" LU dan 109° 38'43"BT, ditentukan berdasarkan prinsip garis air rendah (*low waterline*). Walaupun adanya ketentuan ini merupakan tindakan sepihak dari pemerintah, dan untuk selanjutnya diharapkan dapat dibuat suatu persetujuan yang mengukuhkan kesepakatan bersama antara kedua negara.

Berpegang pada titik dasar yang ada di ujung Tanjung Datuk yang ditentukan berdasar garis air rendah (*low waterline*), maka ditarik garis kearah titik dasar terluar lain yang terdekat, hingga garis tersebut dapat ditentukan sebagai garis pangkal terluar atau sebagai *reference point*, yang kemudian digunakan untuk menentukan lebar wilayah laut. Dimana wilayah landas kontinen yang merupakan bagian dasar laut yang merupakan kelanjutan dari daratan sejauh 200 mil dari garis pangkal, jika lebar laut kurang dari 200 mil maka landas kontinen

negara pantai tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 4-6 UNCLOS 1982.

- c). Gosong Niger adalah Landas Kontinen yang berada diantara Negara yang berdampingan dalam ketentuan konvensi, hendaknya cara penentuannya dilakukan dengan sistem jarak yang sama (*equidistance principle*), dimana titik dasar diketahui melalui ketentuan garis air rendah (*low waterline*) disebut pula sebagai titik terdekat dari garis pangkal tempat mengukur lebar laut teritorial dari masing-masing negara, hingga menghasilkan suatu garis yang mempunyai jarak yang sama antara kedua negara dari titik terdekat garis pangkal tempat mengukur lebar laut teritorial masing-masing negara. Maka akan didapatkan batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Gosong Niger. Dalam Persetujuan Indonesia dan Malaysia 1969 menghasilkan $\pm 2/3$ landas kontinen Gosong Niger masuk dalam wilayah Indonesia dan $\pm 1/3$ masuk dalam wilayah Malaysia. Jika penentuan garis batas tersebut berdasarkan rekomendasi Pasal 15 UNCLOS mengenai prinsip kolom air (*water colum*) dengan pengukuran jarak yang sama (*equidistance*), maka Indonesia akan mendapatkan tambahan wilayah $\pm 24.000 \text{ km}^2$. (<http://bappeda.kalbar.go.id/?pilih=lihat&id=92>). Disamping itu perlu diketahui bahwa posisi Gosong Niger hanya berjarak $\pm 5,5$ mil dari garis pangkal, sehingga dapat dikatakan bahwa gosong niger masuk dalam wilayah Indonesia dari garis pangkal air rendah (*low waterline*) yang tidak lebih dari 12 mil.

2. Berdasarkan UNCLOS 1982 penentuan garis batas Landas Kontinen Gosong Niger adalah sebagai berikut:

Dalam ketentuan UNCLOS 1982, mengenai penentuan garis batas landas kontinen tidak jauh berbeda dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1958, dalam ketentuan UNCLOS terdapat penambahan yaitu berupa Petunjuk dari Makamah Internasional dalam upaya penentuan batas-batas landas kontinen yang meliputi ketentuan:

- a) dalam penentuan batas landas kontinen, seharusnya negara yang bersangkutan memperoleh keseluruhan landas kontinennya, yang merupakan kelanjutan natural dari dasar laut wilayahnya untuk menghindarkan agar landas kontinen tidak mengambil daerah-daerah laut pihak-pihak lain.

Gosong Niger merupakan dangkalan berupa gundukan pasir terendam air yang berada diantara Indonesia dan Malaysia, dimana secara umum diatur berdasarkan Persetujuan Indonesia-Malaysia 1969 tentang Garis Batas Landas Kontinen. Dengan adanya perjanjian tersebut maka masing-masing negara baik itu Indonesia maupun Malaysia memiliki hak yang sama atas landas kontinen yang berada di kawasan Gosong Niger. Sehingga perlu ditetapkan ketentuan dan batas yang jelas mengenai garis batas landas kontinen antar kedua negara, agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap eksistensinya dan semua tindakan-tindakan yang dilakukan didalamnya tanpa harus mengurangi atau mengambil alih daerah wilayah negara yang saling berdampingan (*adjacent*).

- b) bila penentuan pembatasan landas kontinen menyebabkan adanya bagian-bagian dasar laut yang dituntut bersama, dasar-dasar laut tersebut harus dibagi-bagi sama rata bagi negara-negara yang bersangkutan, kecuali negara-negara tersebut menerima suatu rezim yurisdiksi penggunaan dan eksploitasi bersama dari sebagian atau keseluruhan daerah-daerah dasar laut yang sama-sama dituntut tersebut.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, bahwa penentuan batas landas kontinen yang membagi kawasan Gosong Niger antara Indonesia-Malaysia, dilakukan dengan melalui perjanjian yang tentunya melahirkan kesepakatan antara kedua negara.

Berdasarkan prinsip yang ditentukan dalam hukum internasional, adanya kesepakatan dalam penentuan garis batas

Gosong Niger tersebut awal mulanya harus melihat kondisi khusus kedua negara yang berupa *adjacent state* (negara yang berdampingan). Berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional penentuan garis batas landas kontinen Gosong Niger didasarkan pada prinsip jarak yang sama (*equidistance principal*) dengan penentuan titik dasar berdasarkan garis air rendah (*low water line*) atau diukur dari garis pangkal (*reference point*), dengan titik dasar yang berada di Tanjung Datuk Kalimantan Barat. Dengan ditetapkannya garis batas landas kontinen kedua negara berhak atas segala hak-hak mengenai landas kontinen yang diatur dalam UNCLOS1982.

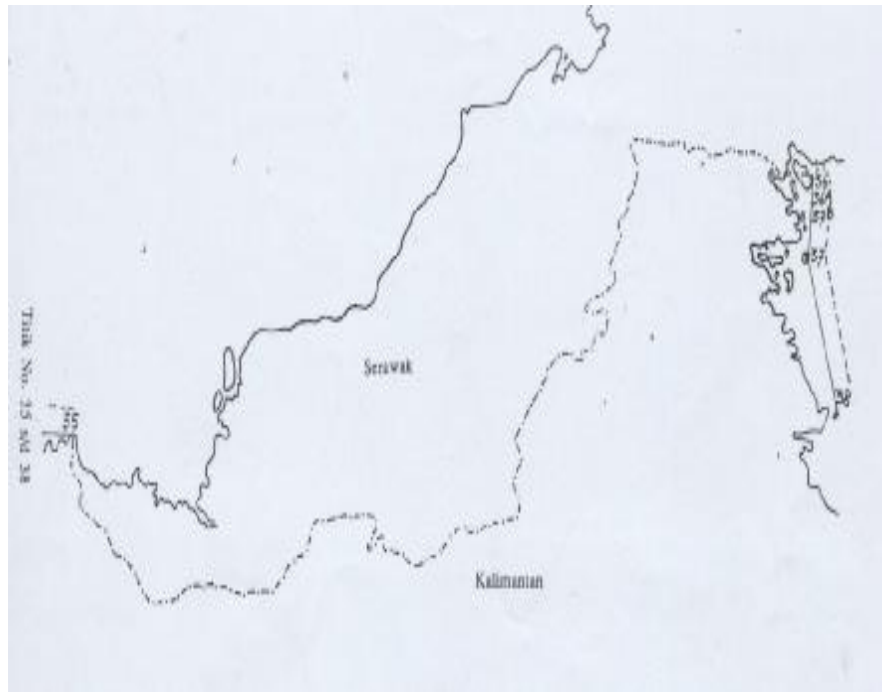
- c) Makamah juga mengingatkan supaya diperhatikan semua keadaan-keadaan khusus yang disebut oleh konvensi 1958. Yang dimaksud dengan keadaan khusus menurut Makamah Internasional adalah:
 - i) Konfigurasi umum dari pantai dengan segala ciri-ciri khususnya atau ciri-ciri luar biasa yang ada.
 - ii) Kesatuan sumber alam yang menunjukkan struktur fisik dan geologi dari daerah landas kontinen yang akan dibagi.
 - iii) Hubungan yang wajar antara luasnya landas kontinen yang berada di bawah kedaulatan negara pantai dan panjangnya pantai negara tersebut diukur menurut jurusan umum pantai. (Boer Mauna, 2005:355-356)

Keadaan khusus Gosong Niger, keadaan fisiknya berupa dangkalan berupa gundukan pasir yang terendam air sedalam 4-12 (empat-duabelas) meter. Lokasi berada diantara Indonesia-Malaysia yang saling berdampingan. Gosong Niger memiliki luas $\pm 50 \text{ km}^2$, berdasarkan ketentuan konvensi 1982 tidak memenuhi kriteria sebagai Pulau dan mengingat perjanjian sebelumnya mengenai batas darat 1891 tidak mengatur batas wilayah laut sehingga ketentuan Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen 1969 yang berlaku, namun dalam ketentuan ini masih bersifat umum belum secara spesifik

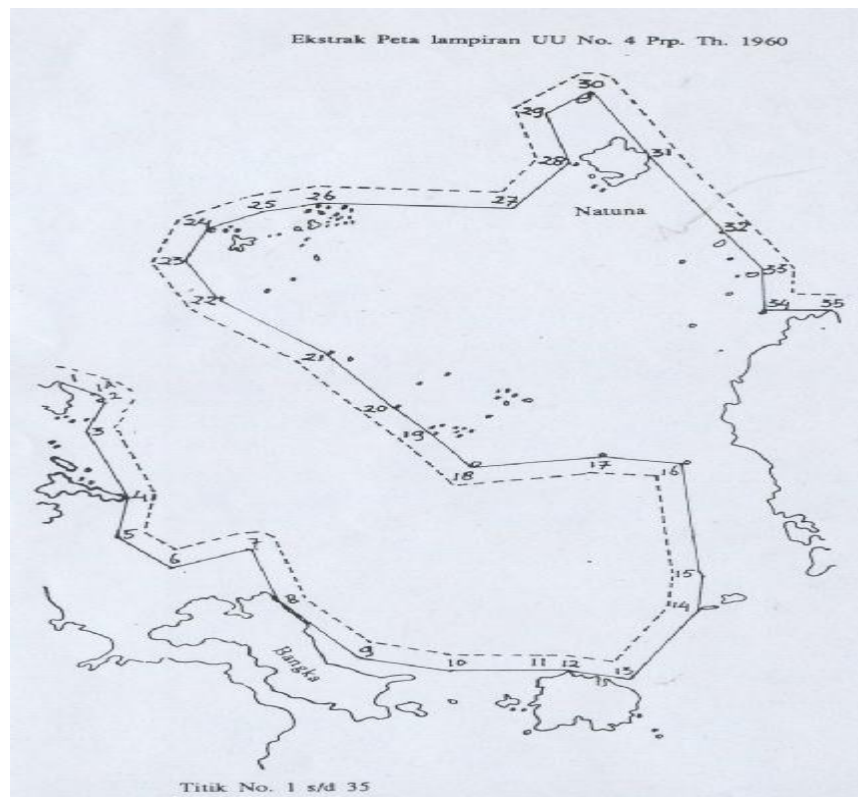
dalam menyebutkan titik-titik dasar yang digunakan untuk patokan, sehingga implikasi terhadap keberadaan Gosong Niger hampir tidak terdeteksi.

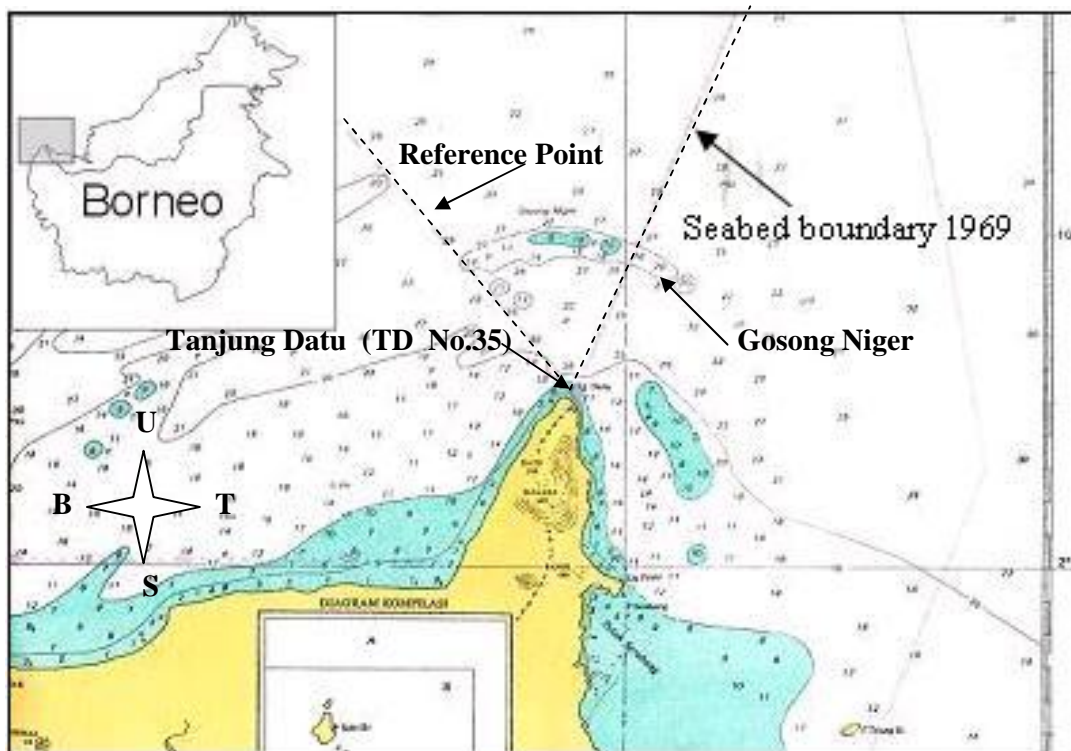
Landas kontinen merupakan kelanjutan daratan yang tentunya adalah Pulau Kalimantan. Sehingga untuk menindak lanjuti pengaturan dalam upaya menjamin kepastian hukum eksistensi Gosong Niger maka pemerintah membuat peraturan baru yaitu PP No. 38 Tahun 2002, tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, titik dasar untuk menentukan Gosong Niger ditetapkan di kawasan Tanjung Datuk Kalimantan Barat dengan nomor titik dasar 35 dengan koordinat titik $02^{\circ}05'10''$ LU dan $109^{\circ}38'43''$ BT, dimana posisi Gosong Niger berada pada koordinat $109^{\circ}40'3,78''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}10'22,9''$ Lintang Utara masih berada dalam kawasan laut teritorial Indonesia. Dalam hal ini walaupun tindakan Pemerintah Indonesia adalah upaya sepihak, namun untuk menjamin kepastian hukum dan eksistensi terhadap keberadaan garis batas landas kontinen Gosong Niger, sangat diharapkan Pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat suatu kesepakatan kembali hingga dicapai suatu persetujuan bersama antara kedua negara terhadap eksistensi garis batas di Gosong Niger yang terkait pula akan kepentingan eksploitasi, eksplorasi dan semua kepentingan lain yang bersifat ekonomis terhadap Gosong Niger.

Gambar 9 : Titik Dasar No. 35 Tanjung Datuk Kalimantan Barat



Gambar 10: Titik Dasar No. 1-35





Gambar 11: Titik Dasar, Garis Pangkal, dan Garis Batas Landas Kontinen Gosong Niger

B. Tindakan Pemerintah dalam Mewujudkan Eksistensi Gosong Niger sebagai Landas Kontinen

Wilayah bagi suatu negara sangatlah penting selain sebagai salah satu unsur negara, wilayah juga mampu menjadi identitas dari suatu negara, yang menunjukkan dimana negara itu berada, dan merupakan tempat berpijak untuk meletakkan kedaulatan pemerintah. Selain itu wilayah negara merupakan suatu aset bagi negara yang memberikan segala potensi dan sumberdaya alam yang mampu mendukung terselenggaranya pemerintahan, dan merupakan tempat dimana melakukan kegiatan ekonomis untuk mencukupi segala kebutuhan. Pentingnya eksistensi suatu wilayah bagi suatu negara memang patut untuk dipertahankan dan tidak boleh dipandang sebelah mata begitu saja, baik itu darat, laut maupun udara.

Beberapa bagian wilayah laut khususnya Landas Kontinen merupakan bagian wilayah yang memerlukan pengaturan khusus baik dalam hal yurisdiksinya (penetapan garis batasnya), pengelolaan, eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan yang terkandung didalamnya.

Sebagai pertimbangan terhadap pelaksanaan asas efektif terhadap suatu wilayah negara, sehingga perlu adanya beberapa tindakan dalam suatu wilayah negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan eksistensinya.

Peranan Pemerintah untuk mewujudkan eksistensi terhadap suatu wilayah negara sangatlah besar pengaruhnya, karena kedudukan pemerintah dalam suatu negara adalah sebagai Pemerintah tersebut mempunyai kekuasaan yang efektif atas seluruh penduduk dan wilayah negaranya. Yang dimaksud dengan efektif ialah pemerintah tersebut mempunyai kapasitas riil untuk melaksanakan semua fungsi kenegaraan termasuk memelihara keamanan dan tata tertib di dalam negeri dan pelaksanaan sebagai komitmen diluar Negeri. (Boer Mauna, 2005:22)

Merupakan pertimbangan terhadap hak dan kewajiban negara terkait dengan wilayah, berdasarkan ketentuan Konvensi Montevideo 1933. sehingga dengan keberadaan Gosong Niger sebagai Landas Kontinen perlu ditegaskan oleh pemerintah dengan beberapa tindakan yang meliputi :

1. Penegakan Hukum

Perwujudan penegakan dan menjamin kepastian hukum, berdasarkan prinsip keadilan (*equity principal*). Dalam hukum internasional prinsip keadilan seperti halnya tercantum dalam Piagam PBB, dimana untuk menjamin perdamaian maka diterapkanlah prinsip keadilan bagi semua negara.

Sejalan pula dengan ketentuan hukum laut internasional, dimana prinsip keadilan juga menjadi dasar dalam rangka penegakan hukum dan menjamin kepastian hukum di laut. Untuk menjamin kepastian hukum di laut memerlukan peranan besar dari pemerintah sebagai salah satu elemen dalam suatu negara yang memiliki kedaulatan, dimana kedaulatan itu sendiri mencakup kewenangan dari pemerintah untuk membuat kebijakan, mengatur atau membuat suatu ketentuan atau peraturan dalam wilayah negaranya. Dalam membuat peraturan, merupakan salah satu kewajiban bagi negara untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional serta melaksanakan dengan iktikad baik seperti yang telah tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933.

Dalam kompetensi suatu negara terhadap wilayah laut, khususnya landas kontinen, maka berdasarkan hak berdaulat untuk tujuan ekplorasi dan eksploitasi sumber kekayaannya merupakan hak eksklusif dari negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan yang terkandung didalamnya, dimana tidak ada satupun negara maupun individu dapat melakukan kegiatan pada landas kontinen tanpa persetujuan tegas dari negara pantai. (Group II M Yamin dkk, 1994:9)

Sebagai salah satu wilayah laut yang merupakan kelanjutan dari daratan hingga sejauh 200 dalam Landas Kontinen terkandung berbagai sumber kekayaan alam sehingga perludanya suatu ketentuan untuk mengatur dalam rangka pemanfaatannya, pemeliharaan, ekplorasi, dan eksploitasi. Disamping itu agar peraturan yang di buat oleh pemerintah dapat diberlakukan secara efisien tentunya harus ada penentuan batas lingkup berlakunya.

Dari beberapa argument tersebut maka yang dimaksud dengan tindakan yuridis adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bidang hukum, terhadap eksistensi Gosong Niger sebagai salah satu wilayah yang berupa landas kontinen Indonesia yaitu:

(1) Penyesuaian dan perubahan peraturan

Berdasarkan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya aktifitas di wilayah laut, terkait dengan peraturan yang ada hendaknya harus dapat disesuaikan dengan dinamika yang berkembang dari waktu-kewaktu. Sehingga perlu adanya penyesuaian antara peraturan yang sama-sama mengatur objek yang sama. Sehingga dapat menciptakan keselarasan dan terciptanya harmonisasi antara peraturan yang berlaku, dalam rangka menciptakan tujuan dasar yang dicapai yaitu menjamin kepastian hukum. Penyesuaian peraturan dapat dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan sebagai dasar, misalnya UNCLOS 1982 yang menjadi dasar pengaturan Hukum Laut Internasional menjadi dasar implementasi peraturan berikutnya, pembuatan peraturan baru, maupun pengubahan peraturan disesuaikan berdasarkan ketentuan Hukum Laut

Internasional. Disamping penyesuaian terhadap hukum internasional, penyesuaian dalam suatu wilayah negara disesuaikan dengan hukum nasional yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan hukum internasional maupun hukum nasional.

Adanya penyesuaian dan perubahan peraturan, diterapkan pula pada ketentuan Landas Kontinen yang diharapkan dapat menyempurnakan ketentuan sebelumnya. Pengaturan Garis Batas Landas Kontinen antara Indonesia-Malaysia di atur dalam Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia 1969, dimana Gosong Niger dianggap telah masuk pada titik koordinat timur LCS 21-25, namun ketentuan klaim laut antara Indonesia dan Malaysia pada dasarnya masih tumpang tindih (*overlapping*). Menyangkut Gosong Niger tentunya perlu dicermati adanya aktifitas lintas batasnya. sehingga dengan penyempurnaan ketentuan baru sebagai tindak lanjut terhadap UU No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, maka di Undangan PP No.38 Tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Dengan ketentuan baru tersebut titik dasar nomor 35 di Tanjung Datuk telah terdaftar dengan koordinat 02°05' 10" LU dan 109° 38'43"BT, dimana titik dasar ini digunakan sebagai patokan untuk menentukan garis dasar dan garis batas landas kontinen di Gosong Niger. Dimana Gosong Niger berada pada koordinat 109° 40' 3,78" Bujur Timur dan 2° 10' 22,9" Lintang Utara masih berada dalam kawasan laut teritorial Indonesia.

(2) Pembuatan dan Penetapan Peraturan Landas Kontinen Gosong Niger

Dalam hukum internasional UNCLOS 1982, merupakan ketentuan mengenai hukum laut yang berdasarkan kesepakatan negara-negara dan berlaku secara universal. Untuk menindak lanjuti UNCLOS 1982 perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik, seperti halnya Indonesia-Malaysia dalam kepentingan sebagai negara yang berdampingan (*adjacent state*) terkait dengan salah satu wilayah laut yaitu landas kontinen, mengingat bahwa dalam hukum laut internasional juga telah diatur ketentuan mengenai landas kontinen sebelum UNCLOS 1982, yaitu Konvensi Jenewa 1958 tentang landas kontinen, dimana di Indonesia dan Malaysia

telah memiliki perjanjian yaitu *continental shelf agreement 1969* (Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen RI-Malaysia 1969) yang diratifikasi dengan Keppres No.89/1969 tanggal 5 November 1969 dan *territorial seas agreement 1970* (perjanjian garis batas laut wilayah, diratifikasi dengan UU No. 2/1971 tanggal 10 Maret 1971) namun masih mempunyai beberapa hal yang perlu disepakati lebih lanjut yaitu mengenai batas kedaulatan (laut territorial), batas yurisdiksi zona tambahan dan batas landas kontinen serta ZEE (zona ekonomi eksklusif). (KPH Rusdiharjo, kuliah Mahasiswa Angkatan VI Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak 2006:2)

Namun dilain pihak keberadaan garis batas Gosong Niger dalam ketentuan Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia 1969, tidak dijelaskan secara spesifik. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum terhadap status Gosong Niger sebagai bagian landas kontinen Indonesia, perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang eksistensinya, baik itu terkait dengan delimitasinya, mengenai upaya pelestarian, eksplorasi dan eksploitasi. Disamping itu adanya peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya maritim diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih peraturan penguasaan dan pemanfaatannya, sehingga dapat mewujudkan peran dan keselarasan semua komponen baik pemerintah, swasta, masyarakat, badan legislatif, eksekutif, dan partai politik. (Elly R Sudibjo, Lokakarya Hukum Laut Internasional 2004:2).

Tujuan dibuatnya suatu peraturan terhadap Landas Kontinen adalah untuk menjamin kepastian hukum terhadap eksistensi Gosong Niger sebagai bagian landas kontinen yang berada di antara wilayah Indonesia dan Malaysia. Selain itu agar tidak terjadi *overlapping* (tumpang tindih) dengan peraturan lain, yang sudah ada sebelumnya, mengingat status Tanjung Datuk dimana awal mulanya terjadi perbedaan penafsiran antara kedua Negara Indonesia-malaysia, terhadap Perjanjian yang telah ada sebelumnya yaitu Perjanjian Inggris-Belanda 1891, dalam hal penetapan batas-batas didasarkan pada *watersheed*, namun pada kenyataannya tidak ada fenomena alamiah maupun buatan (*artificial*) yang dapat menunjukkan

dasar adanya *watershed* itu sendiri. Posisi Tanjung Datuk ini mendatangkan pengaruh pula terhadap penentuan garis dan titik pangkal, yang tentunya memiliki pengaruh terhadap penentuan wilayah laut yang termasuk Gosong Niger di dalamnya. Dengan ketentuan 1891 hanya berlaku untuk wilayah darat, sehingga pada wilayah laut berlaku ketentuan Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia 1969.

Perlu ditegaskannya penyebutan Gosong Niger yang berupa gundukan pasir di perairan dangkal, dan perlu diperjelas pula statusnya sebagai bagian dari landas kontinen, dan bukanlah suatu pulau atau karang kering yang dapat dijadikan sebagai titik pangkal terluar. Berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 121, yang dimaksud pulau adalah, daerah daratan yang dikelilingi oleh air, dan yang ada di permukaan air pada air pasang, sedangkan Pulau Kecil menurut PP Nomor 78 tahun 2005, adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km², memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal pulau sesuai ketentuan hukum internasional dan nasional. Pulau kecil terluar berarti pulau terdepan yang berhubungan langsung dengan negara lain. Jika meninjau luas Gosong Niger hanya berkisar 50 km² tidak masuk kriteria ukuran luas minimum suatu pulau dan secara fisik keadaan Gosong Niger selalu terendam air dengan kedalaman 4-12 (empat-duabelas) meter.

Walaupun Gosong Niger bukanlah suatu pulau atau sebagai penempatan titik pangkal (*base point*), namun tidak menutup kemungkinan bagi perlindungan hukum dan melakukan upaya efektif yang dapat mewujudkan dan menunjukkan eksistensinya.

Dalam peraturan yang terbaru yaitu PP No.38 Tahun 2002, menjelaskan mengenai ketentuan penetapan daftar geografis titik-titik garis pangkal kepulauan RI. Dalam peraturan ini titik dasar untuk menentukan keberadaan garis batas landas kontinen di Gosong Niger berdasarkan pada TD No.35 dengan koordinat titik 02°05' 10" LU dan 109° 38'43"BT, berdasarkan prinsip garis air rendah (*low waterline*).

Sebagai bagian dari Landas Kontinen Gosong Niger tentunya memiliki kekayaan alam dan mineral di dalamnya, sehingga memungkinkan terdapat kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengeksplor, dan mengeksploitasi, serta kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pelestarian lingkungan di Gosong Niger. Sehingga dengan banyaknya kegiatan tersebut maka diperlukan adanya ketentuan untuk mengatur pemanfaatan dan penggunaan Gosong Niger.

(3) Publikasi, Notifikasi dan Pendepositan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 47 ayat 9 UNCLOS 1982, mengharuskan diadakannya suatu pendepositan peraturan perundang-undangan nasional kepada Sekjend PBB, tentang daftar koordinat garis pangkal negara pantai untuk penarikan laut wilayah atau GPLN bagi negara kepulauan. Hal ini diperlukan dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang wilayah nasional suatu negara pantai kepada dunia internasional. (Arif Havas Oengroseno, Lokakarya Hukum Laut Internasional 2004:11)

UNCLOS 1982 mewajibkan negara untuk melakukan publikasi terhadap ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peta-peta atau daftar Koordinat Geografis titik-titik dari garis-garis pangkal yang juga menunjukkan batas terluar atau garis batas dari berbagai zona maritime;
- 2) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perairan pedalaman, laut teritorial, selat, dan perairan kepulauan; pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati; pencegahan, pengurangan, dan pengawasan pencemaran laut; serta pelaksanaan riset ilmiah kelautan;
- 3) Penerbitan peta-peta yang menunjukkan alur-alur laut, skema pemisahan lalu lintas, dan bila perlu rute penerbangan di laut teritorial, selat, perairan kepulauan;
- 4) Penerbitan peta-peta atau notifikasi tentang zona-zona keamanan, dan batas-batas zona khusus di ZEE;

- 5) Publikasi tentang bahaya terhadap navigasi dan penerbangan (apabila perlu) di laut territorial, selat, dan perairan kepulauan;
- 6) Publikasi tentang penagguhan sementara lintas damai.

Selain publikasi berdasarkan UNCLOS 1982 tak kalah pentingnya adalah notifikasi, dapat dilakukan terhadap ketentuan tentang:

- 1) Lokasi kabel dan pipa didasar laut termasuk bila sedang ada kegiatan perbaikan;
 - 2) Pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya; bagian landas kontinen yang sedang ada kegiatan eksplorasi dan eksploitas;
 - 3) Penangguhan dan pengakhiran riset ilmiah kelautan;
 - 4) Pelaksanaan riset ilmiah kelautan kepada negara tak berpantai yang berbatasan;
 - 5) Kecelakaan dilaut dan akibatnya (maritime casualties);
 - 6) Kemungkinan timbulnya atau kerusakan yang nyata dilingkungan laut.
- (Etty R Agoes, Lokakarya Hukum Laut Internasional 2004:7-8)

Setiap peraturan yang telah dibuat agar dapat berlaku mengikat, maka harus diundangkan dalam Lembar Negara dan Tambahan Lembar Negara. Dengan demikian undang-undang tersebut berlaku mengikat dan bersifat *fictie* (semua dianggap tahu). Agar peraturan yang telah berlaku dapat diakses oleh semua kalangan maka harus dilakukan upaya publikasi melalui media cetak maupun elektronik. Berdasarkan perkembangan IPTEK melalui situs-situs tertentu, misalnya di Indonesia publikasi dan notifikasi perundang-undangan dapat diakses pada situs Sekretariat Negara, Departemen Hukum dan Ham, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan situs-situs lain yang mempublikasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Segala yang menyangkut pembuatan, dan perubahan peraturan yang menyangkut Gosong Niger maka harus di publikasikan, notifikasi atau didepositkan, sehingga dapat menjamin kepastian hukumnya sekaligus sebagai upaya perwujudan eksistensi Gosong Niger.

(4) Pengawasan

Pengawasan terhadap berlakunya peraturan, merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh negara, dimana terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka pengawasan wilayah laut yaitu meliputi:

- a) Ukuran yang akan diterapkan tentang kesesuaian dengan peraturan undang-undang dalam pelaksanaan berbagai macam hak lintas oleh kapal-kapal asing;
- b) Pelaksanaan yurisdiksi pidana dan perdata terhadap kapal asing yang sedang berada di wilayah perairan negara;
- c) Penahanan atas kapal;
- d) Tindakan untuk menghukum mencegah pelanggaran dibidang kepabean, imigrasi, dan saniter;
- e) Pelaksanaan yurisdiksi terhadap pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya dilaut; pengelolaan dan sumber daya hayati; kegiatan-kegiatan dilandas kontinen; pemasangan dan perbaikan kabel dan pipa didasar laut; serta pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran kapal. (Etty R Agoes, Lokakarya Hukum Laut Internasional 2004:8)

Pengawasan dilakukan untuk memantau efektifitas dari peraturan, serta sebagai upaya antisipasi dan represif terjadinya pelanggaran-pelanggaran diwilayah laut.

Gosong Niger sebagai salah satu wilayah laut yang berupa landas kontinen, memiliki hak yang sama berdasarkan ketentuan hak dan kewajibannya, untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di dalamnya, sehingga perlu adanya pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan seluanya atas wilayahnya. Pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku.

Selain pengawasan terhadap imlementasi peraturan yang menjamin kepastian hukum Gosong Niger, namun perlu juga pengawasan terhadap hal-hal tertentu yang terkait dengan pencemaran lingkungan yang

diakibatkan oleh segala macam kegiatan yang terkait dengan eksplorasi, eksploitasi dan kegiatan lain yang dilakukan di wilayah landas kontinen Gosong Niger dan sekitarnya.

2. Perundingan Bilateral

Perjanjian yang diadakan oleh suatu negara sebagai subyek hukum internasional, bertujuan untuk menggariskan hak dan kewajiban yang ditimbulkan serta akibat yang berpengaruh bagi para pihak pembuat perjanjian baik yang bersifat Bilateral maupun Multilateral. (Joko Subagyo, 1993:18). Dalam upaya mewujudkan eksistensi gosong niger maka suatu perjanjian atau perundingan bilateral dapat pula dilakukan misalnya membahas mengenai:

a) Penentuan Status Gosong Niger

Penentuan status Gosong Niger, dapat menjadi dasar untuk menentukan eksistensi gosong sebagai salah satu bagian dari wilayah laut yaitu landas kontinen Indonesia yang berada di ujung barat Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Dimana penentuan Gosong Niger sebagai landas kontinen, harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh ketentuan hukum laut internasional. Oleh karena itu perundingan bilateral antara kedua negara penting untuk dilaksanakan.

b) Penetapan garis batas landas kontinen di gosong niger,

Penetapan garis batas harus melalui kesepakatan kedua negara, agar dapat menjamin kepastian hukum kedua belah pihak, selain itu untuk mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari.

c) Mengenai hak dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan di sekitar Gosong Niger,

Dalam wilayah gosong niger tentunya memiliki potensi tertentu yang mendorong adanya beragam kegiatan baik untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, sehingga perlu adanya kesepakatan dalam hal-hal tertentu agar hak dan kewajiban masing-masing negara terjamin dalam rangka perlindungan hukum gosong niger. mengingat sifat dari landas kontinen yaitu *ipso facto* dan ketentuan pasal 79 ayat 4, bahwa negara pantai tidak

boleh menghalangi negara lain yang meletakkan kabel maupun pipa yang melintasi landas kontinen, namun jika melalui landas kontinen wilayah teritorial sehingga menjadi hak negara pantai mengajukan persyaratan khusus dan membuat peraturan. sehingga dalam hal ini dibutuhkan adanya suatu perundingan yang dilakukan secara bilateral oleh kedua negara.

Melalui perundingan tersebut diharapkan dapat menciptakan konsensus kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu Indonesia-Malaysia, dalam kaitanya dengan landas kontinen Gosong niger.

3. Menetapkan dan Menegaskan Garis Batas Landas Kontinen di Gosong Niger.

Seperti yang telah diulas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa penentuan batas Landas Kontinen Gosong Niger berdasarkan pada ketentuan Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen RI-Malaysia 1969. Pentingnya penetapan batas landas kontinen sama dengan tujuan pembuatan peraturan, yaitu untuk menjamin kepastian hukum terhadap eksistensi Gosong Niger, serta menjamin hak dan kewajiban yang ada di wilayah landas kontinen Gosong Niger bagi masing-masing negara.

Ketentuan dan prosedur yuridis yang digunakan untuk menentukan Garis Batas Landas Kontinen Gosong Niger, tidak lepas dari ketentuan hukum internasional baik yang berasal dari ketentuan UNCLOS 1982 maupun Konvensi Jenewa 1958 tentang landas kontinen.

Garis Batas Gosong Niger ditentukan titik dasar berdasarkan prinsip garis air rendah (*low waterline*) di Tanjung Datuk dengan TD No.35, dari titik dasar tersebut digunakan untuk menentukan titik landasan (*reference point*). Menetapkan garis batas Gosong Niger berdasarkan prinsip jarak yang sama (*equidistance principle*) dari titik landasan (*reference point*) untuk menentukan garis batas terluar, tempat mengukur lebar laut teritorial dari masing-masing pihak, hingga menghasilkan suatu garis yang mempunyai jarak yang sama dari titik terdekat garis pangkal tempat mengukur lebar laut teritorial masing-masing negara. Pertemuan dari jarak yang sama antara garis air rendah Indonesia-Malaysia menghasilkan garis yang memotong gosong

niger yang ditarik dari garis pangkal. Garis perpotongan itulah yang menjadi garis batas Landas kontinen Indonesia dengan Malaysia.

Disamping itu secara umum terkait dengan masalah perbatasan secara umum pemerintah perlu juga merealisasikan program utama untuk meminimalisir permasalahan tata batas negara, diantaranya adalah:

- a) Program penyelesaian permasalahan garis batas melalui jalur Diplomasi;
- b) Program inventarisasi dan penataan kembali patok-patok perbatasan;
- c) Program pembangunan dan pemeliharaan rambu-rambu batas laut (mercu suar) di pulau-pulau terluar dan patok batas di darat.
- d) Program pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) pada jalur-jalur lintas batas tradisional. (KPH Rusdihardjo, Kuliah Mahasiswa Angkatan VI Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak 2006:7-8).

4. Pemetaan Gosong Niger

Untuk memperjelas letak atau lokasi suatu tempat, maka di perlukan adanya peta. Pasal 6 UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, menggantikan UU No.4 prp tahun 1960, menyatakan bahwa garis-garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya, atau dapat pula dibuat daftar titik koordinat geografis yang secara jelas merinci datum geodetikny.(Etty R Agus, Lokakarya Hukum Laut Internasional 2004:14).

Dalam Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen RI-Malaysia 1969, dalam daftar koordinat titik, titik dasar dan koordinat titik Gosong Niger belum tercantum, sehingga perlu adanya ketentuan baru yang dapat menegaskan koordinat dan titik dasar Gosong Niger hingga dapat ditampilkan dengan jelas pada peta. Dalam peta laut No. 420 yang diterbitkan oleh dinas oseanografi TNI AL, tidak di temukan bentukan alamiah Gosong Niger sebagai Pulau, namun yang nampak digambarkan dengan warna biru muda, dimana peta ini dibuat tahun 1992 dan belum diperbaharui. Sehingga untuk menjamin eksistensi Gosong Niger perlu adanya penentuan koordinat titik,

pembaharuan, dan pembuatan peta yang dapat memperjelas dan mempertegas tampilan Gosong Niger pada peta. Dalam PP No.38 Tahun 2002 telah ditegaskan bahwa penentuan titik dasar (TD) No.35 pada koordinat 02°05'10" LU dan 109°38'43" BT berdasarkan garis air rendah (*low waterline*), dimana titik ini digunakan sebagai patokan untuk menentukan garis batas landas kontinen Gosong Niger.

5. Demarkasi Gosong Niger

Pemberian tanda yang menunjukkan simbol kedaulatan suatu negara adalah sangat penting sebagai pendukung untuk menunjukkan eksistensi suatu wilayah negara. Simbol-simbol kedaulatan tersebut dapat berupa, patok batas negara, penancapan bendera, atau pembangunan mercusuar. TNI akan memasang mercusuar terapung diatas Gosong Niger.(http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=249783&kat_id=43). Untuk menunjukkan eksistensi Gosong Niger realisasi rencana tersebut pemerintah telah meletakkan pelampung suar di atas gosong niger dan di bagian titik pangkal yang ada di Tanjung Datu dibangun mercusuar yang mempunyai ketinggian 40 (empat puluh) meter, dimana lokasi pembangunan berjarak \pm 15 meter dari suar sebelumnya yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda. Disamping itu direncanakan pula pembangunan 2 (dua) unit rumah jaga, sarana dan prasarana, seperti solar sell, radar, dan CCTV di Tanjung Datu. (Kebijakan Pemerintah terhadap Gosong Niger RI-Malaysia, Depdagri)

6. Melakukan Kegiatan yang Terkait dengan Hak-hak di Wilayah Landas Kontinen Gosong Niger.

Landas Kontinen memiliki sumber daya alam dan mineral yang melimpah, sehingga memungkinkan adanya banyak kegiatan misalnya eksplorasi, eksploitasi, riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dsb. Terkait erat dengan hak-hak negara pantai yang muncul pada landas kontinen adalah berupa hak:

- a) Hak berdaulat untuk mengeksplorasi landas kontinen dan mengeksploitasi sumber daya alamnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, hak berdaulat dari negara pantai atas landas kontinen adalah untuk maksud mengeksplorasi

landas kontinen yaitu sumber daya alam (*natural resources*) yang terkandung didalamnya. Dengan adanya hak berdaulat sebagai hak eksklusif negara pantai untuk melakukan mengeksploitasi gosong niger.

- b) Hak untuk memasang kabel-kabel dan pipa saluran, menjadi yurisdiksi negara pantai atas kabel dan pipa yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, pengoprasian pulau buatan (*artificial island*), dan instalasi lainnya yang dipasang pada landas kontinen (Pasal 79 ayat 4 Konvensi Hukum Laut PBB 1982). Sebaliknya negara pantai juga tidak boleh menghalang-halangi negara lain yang memasang kabel, instalasi lainnya dalam wilayah landas kontinen selama tidak memasuki kontinen teritorialnya.

Gosong Niger berdasarkan ketentuan penetapan garis batas berada diantara wilayah Indonesia dan Malaysia. Menjadi yurisdiksi Indonesia terhadap kegiatan peletakan kabel dan pipa yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, pengoprasian pulau buatan (*artificial island*), dan instalasi lainnya yang dipasang pada landas kontinen Indonesia, namun juga tidak boleh menghalang-halangi negara lain yang meletakan kabel, pipa ataupun instalasi lainnya, sebagai wujud dari asas *ipso facto*, landas kontinen dimiliki oleh semua negara (*every state*). Berbeda dengan peletakan kabel, pipa, dan instalasi lainnya yang melintasi landas kontinen wilayah teritorial, maka hak negara pantai yaitu Indonesia untuk menetapkan pengaturan atau persyaratan.

- c) Hak yang berhubungan dengan pencemaran atau polusi, secara implisit hak negara pantai pada landas kontinen yaitu, hak untuk mengatur pencegahan, pengurangan, dan pengawasan atas polusi yang bersumber dari kabel-kabel dan pipa saluran tersebut, memasuki wilayah teritorial negara pantai atau tidak, atau hanya melalui landas kontinen saja. Hal ini dihubungkan dengan adanya aktifitas eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen, namun disisi lain negara pantai juga tidak boleh

menghalang-halangi aktifitas tersebut. (Pasal 79 ayat 2 Konvensi Hukum Laut PBB 1982).

Setiap kegiatan dan aktifitas tentunya mendatangkan akibat. Terkait dengan semua aktifitas eksplorasi, dan eksploitasi tak dapat dipungkiri lagi sekecil apaun bentuk kegiatannya, memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan lingkungan. Jika terjadi ketidak seimbangan maka tidak salah lagi menandakan bahwa lingkungan tersebut telah tercemar.

- d) Hak membangun pulau buatan, instalasi-instalasi dan struktur-struktur pada atau di atas landas kontinen, Menurut ketentuan Pasal 60 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, menyatakan bahwa untuk membangun pulau buatan, instalasi-instalasi, dan struktur yang terkait erat dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dari landas kontinen itu sendiri. Ketentuan Pasal 60 konvensi ini berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan Pasal 80 konvensi, dimana pembangunan instalasi tidak hanya berlaku pada kawasan landas kontinen pada zona ekonomi eksklusif, namun juga landas kontinen laut lepas berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang landas kontinen.
- e) Hak memberikan wewenang melakukan pengeboran pada landas kontinen, Ditegaskan dalam ketentuan pasal 81, negara pantai memiliki hak eksklusif (*exclusive right*) untuk memberikan wewenang pengeboran pada landas kontinennya untuk berbagai keperluan, selain itu juga ada hak negara pantai untuk melakukan pengeboran dalam rangka mengeksplorasi dan mengeksploitasi melalui terowongan (*tunnelling*). Hak melakukan pengeboran harus didahului dengan pengakuan oleh negara pantai atas segala aktifitas pengeboran dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi yang berlangsung pada landas kontinen tersebut seperti yang ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 85 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

- f) Hak untuk menetapkan zona keselamatan (*safety zone*), Dalam ketentuan Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 Pasal 5 ayat 2 dan 3, ditegaskan bahwa negara pantai berhak menetapkan zona keselamatan (*safety zone*) sejauh radius 500 meter disekeliling pulau buatan, instalasi, dan struktur yang telah dibangun. Dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Pasal 60 ayat 4,5, dan 6 mengenai hak negara untuk menetapkan zona keselamatan, berkenaan dengan hak negara pantai pada zona ekonomi eksklusifnya. Keterkaitan tersebut menyebabkan penentuan zona keselamatan meliputi permukaan perairan laut di sekitarnya dan perairan laut di bawah permukaannya hingga sampai pada landas kontinen itu sendiri.

Disamping tindakan-tindakan yang ditentukan oleh konvensi, adapun yang sama pentingnya sebagaimana perwujudan dari asas efektif terhadap suatu wilayah, yaitu melibatkan penduduk sekitar perbatasan untuk berperanserta dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomis misalnya dengan pengembangan perikanan. Dengan catatan pemerintah perlu memberi fasilitas yang memadai bagi para nelayan tradisional misalnya dengan memberikan penyuluhan atau sosialisai kepada masyarakat setempat mengenai pentingnya kawasan perbatasan dimana dalam khususnya dalam hal ini adalah landas kontinen, serta melengkapi nelayan tradisional dengan alat GPS (*global positioning system*) adalah alat pendeteksi keberadaan garis batas, sehingga bermanfaat untuk menghindari terulangnya pelanggaran batas laut. (Pontianak Post, 2006: 7).

7. Pelaksanaan Kewajiban di Wilayah Landas Kontinen Gosong Niger.

Selain terdapat hak, adapun negara pantai juga memiliki kewajiban yaitu:

- a) Kewajiban untuk menghormati hak-hak negara lain sebagaimana dijamin oleh konvensi, seperti hak negara atau pihak lain untuk memasang kabel-kabel atau pipa-pipa saluran. Negara pantai tidak boleh menghalang-halangi pemasangan atau pemeliharaan kabel-kabel dan pipa pada landas kontinen;

- b) Menghormati kaidah hukum laut internasional yang berlaku pada landas kontinen tersebut, misalnya kewajiban untuk menghormati pelayaran selat yang biasa digunakan pada pelayaran internasional;
- c) Negara pantai menghormati kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara ataupun pihak lain pada landas kontinen berdasarkan ijin dan persetujuannya;
- d) Negara pantai berkewajiban membayar sejumlah pembayaran atau sumbangan kepada International Sea Bed Authority atas eksploitasi yang dilakukan pada landas kontinen diluar 200 mil laut seperti dalam ketantuan Pasal 82 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

8. Pertahanan dan Keamanan

Konsekuensi pengakuan internasional mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk bertanggungjawab menangkal dan mencegah segala ancaman dan gangguan maritim (*maritime security treat*). (Soeharto, Lokakarya Hukum Laut Internasional 2004:1). Pada umumnya aspek keamanan laut merupakan bagian konsekuensi logis yang harus dipenuhi. Namun harus dipahami bahwa aspek keamanan laut memiliki dua sisi yang berkaitan erat yaitu: keamanan nasional negara pantai dan keamanan dalam konteks yang lebih luas. Sehingga secara utuh dapat diartikan dengan terjaminnya kepentingan nasional yang menjadi prioritas utama dan kepentingan internasional sejauh tidak bertentangan dan mengancam kepentingan nasional.

Berdasarkan implementasi UNCLOS 1982 oleh negara pantai meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Legislasi, yang berupa penjabaran konvensi kedalam peraturan perundang undangan nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

- 2) Law enforcement, menjadi tanggungjawab aparat keamanan. (Laksamana TNI AL Bernard Kent Sondakh, Lokakarya Hukum Laut Internasional 2004:9)

Aparat keamanan yang dimaksud adalah TNI AL, yang merupakan komponen utama pertahanan negara di laut sekaligus selaku aparat penegak hukum di laut, yang berkewajiban menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan dilaut, melindungi SDA dilaut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Konsep dasar perwujudan keamanan laut pada hakekatnya terkait dua dimensi yaitu, kedaulatan dan penegakan hukum. Namun tidak semata-mata dalam hal itu saja, tetapi harus ada jaminan keamanan dan bebas dari ancaman dalam rangka penggunaan pemanfaatan laut.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penegakan keamanan laut adalah:

- 1) Gelar operasi.

Pengadaan operasi militer yang didasarkan pada prinsip fleksibilitas yang disesuaikan dengan tingkat gangguan dan ancaman keamanan yang terjadi. Dilaksanakan berwujud konsep *re-grouping* dengan tiga susunan kekuatan yang meliputi: kekuatan pemukul (*striking force*), kekuatan patroli (*patrolling force*), dan kekuatan pendukung (*supporting force*).

- 2) Penentuan area daerah operasi (*area operational coverage*)

- a) Daerah operasi I

Meliputi : Laut Natuna sampai dengan Selat Malaka, Selat Karimata, sampai dengan Selat Sunda (ALKI II)

- b) Daerah operasi II

Meliputi : perairan Barat Sumatera sampai dengan perairan Selatan Jawa Barat.

- c) Daerah operasi III

Meliputi : perairan Selatan dan Utara Pulau Jawa, Laut Sulawesi, Selat Makasar dan perairan Nusa Tenggara Barat (ALKI II)

d) Daerah operasi IV

Meliputi : Laut Halmahera, Laut Flores, Laut Seram, Samudra Hindia/Selatan Nusa Tenggara Timur termasuk laut Maluku, Laut Banda dan Selat Wetar/Selat Ombai (ALKI III)

e) Daerah operasi V

Meliputi : Perairan Utara Papua sampai dengan Laut Arafuru.

Dalam hal ini Gosong Niger termasuk dalam lingkup daerah operasi I yang meliputi wilayah laut Natuna sampai dengan Selat Malaka, Selat Karimata, sampai dengan Selat Sunda (ALKI II). Hal ini dikarenakan posisi Gosong Niger yang berda sebelah barat Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dimana berhubungan dengan perairan kepulauan Natuna.

3) Operasi keamanan laut.

Berdasarkan 2 (dua) macam konsep keamanan dan penegakan hukum yaitu:

a) Konsep Operasi Siaga Tempur

Adalah operasi militer yang dilakukan untuk perang, untuk menghadapi ancaman atau invasi militer potensial maupun nyata terhadap kedaulatan NKRI danseluruh aspek kehidupan nasionalnya, baik dalam skala perang umum (*general war*) maupun perang terbatas (*limited war*).

b) Konsep Operasi Laut Sehari-hari

Operasi militer yang dimplementasikan dalam operasi keamanan laut dan operasi untuk menanggulangi ancaman non militer.

Operasi Militer yang dilakukan pada wilayah Landas Kontinen Gosong Niger, harus memperhatikan aspek-aspek kedudukan landas kontinen dalam ketentuan hukum internasional yang bersifat *ipso facto*, dan hak-hak suatu negara terkait dengan tindakan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Pelaksanaan operasi militer selain berfungsi sebagai pengaman perbatasan negara, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan negara lain selama tidak melanggar ketentuan hukum internasional, terutama dalam hal yang khusus seperti batas-batas landas kontinen.

4) Penyediaan sarana navigasi pelayaran.

Sarana navigasi meliputi perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*) seperti peta navigasi, radar, dan informasi navigasi yang diperlukan dalam pelayaran. Disamping itu untuk mendukung terlaksanannya tugas pengamanan maka TNI AL perlu dilengkapi: Kapal Perang Republik Indonesia (KPRI), Kapal TNI AL (KAL), Pesawat udara (Pesud) TNI AL, dan Pangkalan TNI AL.

5) Kerjasama dengan negara tetangga.

Kerjasama dengan negara tetangga dalam bentuk patroli bersama secara bilateral, ataupun triparteral, seperti yang telah dilaksanakan oleh Malaysia, Singapura, Philipina, Australia, dan India.

Melakukan kerjasama dalam hal pengamanan laut dapat mempererat silaturahmi dengan negara tetangga. Pengamanan terhadap gosong niger sebagai landas kontinen tentunya dapat dilakukan dengan kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, yang merupakan negara yang saling bersebelahan, dimana letak Gosong Niger berada diantara keduanya.

6) Melaksanakan pertukaran informasi.

Membangun dan melakukan pertukaran sistem operasi terpadu antar negara terkait masalah keamanan laut. Wajib bagi tiap-tiap negara untuk memberikan informasi dalam hal pengamanan laut, terutama dalam hal yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran. (Laksamana TNI AL Bernard Kent Sondakh, Lokakarya Hukum Laut Internasional 2004:10-14)

Berdasarkan kondisi wilayah Gosong Niger yang berupa dangkalan pasir yang selalu terendam air sedalam 4-12 (empat-duabelas) meter, dengan adanya dangkalan ini jika di sekitarnya tidak terdapat tanda atau rambu-rambu peringatan tentunya dapat membahayakan pelayaran, Oleh karena itu adanya informasi dari negara yang bersangkutan sangatlah diperlukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di kawasan Gosong Niger.

9. Membentuk Lembaga Pengelola Perbatasan

Selama ini perbatasan dianggap sebagai wilayah pertahanan negara, sehingga pandangan ini seringkali pembangunan perbatasan tidak berorientasi pada kegiatan ekonomi. (Pontianak Post, 2006:1). Disisi lain pentingnya penentuan garis batas dikarenakan sengketa biasa terjadi karena dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomis.(Equator, 2006:1), khususnya kawasan landas kontinen ditambah lagi jika di dalamnya terdapat sumber daya alam yang penting bagi manusia. Disamping terarah pada konsentrasi terhadap batas landas kontinen negara, secara umum pemerintah perlu juga melakukan pengelola percepatan pembangunan wilayah perbatasan (*Border Development*), dimana diperlukan kelembagaan yang mantap. Peranan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara sangat kompleks dan urgensinya terhadap integritas negara kesatuan RI, sehingga dalam penanganannya memerlukan multi fungsi dan lintas sektoral yang melibatkan unsur-unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan lembaga-lembaga lain termasuk investor. Oleh karena itu pengembangan wilayah perbatasan, sebagai wilayah yang strategis dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan secara menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, sebab dalam wilayah perbatasan negara

berbagai aspek/kepentingan saling terkait di dalamnya seperti kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideologi, sosial, politik dan berbagai aspek lain.

Untuk memantapkan dan mensinergikan pengelolaan wilayah perbatasan secara lebih terarah, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan maka program-program utama yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain :

- a. Program pembentukan lembaga pengelola Perbatasan Negara yang terkoordinasi dari pusat hingga ke daerah;
- b. Program peningkatan kualitas aparatur pemerintah pusat dan daerah;
- c. Program pengembangan kapasitas organisasi kelembagaan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat;
- d. Program peningkatan kerjasama dan kesepakatan dengan negara tetangga di bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan wilayah perbatasan;
- e. Program sinkronisasi gerak langkah antarsektor baik di pusat dan daerah;
- f. Program pemberian insentif investasi dalam rangka peningkatan aliran investasi masuk;
- g. Program peninjauan kembali kebijakan yang dirasa merugikan dunia usaha dalam rangka memberikan kejelasan hukum dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. (<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=buku+utama+rencana+induk+perbatasan+negara&meta>).

Kelembagaan pemerintah pengelola wilayah perbatasan yang saling bekerjasama berdasarkan kompetensi masing-masing, tentunya dapat mewujudkan tujuan dari pengembangan dan pengelolaan wilayah perbatasan, sehingga jika secara khusus dikaitkan dengan landas kontinen maka pengelolaan dan perlindungan hukum terhadapnya dapat diwujudkan pula. Sudah selayaknya Gosong Niger sebagai bagian landas kontinen yang dikelola, mendapat ketegasan terhadap batas-batas dan perlindungan hukumnya, sebagai wujud eksistensinya yang merupakan bagian landas kontinen Indonesia.

Pengelolaan perbatasan dapat dilakukan dengan membentuk suatu badan pengelolaan perbatasan, yang merupakan lembaga koordinasi dan implementasi pengelolaan perbatasan negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Presiden. Beberapa departemen yang dapat dilibatkan dalam pengelolaan perbatasan diantaranya adalah:

- 1). Departemen Luar Negeri RI
- 2). Departemen Dalam Negeri RI
- 3). Departemen Pertahanan keamanan (TNI/POLRI)
- 4). Departemen Keuangan
- 5). Departemen Pekerjaan Umum
- 6). Departemen Hukum dan HAM
- 7). Departemen Kelautan dan Perikanan
- 8). Departemen Pertambangan dan Energi
- 9). Departemen Pertanian
- 10). Departemen Kehutanan
- 11). Departemen Perhubungan
- 12). Bappenas/BPN
- 13). Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal
- 14). Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati) yang berada di perbatasan. (Ikwanuddin Mawardi, Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara, Lokakarya Pengembangan Wilayah Perbatasan 2006:12-15)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditampilkan dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Gosong Niger berdasarkan Hukum Laut Internasional.

Sebelum menetapkan garis batas Landas Kontinen antara Indonesia-Malaysia, perlu di perhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Indonesia dan Malaysia adalah *adjacent state* (negara yang berdampingan);
- b) Indonesia adalah *archipelagic state* (negara kepulauan), sedangkan Malaysia adalah negara benua;
- c) Keberadaan Gosong Niger tidak lebih dari 12 mil dari garis pangkal, dan sebagai Landas kontinen pun Gosong Niger kurang dari 200 mil, sehingga Gosong Niger merupakan bagian Landas kontinen dan masih berada didalam wilayah Indonesia .
- d) Eksistensi garis batas Gosong Niger berdasarkan pada persetujuan Garis Batas Landas Kontinen atara Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia Tahun 1969, namun ketentuan ini masih terlalu universal dan kurang tegas dan spesifik dalam menentukan batas landas kontinen khususnya di Gosong Niger.

Penentuan garis batas landas kontinen terhadap Gosong Niger:

- (1) Indonesia dan Malaysia harus membuat perjanjian Garis Batas Landas Kontinen di Gosong Niger. Dengan perjanjian bilateral antar negara, yaitu Indonesia-Malaysia, menentukan cara yang digunakan sebagai dasar penentuan garis batas.
- (2) Penentuan garis pangkal, dimana titik dasar ditetapkan di ujung Tanjung Datuk Kalimantan Barat. Dari titik dasar tersebut ditarik garis pangkal yang didasarkan pada ketentuan *low waterline* (garis air

rendah). Penentuan garis pangkal dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Garis Pangkal Normal (*Normal Base Lines*), Dalam keadaan biasa (normal) garis pangkal dipergunakan sebagai titik mula pengukuran bagian laut, dimana garis pangkal normal (*Normal Base Lines*) merupakan garis air surut sepanjang pantai seperti yang ditandai dalam peta skala besar yang diakui secara resmi oleh negara pantai.
 - b. Garis Pangkal Lurus (*Straight Base Line*), Dalam keadaan khusus jika wilayah pada garis pantainya bervariasi dan terputus-putus atau ada suatu rumbai pulau-pulau sepanjang pantai yang dalam hubungannya sangat berdekatan sehingga digunakan cara atau metode garis pangkal lurus (*Straight Base Line*).
 - c. Garis Pangkal Kepulauan (*Archipelagic Base Lines*), Pada suatu negara yang memiliki keadaan sangat khusus yakni hingga memenuhi syarat disebut sebagai negara kepulauan, sehingga dipergunakan metode pengukuran dengan menentukan garis pangkal kepulauan (*Archipelagic Base Lines*).
- (3) Dari garis air rendah (*low waterline*), menentukan garis dasar (*reference point*) untuk memetukan garis pangkal, sehingga dengan metode jarak yang sama (*equidistance principle*) menentukan garis batas landas kontinen di gosong niger yang berada diantara Indonesia-Malaysia yang saling berdampingan. Adapula beberapa cara penentuan garis batas landas kontinen landas kontinen yaitu sebagai berikut:
- a. menerapkan metode garis tengah (*median line*), Metode seperti ini dapat diterapkan pada negara-negara yang kondisi geografinya saling berhadapan (*opposite*)
 - b. metode jarak yang sama (*equidistance principle*) dari titik terdekat dari garis pangkal tempat mengukur lebar laut teritorial dari masing-masing pihak, Penerapan cara ini dapat dilakukan oleh negara yang secara geografi berdampingan (*adjacent*).
 - c. penentuan garis batas landas kontinen dengan cara lain yang dibenarkan berdasarkan keadaan-keadaan khusus (*special*

circumstance). Disempurnakan oleh Makamah Internasional tentang penetapan Garis Batas Landas Kontinen dengan ketentuan yaitu:

- (1) dalam penentuan batas landas kontinen, seharusnya negara yang bersangkutan memperoleh keseluruhan landas kontinennya, yang merupakan kelanjutan natural dari dasar laut wilayahnya untuk menghindarkan agar landas kontinen tidak mengambil daerah-daerah laut pihak-pihak lain.
- (2) bila penentuan pembatasan landas kontinen menyebabkan adanya bagian-bagian dasar laut yang dituntut bersama, dasar-dasar laut tersebut harus dibagi-bagi sama rata bagi negara-negara yang bersangkutan, kecuali negara-negara tersebut menerima suatu rezim yurisdiksi penggunaan dan eksploitasi bersama dari sebagian atau keseluruhan daerah-daerah dasar laut yang sama-sama dituntut tersebut.
- (3) Keadaan khusus yang dalam konvensi 1958 pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas, sehingga Makamah Internasional berdasarkan perkembangan hukum laut UNCLOS 1982, melengkapi dengan beberapa ketentuan yaitu:
 - i. Konfigurasi umum dari pantai dengan segala ciri-ciri khususnya atau ciri-ciri luar biasa yang ada.
 - ii. Kesatuan sumber alam yang menunjukkan struktur fisik dan geologi dari daerah landas kontinen yang akan dibagi.
 - iii. Hubungan yang wajar antara luasnya landas kontinen yang berada di bawah kedaulatan negara pantai dan panjangnya pantai negara tersebut diukur menurut jurusan umum pantai.
- (4) Jarak yang sama antara Indonesia-Malaysia, ditarik dari titik dasar Tanjung Datu, maka dihasilkan Garis Batas Landas Kontinen yang membagi Gosong Niger. Diperkirakan $\pm 2/3$ memasuki wilayah Indonesia selebihnya $\pm 1/3$ wilayah Malaysia. Gosong Niger berada pada Koordinat $109^{\circ} 40' 3,78''$ Bujur Timur dan $2^{\circ} 10' 22,9''$ Lintang Utara, dengan TD No.35 dan titik koordinat $02^{\circ} 05' 10''$ LU dan 109°

38°43'BT, telah tercantum dalam PP No.38 Tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.

2. Tindakan Pemerintah dalam mewujudkan Eksistensi Gosong Niger sebagai Landas Kontinen.

Beberapa tindakan pemerintah yang diwujudkan untuk menunjukkan eksistensi Gosong Niger sebagai landas kontinen adalah sebagai berikut:

- 1) Penegakan dan perlindungan hukum.
 - a) Penyesuaian dan perubahan peraturan
 - b) Pembuatan dan Penetapan Peraturan Landas Kontinen Gosong Niger
 - c) Publikasi, Notifikasi dan Pendepositan peraturan perundang-undangan
 - d) Pengawasan
- 2) Perundingan Bilateral.
- 3) Menetapkan dan Menegaskan Garis Batas Gosong Niger.
- 4) Melakukan Pemetaan terhadap Gosong Niger.
- 5) Demarkasi Gosong Niger.
- 6) Melakukan Kegiatan yang Terkait dengan Hak-hak di Wilayah Landas Kontinen Gosong Niger.
- 7) Melaksanakan Kewajiban di Landas Kontinen Gosong Niger.
- 8) Memperkuat Sistem Pertahanan Keamanan.
- 9) Membentuk Lembaga Pengelola Perbatasan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan:

- 1) Seperti halnya Gosong Niger, Pemerintah terkait terutama DEPLU, DEPdagri, dan DEPHAN perlu mendata Gosong-gosong lain yang tersebar di wilayah Indonesia, khususnya yang terletak dibagian terdepan yang berhubungan langsung dengan negara lain, baik secara *opposite* (berhadapan) maupun *adjacent* (berdampingan). Dari data yang didapatkan segera di buatkan ketentuan yang dapat memberi kepastian hukum, namun juga bagaimana cara untuk pengelolaannya, dan mewujudkan keutuhan wilayah Indonesia, serta pertahanan dan keamanannya .

- 2) Pemerintah dengan instansi, pemerintah setempat, dan departemen terkait dengan masalah kelautan, baik pengembangan, pertahanan, pemeliharaan, dan perlindungan hukum harus saling bekerjasama dan membentuk suatu koordinasi yang difokuskan pada wilayah terluar, misalnya dengan merealisasikan pembentukan lembaga pengelolaan perbatasan. Untuk masalah perbatasan memang bukanlah kewenangan pemerintah daerah, namun dalam era otonomi saat ini tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk ikut berperanserta dalam rangka mewujudkan keutuhan wilayah RI, terutama bagi daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan 10 negara. Peranan serta pemerintah daerah di kawasan perbatasan meliputi bidang ekonomi, sosial, dan budaya atau bidang lain, selain tindakan politik kewilayahan yang terkait dengan perbatasan. Seperti contoh: Pengembangan wisata bahari, Peningkatan mutu pendidikan masyarakat di kawasan wilayah terdepan, Penyediaan sarana dan prasarana bagi nelayan tradisional.
- 3) Berdasarkan perkembangan kepentingan hak dan kewajiban atas wilayah laut, Pemerintah yaitu Departemen Luar Negeri RI yang ditangani oleh bagian *Directorat of Treaties on Political, Security and Teritorial Affairs*, harus membuat perjanjian tidak hanya untuk kawasan Gosong Niger saja namun juga kawasan terdepan yang lain yang berhubungan langsung dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia demi terlaksananya harmonisasi hubungan antar negara dan terjaminnya hak dan kewajiban negara atas wilayah masing-masing. Selain itu Peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang dapat memfasilitasi pengamanan wilayah-wilayah laut terluar yang diserahkan kepada DEPHAN dan POLRI.
- 4) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan, agar dapat secara optimal dalam kaitannya melakukan kegiatan pengelolaan, pengembangan, eksplorasi dan eksploitasi baik di permukaan laut maupun di dasar laut, yang diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan yang bekerjasama dengan Departemen Pertambangan dan Energi dalam upaya teknologi Eksplorasi dan Eksploitasi kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sebagai wujud tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis berikutnya dengan tema penelitian yang serupa, sehingga dapat menyempurnakan penelitian yang telah ada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

- Adi Sumardiman. 1992. *Seri Hukum Indonesia : Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya, Buku 1, Indonesia-Papua New Guinea (disertai implementasi Konvensi Hukum Laut 1982)*. Jakarta : PT Pradya Paramita.
- Albert W Koers.1991. *Konvensi Perserikatan Bangsa Tentang Hukum Laut Suatu Ringkasan*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Bambang Sunggono. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Group II M. Yamin dkk.1994. *Maritime and Marine Law Course*. Jakarta: University of Wollongong Australia
- I Wayan Parthiana. 1992. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- _____.2005. *Landas Kontinen dalam Hukum laut Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Iwan Gayo. 2003. *Buku Pintar Seri Senior*. Jakarta: Pustaka Warga Negara.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- J.G. Starke. 1986. *an Introduction to International Law*. Bandung: Justitia Study Group.
- Joko Subagyo. 1993. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Dimiyati Hartono.1977.*Hukum Laut Internasional Berbagai Aspek Pemagaran Yuridis Kawasan Nusantara Negara Republik Indonesia, Ditinjau Dalam Hubungan Perkembangan Hukum Laut Internasional*. Jakarta:Bhratara Karya Aksara.
- _____.1983. *Hukum Laut Internasional Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara*. Bandung: Binacipta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Jakarta: Binacipta.
- Rebecca M Wallace. 1986. *Hukum Internasional*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali

- Syahmin A K. 1988. *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Tim Penyusun Achmad Jusnadi dkk. 2004. *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antar Negara 2005*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan.
- Tim Penyusun Deddy Koespramoedyo dkk. 2003. *Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputy Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Badan Perencana Pembangunan Nasional.

B. Makalah

- Arif Havas Oengroseno. 2004. *Delimitasi Batas Maritim Dalam Kebijakan Border Diplomacy Indonesia*. Disampaikan dalam Lokakarya Hukum Laut Internasional di Yogyakarta 13-15 Desember 2004.
- Anonim. Tanpa tahun. *Kebijakan Pemerintah terhadap Gosong Niger RI-Malaysia*. Jakarta : Departemen Dalam Negeri RI
- Bernard Kent Sondakh. 2004. *Keamanan Laut dan Tanggungjawab Indonesia Tantangan dan Kendala*. Disampaikan dalam Lokakarya Hukum Laut Internasional di Yogyakarta 13-15 Desember 2004.
- Elly R Sudibjo. 2004. *Kebijakan Nasional Komprehensif di Bidang Maritim*. Disampaikan dalam Lokakarya Hukum Laut Internasional di Yogyakarta 13-15 Desember 2004.
- Etty R Agoes. 2004. *Implementasi Nasional Konvensi Hukum Laut 1982*. Disampaikan dalam Lokakarya Hukum Laut Internasional di Yogyakarta 13-15 Desember 2004.
- KPH Rusdihardjo. 2006. *Hubungan Indonesia Malaysia: Penanganan Masalah Perbatasan dan Perlindungan Hukum WNI/TKI*. Disampaikan dalam kuliah Mahasiswa Angkatan VI Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura di Pontianak 16 September 2006.
- Ikwanuddin Mawardi. 2006. *Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara*. Disampaikan dalam Lokakarya Pembangunan Wilayah Perbatasan di Jakarta 19-21 September 2006.

Rusdi Ridwan. *Batas-batas Maritim NKRI dengan Negara Teangga*. Disampaikan dalam Paparan di Hotel Aston Jakarta 26 Juni 2006.

Soeharto. 2004. *Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut*. Disampaikan dalam Lokakarya Hukum Laut Internasional di Yogyakarta 13-15 Desember 2004.

Vladimir Jares. 2004. *The Outer Limit of Continental Shelf*. Disampaikan dalam Lokakarya Hukum Laut Internasional di Yogyakarta 13-15 Desember 2004.

C. Perundang-undangan

Undang undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 Tentang Sistem Perairan Indonesia.

Undang undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Wilayah Teritorial Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau kecil terluar.

Keputusan Presiden R.I Nomor 89 Tahun 1969 tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang penetapan garis batas landas kontinen Negara 1969.

United Nation Convention on The Law of the Sea 1982 (UNCLOS1982/ Konvensi Hukum Laut Internasional PBB1982).

D. Cyber Media

Alman Helvas Ali. 2006. Indonesia didadak lagi di Gosong Niger. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/18/sh04.html>. (diakses pada tanggal 19 Oktober 2006).

Andi Suhaendi. 2006. Perketat Pengamanan Perbatasan. <http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006110581>. (diakses pada tanggal 19 Oktober 2006).

Anonim . 2006. DPR Minta Instansi Khusus Pulau Terluar, Tanggung jawab tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada TNI. http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=249783&kat_id=43. (diakses pada tanggal 19 Oktober 2006).

_____. 2006. TNI AL Tingkatkan Patroli di Pulau Kecil Wilayah Terluar. <http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006110578>. (diakses pada tanggal 19 Oktober 2006).

- _____. 2006. 2/3 Niger Gosong Milik RI Pembangunan Mercusuar Sangat Mendesak. <http://www.equator-news.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=51548>. (diakses pada tanggal 19 Oktober 2006).
- _____. 2006. Penjelasan Departemen Luar Negeri tentang isu Pulau Gosong. http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=829,2006. (diakses pada tanggal 11 November 2006).
- _____. Tanpa tahun. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara. <http://www.google.co.id/search?hl=id&q=buku+utama+rencana+induk+perbatasan+negara&meta>. (diakses pada tanggal 7 Juni 2007).
- Emmy Kuswandari/Aju. 2006. Pemetaan Gosong Penting Dilakukan. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/19/sh08.html>. (diakses pada tanggal 19 Oktober 2006).
- Dionisius Endy .2006. Gosong Niger dan Wacana Kebijakan PP 78/2005. <http://bappeda.kalbar.go.id/?pilih=lihat&id=92>. (diakses pada tanggal 19 Oktober 2006).

E. Kamus

- Jhon M Echols dan Hassan Sadily. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1996. *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia
- Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Tim Penyusun. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

F. Majalah

- Asmayani Kusrini dan Julkifli Marbun. 2006. Merebut Kedaulatan Laut Dalam. Edisi Khusus Gatra Nomor 8 Tahun XII Di Laut Kita (Belum) Jaya. Halaman: 16-19.

G. Koran

- _____. 2006, 23 Januari. "Bangun Gosong Niger agar tidak jadi Ambalat". *Equator*. Halaman: 1.
- _____. 2006, 23 Januari. Kapal Nelayan Kalbar Lewati Batas. *Pontianak Post*. Halaman: 1.

_____. 2006, 24 Januari. “Tiga Patok Tanjung Datuk Hilang”. *Pontianak Post*. Halaman: 7.

_____. 2006, 24 Januari. “Perbatasan Dianggap Wilayah Pertahanan”. *Pontianak Post*. Halaman:1.

_____.2006, 25 Januari. “Pembatas Sambas Pun Gelisah”. *Equator*. Halaman:1.

_____. 2006, 26 Januari. “2/3 Niger Gosong Milik RI”. *Equator*. Halaman:1

_____. 2006, 26 Januari. Terbiasa Memancing Bersama Nelayan Malaysia. *Pontianak Post*. Halaman 7.

_____. 2006, 27 Januari. “Patroli di Gosong Niger ditingkatkan”. *Pontianak Post*. Halaman:1.

LAMPIRAN

Lampiran : 1

**PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA TENTANG
PENETAPAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN
ANTARA KEDUA NEGARA**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH MALAYSIA,**

Berhasrat untuk memperkuat, ikatan persahabatan yang telah terjalin lama antara kedua Negara, dan

Berhasrat untuk menetapkan garis-garis batas landas kontinen antara kedua Negara,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

1. Batas-batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka dan laut Cina Selatan adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang ditentukan dalam kolom 1 di bawah yang koordinat-koordinatnya ditetapkan dalam kolom 2 dan 3 yang segaris dengan titik-titik tersebut.

A. Di Selat Malaka

(1) Nomor Titik	(2) Garis Bujur Timur	(3) Garis Lintang Utara
1	98°17'.5	05°27'.0
2	98°41'.5	04°55'.7
3	99°43'.6	03°59'.6
4	99°55'.0	03°47'.4
5	101°12'.1	02°41'.5
6	101°46'.5	02°15'.4
7	102°13'.4	01°55'.2
8	102°35'.0	01°41'.2
9	103°03'.9	01°19'.5
10	103°22'.8	01°15'.0

B. Di Laut Cina Selatan (Bagian Barat – Lepas Pantai Timur Malaysia Barat):

(1) Nomor Titik	(2) Garis Bujur Timur	(3) Garis Lintang Utara
11	104°29'.5	01°23'.9
12	104°53'.5	01°38'.0
13	104°05'.2	01°54'.4
14	104°01'.2	02°22'.5
15	104°51'.5	02°55'.2
16	104°46'.5	03°50'.1
17	104°51'.9	04°03'.0
18	105°28'.8	05°04'.7
19	105°47'.1	05°40'.6
20	105°49'.2	06°05'.8

C. Di Laut Cina Selatan (Bagian Timur – Lepas Pantai Serawak):

(1) Nomor Titik	(2) Garis Bujur Timur	(3) Garis Lintang Utara
21	109°38'.8	02°05'.0
22	109°54'.5	03°00'.0
23	110°02'.0	04°40'.0
24	109°59'.0	05°31'.2
25	109°38'.6	06°18'.2

2. Koordinat-koordinat dari titik-titik yang ditetapkan dalam ayat 1 adalah koordinat-koordinat geografi dan garis-garis yang menghubungkannya diperlihatkan di atas peta yang dilampirkan kepada persetujuan ini sebagai Lampiran "A".
3. Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut di laut akan ditentukan dengan suatu cara yang disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua pemerintah.
4. Yang dimaksud dengan "Pejabat-pejabat yang berwenang" tersebut ayat 3 adalah, untuk Indonesia, Direktur Direktorat Hidrografi Angkatan Laut Republik Indonesia, termasuk setiap orang yang dikuasakannya, dan untuk Malaysia, Pengarah Pemetaan Negara, Malaysia, termasuk setiap orang yang dikuasakannya.

Pasal 2

Masing-masing pemerintah dengan ini berjanji akan menjamin bahwa segala langkah yang perlu diambil di dalam negeri untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan ini.

Pasal 3

Persetujuan ini sama sekali tidak akan mempengaruhi persetujuan yang mungkin diadakan di masa depan antara kedua pemerintah berkenaan dengan penetapan garis-garis batas laut wilayah antara kedua Negara.

Pasal 4

Apabila suatu struktur tunggal minyak dan gas bumi melintasi garis lurus yang disebut dalam pasal 1, dan bagian dari struktur tersebut yang terletak di salah satu sisi dari garis-garis tersebut sebahagian atau seluruhnya dapat diusahakan eksploitasinya dari sisi lain dari garis-garis tersebut, maka kedua pemerintah akan berusaha untuk mencapai persetujuan tentang cara-cara yang paling efektif dalam mengusahakan eksploitasi struktur tersebut.

Pasal 5

Setiap perselisihan antara kedua Pemerintah yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.

Pasal 6

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal penukaran Piagam Pengesahannya. Untuk menyaksikannya, kedua pemerintah yang bertindak melalui wakil-wakil mereka yang telah dikuasakan untuk maksud ini, telah menandatangani persetujuan ini. Dibuat dalam rangkap dua di Kuala Lumpur pada tanggal 27 oktober 1969 dalam bahasa Indonesia, Malaysia dan Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pengertian antara naskah-naskah, maka naskah Inggris yang menentukan.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Sumantri
Brojonegoro
Menteri Pertambangan

UNTUK PEMERINTAH
MALAYSIA,

Ttd.

Abdul Kadir bin Jusof
Penguam Negara

Lampiran : 2



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 1969**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMBACA:

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 30 Oktober 1969 Nomor 9863/69/19

MENIMBANG:

- a. bahwa pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur telah berhasil ditandatangani oleh delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia suatu Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan garis batas landas kontinen antara kedua Negara (Agreement between the Government of the Republic of Indonesian and the Government of Malaysia relating to the delimitation of the continental shelves between the two countries);
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan persetujuan bilateral sebagaimana termaksud huruf a di atas;

MENINGAT:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama:

Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan garis batas landas kontinen antara kedua Negara (Agreement between the Government of the Republic of Indonesian and the Government of Malaysia relating to the delimitation of the continental shelves between the two countries)", yang telah ditandatangani oleh delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia di Kualalumpur pada tanggal 27 Oktober 1969.

Kedua:

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 5 Nopember 1969
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd.

Soeharto

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 5 Nopember 1969
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

Alamsyah
Mayor Jenderal TNI

Salinan disampaikan kepada:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
2. Para Menteri;
3. Ketua Bappenas;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman;
8. Direktorat Hukum Departemen Luar Negeri;
9. Direktorat Hidrografi Angkatan Laut Republik Indonesia

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 54

Lampiran : 3

Convention on the Continental Shelf 1958

The States Parties to this Convention

Have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of these articles, the term "continental shelf" is used as referring

(a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit, to where the depth of the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas;

(b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of islands.

Article 2

1. The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources.
2. The rights referred to in paragraph 1 of this article are exclusive in the sense that if the coastal State does not explore the continental shelf or exploit its natural resources, no one may undertake these activities, or make a claim to the continental shelf, without the express consent of the coastal State.
3. The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on occupation, effective or notional, or on any express proclamation.
4. The natural resources referred to in these articles consist of the mineral and other non-living resources of the seabed and subsoil together with living organisms belonging to sedentary species, that is to say, organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

Article 3

The rights of the coastal State over the continental shelf do not affect the legal status of the superjacent waters as high seas, or that of the airspace above those waters.

Article 4

Subject to its right to take reasonable measures for the exploration of the continental shelf and the exploitation of its natural resources, the coastal State may not impede the laying or maintenance of submarine cables or pipe lines on the continental shelf.

Article 5

1. The exploration of the continental shelf and the exploitation of its natural resources must not result in any unjustifiable interference with navigation, fishing or the conservation of the living resources of the sea, nor result in any interference with fundamental oceanographic or other scientific research carried out with the intention of open publication.

2. Subject to the provisions of paragraphs 1 and 6 of this article, the coastal State is entitled to construct and maintain or operate on the continental shelf installations and other devices necessary for its exploration and the exploitation of its natural resources, and to establish safety zones around such installations and devices and to take in those zones measures necessary for their protection.

3. The safety zones referred to in paragraph 2 of this article may extend to a distance of 500 metres around the installations and other devices which have been erected, measured from each point of their outer edge. Ships of all nationalities must respect these safety zones.

4. Such installations and devices, though under the jurisdiction of the coastal State, do not possess the status of islands. They have no territorial sea of their own, and their presence does not affect the delimitation of the territorial sea of the coastal State.

5. Due notice must be given of the construction of any such installations, and permanent means for giving warning of their presence must be maintained. Any installations which are abandoned or disused must be entirely removed.

6. Neither the installations or devices, nor the safety zones around them, may be established where interference may be caused to the use of recognized sea lanes essential to international navigation.

7. The coastal State is obliged to undertake, in the safety zones, all appropriate measures for the protection of the living resources of the sea from harmful agents.

8. The consent of the coastal State shall be obtained in respect of any research concerning the continental shelf and undertaken there. Nevertheless the coastal State shall not normally withhold its consent if the request is submitted by a qualified institution with a view to purely scientific research into the physical or biological characteristics of the continental shelf, subject to the proviso that the coastal State shall have the right, if it so desires, to participate or to be represented in the research, and that in any event the results shall be published.

Article 6

1. Where the same continental shelf is adjacent to the territories of two or more States whose coasts are opposite each other, the boundary of the continental shelf appertaining to such States shall be determined by agreement between them. In the absence of agreement, and unless another boundary line is justified by special circumstances, the boundary is the median line, every point of which is equidistant from the nearest points of the baselines from which the breadth of the territorial sea of each State is measured.

2. Where the same continental shelf is adjacent to the territories of two adjacent States, the boundary of the continental shelf shall be determined by agreement between them. In the absence of agreement, and unless another boundary line is justified by special circumstances, the boundary shall be determined by application of the principle of equidistance from the nearest points of the baselines from which the breadth of the territorial sea of each State is measured.

3. In delimiting the boundaries of the continental shelf, any lines which are drawn in accordance with the principles set out in paragraphs 1 and 2 of this article should be defined with reference to charts and geographical features as they exist at a particular date, and reference should be made to fixed permanent identifiable points on the land.

Article 7

The provisions of these articles shall not prejudice the right of the coastal State to exploit the subsoil by means of tunnelling irrespective of the depth of water above the subsoil.

Article 8

This Convention shall, until 31 October 1958, be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention.

Article 9

This Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 10

This Convention shall be open for accession by any States belonging to any of the categories mentioned in article 8. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 11

1. This Convention shall come into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 12

1. At the time of signature, ratification or accession, any State may make reservations to articles of the Convention other than to articles 1 to 3 inclusive.

2. Any Contracting State making a reservation in accordance with the preceding paragraph may at any time withdraw the reservation by a communication to that effect addressed to the Secretary-General of the United Nations.

Article 13

1. After the expiration of a period of five years from the date on which this Convention shall enter into force, a request for the revision of this Convention may be made at any time by any Contracting Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations.

2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such request.

Article 14

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States Members of the United Nations and the other States referred to in article 8:

- (a) Of signatures to this Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with articles 8, 9 and 10;
- (b) Of the date on which this Convention will come into force, in accordance with article 11;
- (c) Of requests for revision in accordance with article 13;
- (d) Of reservations to this Convention, in accordance with article 12.

Article 15

The original of this Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in article 8.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention. DONE at Geneva, this twenty-ninth day of April one thousand nine hundred and fifty-eight.

Lampiran : 4

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982

PART VI

CONTINENTAL SHELF

Article 76

Definition of the continental shelf

1. The continental shelf of a coastal State comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance.
2. The continental shelf of a coastal State shall not extend beyond the limits provided for in paragraphs 4 to 6.
3. The continental margin comprises the submerged prolongation of the land mass of the coastal State, and consists of the sea-bed and subsoil of the shelf the slope and the rise. It does not include the deep ocean floor with its oceanic ridges or the subsoil thereof.
4.
 - a. For the purposes of this Convention, the coastal State shall establish the outer edge of the continental margin wherever the margin extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, by either:
 - i. a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to the outermost fixed points at each of which the thickness of sedimentary rocks is at least 1 per cent of the shortest distance from such point to the foot of the continental slope; or
 - ii. a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to fixed points not more than 60 nautical miles from the foot of the continental slope.
 - b. In the absence of evidence to the contrary, the foot of the continental slope shall be determined as the point of maximum change in the gradient at its base.
5. The fixed points comprising the line of the outer limits of the continental shelf on the sea-bed, drawn in accordance with paragraph 4 (a)(i) and (ii), either shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles from the 2,500 metre isobath, which is a line connecting the depth of 2,500 metres.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, on submarine ridges, the outer limit of the continental shelf shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. This paragraph does not apply to submarine elevations that are natural components of the continental margin, such as its plateaux, rises, caps, banks and spurs.

7. The coastal State shall delineate the outer limits of its continental shelf, where that shelf extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, by straight lines not exceeding 60 nautical miles in length, connecting fixed points, defined by coordinates of latitude and longitude.

8. Information on the limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured shall be submitted by the coastal State to the Commission on the Limits of the Continental Shelf set up under [Annex II](#) on the basis of equitable geographical representation. The Commission shall make recommendations to coastal States on matters related to the establishment of the outer limits of their continental shelf. The limits of the shelf established by a coastal State on the basis of these recommendations shall be final and binding.

9. The coastal State shall deposit with the Secretary-General of the United Nations charts and relevant information, including geodetic data, permanently describing the outer limits of its continental shelf. The Secretary-General shall give due publicity thereto.

10. The provisions of this article are without prejudice to the question of delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts.

Article 77

Rights of the coastal State over the continental shelf

1. The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources.

2. The rights referred to in paragraph 1 are exclusive in the sense that if the coastal State does not explore the continental shelf or exploit its natural resources, no one may undertake these activities without the express consent of the coastal State.

3. The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on occupation, effective or notional, or on any express proclamation.

4. The natural resources referred to in this Part consist of the mineral and other non-living resources of the sea-bed and subsoil together with living organisms belonging to sedentary species, that is to say, organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the sea-bed or are unable to move except in constant physical contact with the sea-bed or the subsoil.

Article 78

Legal status of the superjacent waters and air space and the rights and freedoms of other States

1. The rights of the coastal State over the continental shelf do not affect the legal status of the superjacent waters or of the air space above those waters.
2. The exercise of the rights of the coastal State over the continental shelf must not infringe or result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other States as provided for in this Convention.

Article 79

Submarine cables and pipelines on the continental shelf

1. All States are entitled to lay submarine cables and pipelines on the continental shelf, in accordance with the provisions of this article.
2. Subject to its right to take reasonable measures for the exploration of the continental shelf, the exploitation of its natural resources and the prevention, reduction and control of pollution from pipelines, the coastal State may not impede the laying or maintenance of such cables or pipelines.
3. The delineation of the course for the laying of such pipelines on the continental shelf is subject to the consent of the coastal State.
4. Nothing in this Part affects the right of the coastal State to establish conditions for cables or pipelines entering its territory or territorial sea, or its jurisdiction over cables and pipelines constructed or used in connection with the exploration of its continental shelf or exploitation of its resources or the operations of artificial islands, installations and structures under its jurisdiction.
5. When laying submarine cables or pipelines, States shall have due regard to cables or pipelines already in position. In particular, possibilities of repairing existing cables or pipelines shall not be prejudiced.

Article 80

Artificial islands, installations and structures on the continental shelf

[Article 60](#) applies mutatis mutandis to artificial islands, installations and structures on the continental shelf.

Article 81

Drilling on the continental shelf

The coastal State shall have the exclusive right to authorize and regulate drilling on the continental shelf for all purposes.

Article 82

Payments and contributions with respect to the exploitation of the continental shelf beyond 200 nautical miles

1. The coastal State shall make payments or contributions in kind in respect of the exploitation of the non-living resources of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.
2. The payments and contributions shall be made annually with respect to all production at a site after the first five years of production at that site. For the sixth year, the rate of payment or contribution shall be 1 per cent of the value or volume of production at the site. The rate shall increase by 1 per cent for each subsequent year until the twelfth year and shall remain at 7 per cent thereafter. Production does not include resources used in connection with exploitation.
3. A developing State which is a net importer of a mineral resource produced from its continental shelf is exempt from making such payments or contributions in respect of that mineral resource.
4. The payments or contributions shall be made through the Authority, which shall distribute them to States Parties to this Convention, on the basis of equitable sharing criteria, taking into account the interests and needs of developing States, particularly the least developed and the land-locked among them.

Article 83

Delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts

1. The delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in [Article 38](#) of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.
2. If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the States concerned shall resort to the procedures provided for in [Part XV](#).
3. Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and co-operation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.
4. Where there is an agreement in force between the States concerned, questions relating to the delimitation of the continental shelf shall be determined in accordance with the provisions of that agreement.

Article 84

Charts and lists of geographical co-ordinates

1. Subject to this Part, the outer limit lines of the continental shelf and the lines of delimitation drawn in accordance with article 83 shall be shown on charts of a scale or

scales adequate for ascertaining their position. Where appropriate, lists of geographical co-ordinates of points, specifying the geodetic datum, may be substituted for such outer limit lines or lines of delimitation.

2. The coastal State shall give due publicity to such charts or lists of graphical co-ordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations and, in the case of those showing the outer limit lines of the continental shelf, with the Secretary-General of the Authority.

Article 85

Tunnelling

This Part does not prejudice the right of the coastal State to exploit the subsoil by means of tunnelling, irrespective of the depth of water above the subsoil.

Lampiran : 5



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1973
TENTANG
LANDAS KONTINEN INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan suatu Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan usaha pemanfaatan kekayaan alam termaksud untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara.

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Tarip Indonesia Stbl. 1873 No. 135 sebagaimana telah dirubah dan ditambah;
- 3. Ordonansi Bea Stbl. 1882 No. 240 sebagaimana telah dirubah dan ditambah;

4. Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1942);
5. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2070);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 276; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2318);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.
- b. Kekayaan alam adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya didasar laut dan/atau di dalam lapisan tanah dibawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis sedinter yaitu organisme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak baik diatas maupun dibawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah dibawahnya.
- c. Eksplorasi dan eksploitasi adalah usaha-usaha pemanfaatan kekayaan alam dilandas kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan yang berlaku dibidang masing-masing.

d. Penyelidikan ilmiah adalah penelitian ilmiah atas kekayaan alam dilandas kontinen.

BAB II

STATUS KEKAYAAN ALAM DILANDAS KONTINEN INDONESIA

Pasal 2

Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara.

Pasal 3

Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.

BAB III

EKSPLORASI, EKSPLOITASI DAN PENYELIDIKAN ILMIAH

Pasal 4

Eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dilandas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibidang masing-masing.

Pasal 5

Penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di Landas Kontinen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

INSTALASI

Pasal 6

(1). Untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini, dapat dibangun, dipelihara dan dipergunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya di Landas Kontinen dan/atau diatasnya.

(2). Untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya tersebut pada ayat(1) pasal ini terhadap gangguan pihak ketiga, Pemerintah dapat menetapkan suatu daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya disekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang terdapat di Landas Kontinen dan/atau diatasnya.

(3). Disamping daerah terlarang tersebut pada ayat (2) pasal ini Pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membakar sauh.

Pasal 7

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang pembangunan, perlindungan dan penggunaan instalasi dan/atau alat-alat termaksud dalam Pasal 6 Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENCEMARAN

Pasal 8

(1). Barang siapa melakukan eksplorasi eksploitasi dan penyelidikan ilmiah sumber-sumber kekayaan lain di landas kontinen Indonesia, diwajibkan mengambil langkah-langkah untuk:

a. Mencegah terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen Indonesia dan udara di atasnya;

b. Mencegah meluasnya pencemaran dalam hal terjadi pencemaran.

(2). Ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang berhubungan dengan pencemaran air laut di landas kontinen Indonesia dan udara di atasnya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pencegahan dan penanggulangannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

YURISDIKSI NEGARA

Pasal 9

(1). Terhadap setiap perbuatan dan peristiwa yang terjadi pada, diatas atau dibawah instalasi-instalasi, alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen dan/atau diatasnya, untuk keperluan eksplorasi dan/atau eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi dan/atau alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang bersangkutan, berlaku hukum dan segala peraturan perundang-undangan Indonesia.

(2). Instalasi-instalasi dan alat-alat di landas kontinen Indonesia yang dipergunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dinyatakan sebagai daerah Pabean Indonesia.

BAB VII

PERLINDUNGAN TERHADAP

KEPENTINGAN-KEPENTINGAN LAIN

Pasal 10

(1). Dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen harus diindahkan dan dilindungi kepentingan-kepentingan:

- a. Pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Perhubungan;
- c. Telekomunikasi dan transmisi listrik dibawah laut;
- d. Perikanan;
- e. Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya;
- f. Cagar alam.

(2). Dalam hal-hal terdapat perselisihan-perselisihan antara kepentingan kepentingan tersebut dalam ayat (1) pasal ini mengenai pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, akan diselesaikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3). Apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah dapat menghentikan untuk sementara waktu pengusahaannya atau dapat mencabut lain usaha yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Kecuali dalam hal tidak diatur secara khusus oleh Undang-undang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) barang siapa tidak mematuhi:

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang ini;
- b. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-undang ini.

Pasal 12

Tindak pidana tersebut dalam Pasal 11 Undang-undang ini adalah kejahatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 6 Januari 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Januari 1973

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

MAYOR JENDERAL TNI.

Sumber: LN 1973/1; TLN NO. 2994

Lampiran : 6



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1996
TENTANG
PERAIRAN INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan kenyataan sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia, Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai negara kepulauan dengan Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 dan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia telah menetapkan wilayah perairan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa bangsa Indonesia telah berhasil memperjuangkan konsepsi hukum negara kepulauan dengan dimuatnya ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut);
- c. bahwa pengaturan hukum negara kepulauan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi tersebut pada huruf b;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, serta untuk memantapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang

Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-undang yang baru;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERAIRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
2. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah di-kelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
3. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
4. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
5. Garis air rendah adalah garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah.
6. Elevasi surut adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi berada di bawah permukaan laut pada waktu air pasang.
7. Teluk adalah suatu lekukan jelas yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan tertutup yang lebih dari sekedar suatu lengkungan pantai

semata-mata, tetapi suatu lekukan tidak merupakan suatu teluk kecuali apabila luasnya adalah seluas atau lebih luas daripada luas setengah lingkaran yang garis tengahnya ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.

8. Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk

transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas

perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

9. Konvensi adalah United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982, sebagaimana telah

diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations

Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Pasal 2

(1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan.

(2) Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau

yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya

merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan

bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

BAB II

WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Pasal 3

(1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan

pedalaman.

(2) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis

pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus

kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

(4) Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah

dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi

darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 4

Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pasal 5

(1) Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan.

(2) Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.

(3) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia.

(4) Panjang garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 100

(seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal

yang mengelilingi kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu

kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut.

(5) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh ditarik dari dan ke

elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang se-cara

permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau

sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat.

(6) Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis air rendah sepanjang pantai.

(7) Garis pangkal lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis lurus yang menghubungkan

titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau

yang terdapat di dekat sepanjang pantai.

Pasal 6

(1) Garis pangkal kepulauan Indonesia yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicantumkan

dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya, atau dapat pula

dibuat daftar titik-titik koordinat geografis yang secara jelas memerinci datum geodetik.

(2) Peta dengan skala atau skala-skala yang memadai yang menggambarkan wilayah perairan Indonesia atau daftar titik-titik koordinat geografis dari garis -garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pemerintah Indonesia mengumumkan sebagaimana mestinya peta dengan skala atau skala-skala yang memadai atau daftar titik-titik koordinat geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta mendepositkan salinan daftar titik-titik koordinat geografis tersebut pada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 7

(1) Di dalam perairan kepulauan, untuk penetapan batas perairan pedalaman, Pemerintah Indonesia dapat menarik garis -garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan.

(2) Perairan pedalaman terdiri atas :

- a. laut pedalaman; dan
- b. perairan darat.

(3) Laut pedalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah.

(4) Perairan darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai.

Pasal 8

Batas luar laut teritorial Indonesia diukur dari garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

(1) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 4, Pemerintah Indonesia menghormati persetujuan dan perjanjian yang ada dengan negara lain yang menyangkut bagian perairan yang merupakan perairan kepulauannya.

(2) Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) termasuk sifat, ruang lingkup, dan daerah berlakunya hak dan kegiatan tersebut, atas permintaan dari salah satu negara yang bersangkutan, harus diatur dengan per-setujuan bilateral.

(3) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh dialihkan atau dibagi kepada negara ketiga atau warga negaranya.

- (4) Kabel telekomunikasi bawah laut yang telah dipasang oleh negara atau badan hukum asing yang melintasi perairan Indonesia tanpa memasuki daratan tetap dihormati.
- (5) Pemerintah Indonesia mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel-kabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) setelah diterima-nya pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai letak dan maksud untuk memperbaiki dan mengganti kabel-kabel tersebut.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya, garis batas laut teritorial antara Indonesia dengan negara tersebut adalah garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik- titik ter-dekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berbeda dengan ketentuan tersebut.

BAB III

HAK LINTAS BAGI KAPAL-KAPAL ASING

Bagian Pertama

Hak Lintas Damai

Pasal 11

- (1) Kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak ber-pantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia.
- (2) Lintas berarti navigasi melalui laut teritorial dan perairan ke-pulauan Indonesia untuk keperluan:
- a. melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pela-buhan di luar perairan pedalaman; atau
 - b. berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.
- (3) Lintas damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terus-menerus, langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan.

Pasal 12

- (1) Lintas dianggap damai apabila tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi dan hukum internasional lainnya.
- (2) Lintas oleh kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan salah satu kegiatan yang dilarang oleh Konvensi dan atau hukum internasional lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lintas damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Indonesia dapat menangguhkan sementara lintas damai segala jenis kapal asing dalam daerah tertentu di laut teritorial atau perairan kepulauan, apabila penangguhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya, termasuk keperluan latihan senjata.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku hanya setelah dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penangguhan sementara sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Apabila diperlukan dengan memperhatikan keselamatan navigasi, Pemerintah Indonesia menetapkan alur laut dan skema pemisah lalu lintas di laut teritorial dan perairan kepulauan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alur laut dan skema pemisah lalu lintas di laut teritorial dan perairan kepulauan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan hak lintas damai di laut teritorial dan perairan kepulauan, kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya diharuskan melakukan navigasi di atas permukaan air dan menunjukkan bendera kebangsaan.

Pasal 16

Kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun, apabila melaksanakan hak lintas damai harus membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian internasional.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kapal dagang, kapal perang dan kapal pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan niaga dan bukan niaga dalam melaksanakan hak lintas damai melalui

perairan Indonesia, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Hak Lintas Alur Laut Kepulauan

Pasal 18

(1) Lintas alur laut kepulauan dalam alur-alur laut yang khusus ditetapkan adalah pelaksanaan hak

pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi dengan cara normal hanya

untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang.

(2) Segala jenis kapal dan pesawat udara negara asing, baik negara pantai maupun negara tak berpantai,

menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui perairan kepulauan Indonesia, antara satu bagian dari

laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara negara asing yang

melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Pemerintah Indonesia menentukan alur laut, termasuk rute penerbangan di atasnya, yang cocok

digunakan untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan oleh kapal dan pesawat udara asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan juga dapat menetapkan skema pemisah lalu lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui alur laut.

(2) Alur laut dan rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan suatu

rangkaian garis sumbu yang bersam-bungan mulai dari tempat masuk rute hingga tempat ke luar

melalui perairan kepulauan dan laut teritorial yang berhimpitan dengannya.

(3) Apabila diperlukan, setelah diadakan pengumuman sebagaimana mestinya, alur laut dan skema

pemisah lalu lintas yang telah ditetapkan sebelumnya dapat diganti dengan alur laut dan skema pemisah

lalu lintas lainnya.

(4) Dalam menentukan atau mengganti alur laut atau skema pemisah lalu lintas, Pemerintah Indonesia

harus mengajukan usul kepada organisasi internasional yang berwenang untuk mencapai kesepakatan bersama.

(5) Pemerintah menentukan sumbu-sumbu alur laut dan skema pemisah lalu lintas dan menetapkan

pada peta-peta yang diumumkan.

(6) Kapal asing yang melakukan lintas alur laut kepulauan harus mematuhi alur-alur laut dan skema

pemisah lalu lintas yang telah ditetapkan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur laut dan skema pemisah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Hak Lintas Transit

Pasal 20

(1) Semua kapal dan pesawat udara asing mempunyai kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata

untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin melalui laut teritorial

Indonesia di selat antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut

lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

(2) Hak lintas transit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Apabila diperlukan dengan memperhatikan keselamatan navigasi, Pemerintah Indonesia dapat

menetapkan alur laut dan skema pemisah lalu lintas untuk pelayaran di lintas transit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alur laut dan skema pemisah lalu lintas transit

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Hak Akses dan Komunikasi

Pasal 22

(1) Apabila suatu bagian dari perairan kepulauan Indonesia terletak di antara dua bagian wilayah suatu

negara tetangga yang langsung berdampingan, Indonesia menghormati hak-hak yang ada dan kepentingan-

kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara yang bersangkutan di perairan tersebut melalui suatu perjanjian bilateral.

(2) Pemerintah Indonesia menghormati pemasangan kabel laut dan mengizinkan pemeliharaan dan

penggantian kabel yang sudah ada dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana mestinya.

BAB IV
PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, PERLINDUNGAN,
DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN PERAIRAN INDONESIA

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional.
- (2) Administrasi dan yurisdiksi, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB V
PENEGAKAN KEDAULATAN DAN HUKUM
DI PERAIRAN INDONESIA

Pasal 24

- (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Selama Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum ditetapkan, maka pada Undang-undang ini dilampirkan peta ilustratif dengan skala atau skala-skala yang menggambarkan

wilayah perairan Indonesia atau daftar titik-titik koordinat geografis dari garis -garis pangkal kepulauan Indonesia.

(2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia tetap berlaku sepanjang tidak berten-tangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undangundang ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 73

**PENJELASAN
 ATAS
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 1996
 TENTANG
 PERAIRAN INDONESIA
 UMUM**

Berdasarkan fakta sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, secara geografis adalah negara kepulauan. Oleh sebab itu, pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan suatu pernyataan (deklarasi) mengenai Wilayah Perairan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia.

Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia.

Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-undang".

Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 tersebut, mengandung makna bahwa Negara Indonesia adalah satu kesatuan yang meliputi tanah (daratan) dan air (lautan) secara tidak terpisahkan sebagai "Negara Kepulauan".

Negara kepulauan tersebut, kemudian diberikan landasan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi tersebut mengakibatkan suatu perubahan mendasar dalam struktur kewilayahan Negara Republik Indonesia karena laut tidak lagi dianggap sebagai pemisah pulau-pulau, tetapi pemersatu yang menjadikan kese-luruhannya suatu kesatuan yang utuh. Deklarasi yang diumumkan pada saat perjuangan bangsa Indonesia mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia juga banyak menghadapi kesulitan, antara lain karena perairan Indonesia di sekitar Irian Barat masih dianggap sebagai perairan internasional yang bebas dimanfaatkan oleh siapa saja. Selain alasan terhadap ancaman pertahanan-keamanan, tindakan Pemerintah ini didasarkan pula bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang udara di atasnya diperuntukkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Kebijakan tersebut juga ingin memberikan bentuk nyata kepada kesatuan dalam keanekaragaman (Bhinneka Tunggal Ika) yang menjadi semboyan bangsa Indonesia.

Baik Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 maupun Undang- undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dilandasi oleh Wawasan Nusantara, yang kemudian sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 ditetapkan sebagai wawasan dalam mencapai pembangunan nasional yang mencakup perwujudan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan.

Sejak diumumkannya Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum negara kepulauan diterima dan diakui masyarakat internasional. Perjuangan tersebut akhirnya telah menghasilkan pengakuan masyarakat internasional secara universal (semesta) yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan (Archipelagic State) dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Perubahan kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan membawa implikasi yang sangat luas tidak saja terhadap kepentingan nasional, tetapi juga terhadap kepentingan internasional di

perairan Indonesia. Pengakuan dunia internasional terhadap asas negara kepulauan sebagai penjelmaan aspirasi bangsa Indonesia, membawa konsekuensi bahwa Indonesia juga harus menghormati hak-hak masyarakat internasional di perairan yang kini menjadi perairan nasional, terutama hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal-kapal asing.

Setelah masyarakat dunia yakin bahwa dengan tindakannya ini Indonesia tidak bermaksud mengurangi hak-hak dunia pelayaran yang sah dan tercapai suatu keseimbangan antara keinginan Indonesia untuk mengamankan keutuhan wilayahnya dan menguasai sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di satu pihak, dan kepentingan dunia pelayaran internasional di pihak lain, asas negara kepulauan ini akhirnya diterima dunia internasional.

Ditinjau dari segi ketatanegaraan, Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 dan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang kemudian diakui oleh dunia internasional dengan dimuatnya asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam BAB IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982.

Ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Konvensi tersebut mengandung berbagai pengembangan dari konsepsi negara kepulauan sebagai-mana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Salah satu pengembangan tersebut adalah dengan diakuinya garis pangkal lurus kepulauan, di samping garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus sebagai cara pengukuran garis pangkal kepulauan Indonesia. Berdasarkan cara pengukuran tersebut, maka dalam wilayah perairan Indonesia terdapat lebih kurang 17.508 pulau yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, alasan yang mendorong bangsa Indonesia untuk mencetuskan asas negara kepulauan kemudian mengundangkannya, sampai saat ini masih tetap relevan. Akan tetapi dengan berkembangnya berbagai kepentingan dan kegiatan di perairan Indonesia, maka kepentingan nasional dan internasional di perairan Indonesia perlu ditata, diamankan dan dikembangkan secara terarah dan bijaksana sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Selain kepentingan pertahanan-keamanan, persatuan- kesatuan, dan ekonomi, juga perlindungan

lingkungan terhadap bahaya pencemaran dan pelestariannya serta kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan di perairan Indonesia, dirasakan semakin mendesak. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang- undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam BAB IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia menganut asas negara kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi tanggal 13 Desember 1957, dan merupakan penerapan dari Pasal 46 huruf a Konvensi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Sebagai negara kepulauan, untuk menentukan garis pangkal kepulauan Indonesia pada prinsipnya dipergunakan garis pangkal lurus kepulauan.

Ayat (2)

Tidak dapat dipergunakannya garis pangkal lurus kepulauan disebabkan kondisi geografis atau keadaan pantai dan pulau sedemikian rupa, maka di-pergunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dapat tidaknya garis pangkal lurus kepulauan ditarik dari dan ke titik ter-luar pada garis air rendah dari

suatu elevasi surut tergantung dari dua syarat, yaitu:

a. bahwa elevasi surut tersebut terletak pada suatu jarak dari suatu pulau terdekat tidak lebih dari 12 (dua

belas) mil laut; atau

b. pada elevasi surut tersebut terdapat bangunan tetap, misalnya mercu suar.

Ketentuan ini merupakan penerapan dari Pasal 13 dan Pasal 47 ayat (4) Konvensi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan "peta dengan skala atau skala-skala yang memadai" adalah peta laut

(hidrografi) dengan skala besar yang dipilih yang memadai penggunaannya bagi penyelenggaraan

penegakan kedaulatan dan hukum.

- Yang dimaksud dengan "titik-titik koordinat geografis" adalah titik-titik yang ditetapkan dengan

lintang dan bujur geografis.

- Yang dimaksud dengan "datum geodetik" adalah referensi matematik yang dipergunakan sebagai dasar

pengukuran titik-titik pangkal dari garis -garis pangkal wilayah negara kepulauan, yang ditetapkan oleh

Pemerintah Indonesia.

Ayat (2)

Peta dengan skala atau skala-skala yang memadai yang menggambarkan wilayah perairan Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat ini, merupakan peta dengan skala besar yang dibuat oleh

lembaga Pemerintah yang berwenang di bidang pemetaan hidro-oseanografi.

Pembuatan peta di-lakukan

secara berlanjut sesuai dengan perubahan, baik perubahan kondisi geografis yang disebabkan oleh peristiwa

alam maupun perubahan berdasar-kan Konvensi, perjanjian, atau persetujuan dengan negara tetangga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan "kuala" adalah suatu perairan yang berada di mu lut sungai, yang untuk

kepentingan tertentu tunduk pada rezim ter-tentu yang biasanya dipergunakan untuk wilayah

kehidupan ikan.

- Yang dimaksud dengan "anak laut" adalah bagian dari laut yang terletak dalam suatu lekukan yang

jelas yang mengandung perairan yang tertutup dan yang secara historis merupakan bagian dari wilayah

Indonesia.

Ayat (2)

Dalam keadaan tertentu perairan pedalaman dapat terdiri dari laut pedalaman dan perairan darat. Hal ini

terjadi apabila ditarik garis penutup yang perairannya tidak berjatuhan sama dengan garis air rendah.

Misalnya di teluk yang perairannya cukup luas sehingga ada bagian laut terletak pada sisi darat garis penutup. Khusus untuk mulut sungai agak sukar untuk memisahkan bagian air yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari bagian air yang terletak pada garis lurus yang menutup mulut sungai, sehingga seluruh perairan yang terletak di sisi darat dari garis penutup harus dianggap sebagai perairan darat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Meskipun Indonesia mempunyai kedaulatan penuh di perairan kepulauan-nya, tetapi Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati perjanjian-perjanjian atau persetujuan-persetujuan yang dibuat dengan negara- negara lain tentang penggunaan secara sah bagian-bagian dari perairan kepulauan-nya untuk pelaksanaan hak perikanan tradisional, hak akses dan komunikasi negara tetangga yang langsung berdampingan, pemasangan, pemeliharaan, dan penggantian kabel-kabel di dasar laut oleh negara-negara lain.

Ketentuan ini merupakan penerapan dari Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pemberitahuan sebagaimana mestinya" adalah pemberitahuan resmi secara tertulis yang dilakukan oleh pemilik kabel melalui saluran diplomatik kepada Pemerintah Indonesia disertai penjelasan antara lain mengenai letak, perkiraan waktu penyelesaian, peralatan yang digunakan, jenis perbaikan yang dilakukan, dan maksud perbaikan atau penggantian kabel-kabel, sebelum dilakukan kegiatan tersebut.

Pasal 10

Di laut teritorial tertentu, Indonesia tidak dapat menetapkan laut teritorialnya secara penuh sampai dengan jarak 12 (dua belas) mil laut dari garis pangkal lurus kepulauan karena laut teritorialnya tumpang tindih

dengan negara- negara tetangga yang letak pantai-pantainya berhadapan atau berdampingan. Untuk menetapkan garis batas laut teritorial demikian maka akan ditarik garis tengah yang diukur sama jauh

dari titik-titik pangkal pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing diukur.

Apabila terdapat hal-hal khusus seperti adanya hak-hak historis atau adanya kondisi geografis khusus

seperti bentuk pantai atau adanya pulau, maka garis batas laut teritorial tersebut akan ditetapkan melalui

perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menikmati hak lintas damai" adalah hak yang diperuntukkan bagi setiap kapal

asing untuk melaksanakan pelayaran pada lintas damai sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum

internasional lain-nya, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan "lintas" adalah semua pelayaran dari :

a. laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melalui laut teritorial atau perairan kepulauan

Indonesia menuju ke laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa memasuki perairan

pedalaman; atau

b. laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di

tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

Ketentuan ini merupakan penerapan dari Pasal 18 ayat (1) Konvensi.

- Yang dimaksud dengan "navigasi" adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik lain

dengan lancar dan dapat menghindari bahaya dan atau rintangan pelayaran agar dapat menyelesaikan

perja-lanan dengan selamat dan sesuai dengan jadwal

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan yang dilarang oleh Konvensi" adalah kegiatan sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 19 ayat (2) yaitu:

a. setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuh-an wilayah atau kemerdekaan

politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum

internasional sebagai-mana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

b. setiap latihan atau praktek senjata apapun;

- c. setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan negara pantai;
- d. setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai;
- e. peluncuran, pendaratan, atau penerimaan setiap pesawat udara;
- f. peluncuran, pendaratan, atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer;
- g. bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara berten-tangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter negara pantai;
- h. setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang berten-tangan dengan Konvensi;
- i. setiap kegiatan perikanan;
- j. kegiatan riset atau survei;
- k. setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya negara pantai; atau
- l. setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Penegakan kedaulatan dan perlindungan keselamatan negara di laut erat hubungannya dengan pertahanan

dan keamanan negara. Oleh karena itu, kalau perlu, untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara,

Pemerintah Indonesia berwenang untuk menutup sementara waktu bagian-bagian tertentu dari perairan

Indonesia bagi pelayaran kapal-kapal asing.

Ketentuan ini merupakan penerapan dari Pasal 25 ayat (3) Konvensi.

Ayat (2)

Penangguhan demikian harus dilakukan dengan suatu pengumuman yang wajar, misalnya dalam bentuk

pengumuman kepada para pelaut (notice to mariners).

Ketentuan ini merupakan penerapan dari Pasal 25 ayat (3) Konvensi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Agar pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai di perairan Indonesia

dapat dilaksanakan dengan baik, serta untuk men-jamin keselamatan pelayaran, Pemerintah Indonesia

menetapkan alur laut dan skema pemisah lalu lintas di laut teritorial dan perairan kepulauannya. Lintas

damai melalui alur-alur yang ditetapkan khususnya diperlukan bagi lintas kapal tanki, kapal bertenaga

nuklir, dan kapal yang mengangkut muatan yang ber-bahaya atau beracun, termasuk limbah radio aktif.

Alur lintas damai demikian dapat juga ditetapkan untuk kepentingan per-lindungan perikanan, termasuk

budidaya laut dan pelestarian lingkungan laut.

Penetapan alur-alur laut, terutama skema pemisah lalu lintas tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan organisasi internasional yang berwenang terutama dalam masalah teknis keselamatan pelayaran.

Ketentuan ini merupakan penerapan dari Pasal 22 Konvensi.

Pasal 15

Kapal selam yang berlayar di perairan Indonesia diwajibkan untuk berlayar di permukaan air. Apabila

kapal selam asing tersebut tidak memenuhi ketentuan ini maka lintas yang dilakukannya dianggap tidak

damai, dan kapal tersebut diperingatkan untuk segera meninggalkan perairan Indonesia.

Ketentuan ini merupakan penerapan dari Pasal 20 Konvensi.

Pasal 16

Setiap kapal asing bertenaga nuklir dan kapal asing yang mengangkut bahan nuklir atau bahan lain yang

sifatnya berbahaya atau beracun, harus mematuhi aturan-aturan serta standar internasional yang berlaku.

Ketentuan ini merupakan penerapan dari Pasal 23 Konvensi.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Untuk menegaskan kedaulatan, keselamatan perairan dan ruang udara di atasnya, Pemerintah Indonesia

menentukan alur-alur laut kepulauan untuk digunakan oleh kapal asing, dan ruang udara di atasnya untuk

digunakan sebagai rute penerbangan oleh pesawat udara asing. Penetapan alur-alur laut dan rute

penerbangan ini dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dilakukannya lintas yang langsung dan terus menerus,

serta dengan menempuh jarak yang terdekat. Di samping itu, untuk menjamin keselamatan

pelayaran, Pemerintah Indonesia dapat juga menetapkan skema pemisah lalu lintas di alur-alur laut yang

dianggap rawan kecelakaan.

Ketentuan ini merupakan penerapan dari Pasal 53 ayat (1) Konvensi.

Ayat (2)

Berlainan dengan alur laut untuk lintas damai, alur laut kepulauan dan rute penerbangan di atasnya tidak

merupakan suatu alur atau koridor yang secara fisik ada secara nyata melainkan merupakan suatu rute lintas

yang hanya ada apabila sedang digunakan. Alur ini ditentukan dengan menetapkan titik-titik sumbu atau

poros untuk menentukan lebar alur laut kepulauan yang dapat digunakan. Ketentuan ini merupakan

penerapan dari Pasal 53 ayat (5) Konvensi.

Ayat (3)

Untuk menegakkan kedaulatan dan keamanan negara serta dengan memper-hatikan keselamatan pelayaran, apabila diperlukan, Pemerintah Indonesia dapat sewaktu-waktu mengganti alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang telah ditetapkan. Penggantian alur-alur laut dan skema pemisah lalu lintas ini harus diumumkan secara wajar, misalnya dalam bentuk pengumuman kepada para pelaut (notice to mariners).

Ketentuan ini merupakan penerapan dari Pasal 53 ayat (7) Konvensi.

Ayat (4)

Di laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia mempunyai kedaulatan penuh. Oleh karena itu pengajuan usul untuk menentukan atau mengganti alur laut atau skema pemisah dimaksudkan semata-mata untuk meminta pertimbangan dari segi keselamatan pelayaran. Organisasi internasional yang dimaksud adalah International Maritime Organization (IMO).

Ketentuan ini merupakan penerapan dari Pasal 53 ayat (9) Konvensi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Kecuali dengan izin Pemerintah Indonesia, kapal dan pesawat udara asing yang berlayar atau terbang di luar alur-alur laut kepulauan yang telah di-tetapkan dianggap tidak melaksanakan hak lintas alur kepulauan. Apabila kapal tersebut berlayar juga di luar alur-alur laut yang telah ditetapkan untuk lintas damai, dianggap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hak lintas transit dalam Undang-undang ini adalah hak lintas transit di Selat Malaka dan di Selat Singapura.

Yang dimaksud dengan "ketentuan Konvensi" adalah hak lintas transit sebagaimana ditentukan antara lain

dalam Pasal 39 Konvensi yaitu:

- a. lewat dengan cepat melalui atau di atas selat;
- b. menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara Indonesia atau dengan cara apapun yang melanggar asas-asas Hukum Internasional yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- c. menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain transit secara terus-menerus, langsung dan secepat

mungkin dalam cara normal kecuali diperlukan karena "force majeure" atau karena gangguan navigasi;
 dan

d. memenuhi ketentuan internasional tentang :

- 1) keselamatan pelayaran di laut;
- 2) pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal;
- 3) keselamatan penerbangan sesuai peraturan udara yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization); dan
- 4) memonitor frekuensi radio yang ditunjuk.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Hak akses dan komunikasi yang dimaksudkan adalah hak akses dan komunikasi sebagaimana telah diatur

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan atas Treaty between Malaysia and

Indonesia relating to the Legal Regime of the Archipelagic State and Rights of Malaysia in the Teritorial

Sea, Archipelagic Waters and the Territory of Indonesia lying between East and West Malaysia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 7, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3248).

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan nasional yang ber-laku", misalnya Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undangundang

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta

peraturan perundang-undangan dari pelbagai konvensi atau perjanjian internasional lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "administrasi dan yurisdiksi" adalah administrasi dalam rangka pelaksanaan

yurisdiksi yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan masalah lingkungan perairan Indonesia.

Misalnya mengenai penetapan Baku Mutu Lingkungan atau Analisis Dampak Lingkungan yang dilakukan

oleh Kantor Menteri Negara Ling-kungan Hidup, maka mengenai administrasi tersebut antara lain

mengenai persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan Baku Mutu Lingkungan atau Analisis Dampak

Lingkungan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dilakukan untuk memelihara keutuhan wilayah perairan Indonesia serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional di laut. Sanksi atas pelanggaran kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, antara lain dapat dilakukan dengan memperingatkan kapal asing yang bersangkutan untuk segera meninggalkan perairan Indonesia.

Ayat (2)

Yurisdiksi terhadap kapal asing dapat mengenai yurisdiksi pidana, perdata, atau yurisdiksi lainnya.

Mengenai yurisdiksi pidana dan perdata antara lain berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27

dan Pasal 28 Konvensi, hukum internasional lainnya, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27 ayat (1) Konvensi menyatakan bahwa yurisdiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan

di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan

penyidikan yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama lintas demikian,

kecuali :

a. apabila akibat kejahatan itu dirasakan di negara pantai;

b. apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara tersebut atau ketertiban laut

wilayah;

c. apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nahkoda kapal atau oleh wakil diplomatik atau

pejabat konsuler negara bendera; atau

d. apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkoba atau bahan

psikotropika.

Selanjutnya Pasal 28 Konvensi menyatakan bahwa yurisdiksi perdata tidak dapat dilakukan terhadap kapal

asing atau orang yang berada di atasnya, kecuali :

a. hanya apabila berkenaan dengan kewajiban atau tanggung jawab ganti rugi yang diterima atau yang

dipikul oleh kapal itu sendiri dalam mela-kukan atau untuk maksud perjalanannya melalui perairan

Indonesia; atau

b. untuk melaksanakan eksekusi atau penangkapan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan

tujuan atau guna keperluan proses perdata terhadap suatu kapal asing yang berada atau melintasi laut

teritorial atau perairan kepulauan setelah meninggalkan perairan pedalaman. Yang dimaksud dengan

"yurisdiksi lainnya" misalnya yurisdiksi administra-tif.

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai penegakan kedaulatan dan hukum di perairan

Indonesia, namun karena mengenai pene-gakan kedaulatan telah diatur secara tegas dalam Undang-undang

Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988, maka yang perlu

dikoordinasikan hanya mengenai pelaksanaan penegakan hukum.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait, antara lain Tentara Nasional Indonesia Angkatan

Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian,

Departemen Keuangan, dan Departemen Kehakiman, sesuai dengan wewenang masing-masing instansi

tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional.

Pasal 25**Ayat (1)**

Peta ilustratif yang dilampirkan dalam Undang-undang ini mempunyai sifat sementara sampai

ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang peta dengan skala atau skala-skala yang memadai yang

menggambarkan wilayah per-airan Indonesia atau daftar titik-titik koordinat geografis dari garis -garis

pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pelampiran peta ilustratif dalam Undang-undang ini dilakukan dengan per-timbangan bahwa pembuatan

peta dengan skala atau skala-skala yang me-madai atau daftar titik-titik koordinat geografis dari garis -garis

pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memerlukan waktu yang

cukup lama. Oleh sebab itu, demi kepastian hukum dalam Undang-undang ini dilampirkan peta ilustratif

wilayah perairan Indonesia. Dalam hal terdapat batas wilayah tertentu di perairan Indonesia masih dalam

perundingan dengan negara tetangga, maka batas wilayah tertentu tersebut akan diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Pemerintah berdasarkan hasil perundingan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3647

Kutipan : MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996

Lampiran : 7



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2002
TENTANG
DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK
GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang dibentuk untuk menindaklanjuti pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 memuat ketentuan bahwa peta yang menggambarkan wilayah Perairan Indonesia atau Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa di samping peta-peta dengan skala yang memadai yang diperlukan bagi penetapan batas-batas wilayah Perairan Indonesia, Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan yang menggambarkan batas-batas wilayah perairan Indonesia dapat segera ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR
KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL
KEPULAUAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Koordinat Geografis adalah koordinat yang besarnya ditetapkan dalam derajat, menit, dan detik sudut pada sistem sumbu lintang dan bujur geografis.
2. Garis Air Rendah adalah datum hidrografis peta kenavigasian yang ditetapkan pada kedudukan rata-rata Garis Air Rendah perbani.
3. Datum Hidrografis adalah muka surutan peta yang merupakan satu referensi permukaan laut yang dipergunakan untuk melakukan reduksi angka-angka kedalaman laut pada peta kenavigasian.
4. Peta Navigasi adalah peta laut yang disusun untuk kepentingan kenavigasian di laut dengan memperhatikan standar internasional, dalam rangka keselamatan pelayaran.
5. Datum Geodetik adalah referensi matematik untuk menetapkan koordinat geografis titik-titik atau untuk pemetaan hidrografis.
6. Arah umum pantai adalah arah rata-rata yang ditunjukkan oleh arah garis-garis pantai yang memiliki persamaan arah umum di tempat tertentu.
7. Konfigurasi umum kepulauan adalah bentuk tata letak pulau-pulau atau kelompok pulau-pulau terluar atau karang kering terluar dan elevasi surut terluar satu sama lain yang menggambarkan konfigurasi tertentu.
8. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
9. Mil laut adalah mil geografis yang besarnya adalah 1/60 (satu per enam puluh) derajat lintang.

Pasal 2

- (1) Pemerintah menarik Garis Pangkal Kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial.
- (2) Penarikan Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Garis Pangkal Lurus Kepulauan;
 - b. Garis Pangkal Biasa;
 - c. Garis Pangkal Lurus;
 - d. Garis Penutup Teluk;
 - e. e. Garis Penutup Muara Sungai, Terusan dan Kuala; dan
 - f. Garis Penutup pada Pelabuhan.

BAB II

PENARIKAN GARIS PANGKAL KEPULAUAN

Bagian Pertama

Garis Pangkal Lurus Kepulauan

Pasal 3

- (1) Di antara pulau-pulau terluar, dan karang kering terluar kepulauan Indonesia, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah Garis Pangkal Lurus Kepulauan.
- (2) Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, karang kering terluar yang lainnya yang berdampingan.
- (3) Panjang Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3 % (tiga per seratus) dari jumlah keseluruhan Garis Pangkal Lurus Kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut.
- (4) Penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan tidak terlalu jauh menyimpang dari konfigurasi umum kepulauan.
- (5) Penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan titik-titik terluar pada Garis Air Rendah pada setiap elevasi surut yang di atasnya terdapat suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan air atau elevasi surut yang sebagian atau seluruhnya terletak pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari Garis Air Rendah pulau terdekat.

- (6) Perairan yang terletak pada sisi dalam Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perairan Kepulauan dan perairan yang terletak pada sisi luar Garis Pangkal Lurus Kepulauan tersebut adalah Laut Teritorial.

Bagian Kedua Garis Pangkal Biasa

Pasal 4

- (1) Dalam hal bentuk geografis pantai suatu pulau terluar menunjukkan bentuk yang normal, dengan pengecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Garis Pangkal untuk mengukur lebar Laut Teritorial adalah Garis Pangkal Biasa.
- (2) Garis Pangkal Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Garis Air Rendah sepanjang pantai yang ditetapkan berdasarkan Datum Hidrografis yang berlaku.
- (3) Pada pulau terluar yang terletak pada atol atau pada pulau terluar yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, Garis Pangkal untuk mengukur lebar Laut Teritorial adalah Garis Pangkal Biasa berupa Garis Air Rendah pada sisi atol atau karang-karang tersebut yang terjauh ke arah laut.
- (4) Garis Air Rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam Peta Navigasi skala besar yang diterbitkan secara resmi oleh badan pembuat peta navigasi Pemerintah.
- (5) Perairan yang terletak pada sisi dalam Garis Pangkal Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) adalah Perairan Pedalaman dan perairan yang terletak pada sisi luar Garis Pangkal Biasa tersebut adalah Laut Teritorial.

Bagian Ketiga Garis Pangkal Lurus

Pasal 5

- (1) Pada pantai di mana terdapat lekukan pantai yang tajam, garis pangkal untuk mengukur lebar Laut Teritorial adalah Garis Pangkal Lurus.
- (2) Garis Pangkal Lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis lurus yang ditarik antara titik-titik terluar pada Garis Air Rendah yang menonjol dan berseberangan di mulut lekukan pantai tersebut.
- (3) Pada pantai di mana karena terdapat delta atau kondisi alamiah lainnya, garis pantai sangat tidak stabil, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah Garis Pangkal Lurus.

- (4) Garis Pangkal Lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah garis lurus yang ditarik antara titik-titik terluar pada Garis Air Rendah yang menjorok paling jauh ke arah laut pada delta atau kondisi alamiah lainnya tersebut.
- (5) Perairan yang terletak pada sisi dalam Garis Pangkal Lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) adalah perairan pedalaman dan perairan yang terletak pada sisi luar Garis Pangkal Lurus tersebut adalah Laut Teritorial.

Bagian Keempat Garis Penutup Teluk

Pasal 6

- (1) Pada lekukan pantai yang berbentuk teluk, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah Garis Penutup Teluk.
- (2) Garis Penutup Teluk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis lurus yang ditarik antara titik-titik terluar pada Garis Air Rendah yang paling menonjol dan berseberangan pada mulut teluk tersebut.
- (3) Garis Penutup Teluk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat ditarik apabila luas teluk tersebut adalah seluas atau lebih luas dari pada luas ? (satu per dua) lingkaran yang garis tengahnya adalah garis penutup yang ditarik pada mulut teluk tersebut.
- (4) Apabila pada teluk terdapat pulau-pulau yang membentuk lebih dari satu mulut teluk, maka jumlah panjang Garis Penutup Teluk dari berbagai mulut teluk tersebut maksimum adalah 24 (dua puluh empat) mil laut.
- (5) Perairan yang terletak pada sisi dalam Garis Penutup Teluk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perairan Pedalaman dan perairan yang terletak pada sisi luar Garis Penutup Teluk tersebut adalah Laut Teritorial.

Bagian Kelima Garis Penutup Muara Sungai, Terusan dan Kuala

Pasal 7

- (1) Pada Muara Sungai atau Terusan, garis pangkal untuk mengukur lebar Laut Teritorial adalah Garis Lurus sebagai penutup pada muara sungai, atau terusan tersebut.
- (2) Garis lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditarik antara titik terluar pada Garis Air Rendah yang menonjol dan berseberangan.
- (3) Dalam hal Garis Lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diterapkan karena adanya Kuala pada muara sungai, sebagai garis penutup Kuala dipergunakan garis-garis lurus yang menghubungkan antara titik-titik Kuala dengan titik-titik terluar pada Garis Air Rendah tepian muara sungai.

- (4) Perairan yang terletak pada sisi dalam garis penutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) adalah Perairan Pedalaman dan perairan yang terletak pada sisi luar garis penutup tersebut adalah Laut Teritorial.

Bagian Keenam Garis Penutup Pelabuhan

Pasal 8

- (1) Pada daerah pelabuhan, garis pangkal untuk mengukur lebar Laut Teritorial adalah garis-garis lurus sebagai penutup daerah pelabuhan, yang meliputi bangunan permanen terluar yang merupakan bagian integral sistem pelabuhan sebagai bagian dari pantai.
- (2) Garis lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditarik antara titik-titik terluar pada Garis Air Rendah pantai dan titik-titik terluar bangunan permanen terluar yang merupakan bagian integral sistem pelabuhan.
- (3) Perairan yang terletak pada sisi dalam garis-garis penutup daerah pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perairan Pedalaman dan perairan yang terletak pada sisi luar garis penutup tersebut adalah Laut Teritorial.

BAB III DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK TERLUAR GARIS PANGKAL KEPULAUAN

Pasal 9

- (1) Posisi titik terluar garis-garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar Laut Teritorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, ditetapkan dalam Koordinat Geografis disertai dengan referensi Datum Geodetik yang dipergunakan.
- (2) Koordinat Geografis dari titik-titik terluar garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar Laut Teritorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat Geografis sebagai lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Terluar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat posisi geografis titik-titik yang disebutkan dalam Lintang dan Bujur dan disertai dengan keterangan tentang perairan di mana titik tersebut berada, data-data petunjuk di lapangan, jenis garis pangkal antara titik-titik terluar, peta-peta referensi dengan keterangan skalanya dan Datum Geodetik yang dipergunakan.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

Apabila pada bagian Perairan Indonesia, data Koordinat Geografis Titik-titik Terluar belum termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau apabila karena perubahan alam Koordinat Geografis Titik-titik Terluar tersebut dianggap tidak berada pada posisi seperti yang tercantum dalam lampiran tersebut, maka Koordinat Geografis Titik-titik Terluar yang dipergunakan adalah Koordinat Geografis Titik-titik Terluar yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah melakukan pembaharuan secara rutin untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penetapan Koordinat Geografis Titik-titik Terluar untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan, yang dapat digunakan untuk penetapan titik-titik terluar dari Garis Pangkal Kepulauan belum termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka diadakan perubahan dalam lampiran tersebut sesuai dengan data baru.
- (3) Apabila di kemudian hari Koordinat Geografis Titik-titik Terluar, pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan berubah, maka diadakan penyesuaian dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

BAB V PENETAPAN BATAS PERAIRAN PEDALAMAN DALAM PERAIRAN KEPULAUAN

Pasal 12

- (1) Penetapan batas perairan pedalaman dalam perairan kepulauan dilakukan dengan menggunakan Garis Pangkal Biasa, Garis Pangkal Lurus, dan Garis Penutup di Muara Sungai, Terusan, atau Kuala, di Teluk dan di Pelabuhan yang terdapat pada pantai pulau-pulau yang menghadap perairan kepulauan.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan batas Perairan Pedalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di Laut Natuna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3768) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni
2002

PRESIDEN REPUBLIK
IND
ONE
SIA,

ttd
MEGAWATI

SOE
KAR
NOP
UTR
I

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
ttd.
Lambock V. Nahattands

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2002
TANGGAL 28 JUNI 2002

**DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK
GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA**

No. Urut	Perairan Lintang Bujur		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
	Laut :	Natuna	Tg. Berakit	
1	01° 14' 27" U	104° 34' 32" T	Titik Dasar No. TD.001	No. 431
			Pilar Pendekat No. TR.001	1 : 200.000
			Jarak TD.001-TD.001A = 19.19 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Natuna	P. Sentut	
2	01° 02' 52" U	104° 49' 50" T	Titik Dasar No. TD.001A	No. 430, 431
			Pilar Pendekat No. TR.001A	1 : 200.000
			Jarak TD.001A-TD.022 = 88.06 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Natuna	P.Tokong Malang Biru	
3	02° 18' 00" U	105° 35' 47" T	Titik Dasar No. TD.022	No. 430
			Pilar Pendekat No. TR.022	1 : 200.000
			Jarak TD.022-TD.023 = 29.50 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Natuna	P. Damar	
4	02° 44' 29" U	105° 22' 46" T	Titik Dasar No. TD.023	No. 423
			Pilar Pendekat No. TR.023	1 : 200.000
			Jarak TD.023-TD.024 = 24.34 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	

	Laut :	Natuna	P. Mangkai	
5	03° 05' 32" U	105° 35' 00" T	Titik Dasar No. TD.024	No. 423
			Pilar Pendekat No. TR.024	1 : 200.000
			Jarak TD.024-TD.025 = 26.28 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Natuna	P. Tokong Nanas	
6	03° 19' 52" U	105° 57' 04" T	Titik Dasar No. TD.025	No. 423
			Pilar Pendekat No. TR.025	1 : 200.000
			Jarak TD.025-TD.026 = 20.35 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Natuna	P. Tokongbelayar	
7	03° 27' 04" U	106° 16' 08" T	Titik Dasar No. TD.026	No. 423
			Pilar Pendekat No. TR.026	1 : 200.000
			Jarak TD.026-TD.028 = 79.03 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Natuna	P. Tokongboro	
8	04° 04' 01" U	107° 26' 09" T	Titik Dasar No. TD.028	No. 422
			Pilar Pendekat No. TR.028	1 : 200.000
			Jarak TD.028-TD.029 = 32.06 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Natuna	P. Semiun	
9	04° 31' 09" U	107° 43' 17" T	Titik Dasar No. TD.029	No. 421, 422
			Pilar Pendekat No. TR.029	1 : 200.000
			Jarak TD.029-TD.030A = 15.76 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Cina Selatan	P. Sebetul	
10	04° 42' 25" U	107° 54' 20" T	Titik Dasar No. TD.030A	No. 421
			Pilar Pendekat No. TR.030A	1 : 200.000
			Jarak TD.030A-TD.030B = 8.18 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	

	Laut :	Cina Selatan	P. Sekatung	
11	04° 47' 38" U	108° 00' 39" T	Titik Dasar No. TD.030B	No. 421
			Pilar Pendekat No. TR.030A	1 : 200.000
			Antara TD.030B-TD.030D	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Cina Selatan	P. Sekatung	
12	04° 47' 45" U	108° 01' 19" T	Titik Dasar No. TD.030D	No. 421
			Pilar Pendekat No. TR.030	1 : 200.000
			Jarak TD.030D-TD.031 = 52.58 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Cina Selatan	P. Senua	
13	04° 00' 48" U	108° 25' 04" T	Titik Dasar No. TD.031	No. 421
			Pilar Pendekat No. TR.031	1 : 200.000
			Jarak TD.031-TD.032 = 66.03 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Natuna	P. Subi Kecil	
14	03° 01' 51" U	108° 54' 52" T	Titik Dasar No. TD.032	No. 420
			Pilar Pendekat No. TR.032	1 : 200.000
			Jarak TD.032-TD.033 = 27.67 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Natuna	P. Kepala	
15	02° 38' 43" U	109° 10' 04" T	Titik Dasar No. TD.033	No. 420
			Pilar Pendekat No. TR.033	1 : 200.000
			Jarak TD.033-TD.035 = 44.10 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Natuna	Tg. Datu	
16	02° 05' 10" U	109° 38' 43" T	Titik Dasar No. TD.035	No. 420
			Pilar Pendekat No. TR.035	1 : 200.000
			Antara TD.035 -TD.036C	WGS'84
			Kalimantan	

	Laut :	Sulawesi	P. Ligitan	
17	04° 10' 00" U	118° 53' 50" T	Titik Dasar No. TD.036C	No. 489
			Pilar Pendekat No. TR.036C	1 : 200.000
			Antara TD.036C-TD.036B	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Sulawesi	P. Ligitan	
18	04° 08' 03" U	118° 53' 01" T	Titik Dasar No. TD.036B	No. 489
			Pilar Pendekat No. TR.036B	1 : 200.000
			Jarak TD.036B-TD.036A = 15.06 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Sulawesi	P. Sipadan	
19	04° 06' 12" U	118° 38' 02" T	Titik Dasar No. TD.036A	No. 489
			Pilar Pendekat No. TR.036A	1 : 200.000
			Jarak TD.036A-TD.037 = 59.25 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Sulawesi	Tg. Arang	
20	03° 27' 57" U	117° 52' 41" T	Titik Dasar No. TD.037	No. 489
			Pilar Pendekat No. TR.037	1 : 200.000
			Jarak TD.037-TD.039 = 86.04 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Sulawesi	P. Maratua	
21	02° 15' 12" U	118° 38' 41" T	Titik Dasar No. TD.039	No. 488
			Pilar Pendekat No. TR.039	1 : 200.000
			Jarak TD.039-TD.040 = 36.95 nm	WGS'84

			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Sulawesi	P. Sambit	
22	01° 46' 53" U	119° 02' 26" T	Titik Dasar No. TD.040	No. 488
			Pilar Pendekat No. TR.040	1 : 200.000
			Jarak TD.040-TD.043 = 84.61 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Sulawesi	P. Lingian	
23	00° 59' 55" U	120° 12' 50" T	Titik Dasar No. TD.043	No. 487
			Pilar Pendekat No. TR.043	1 : 200.000
			Jarak TD.043-TD.044 = 40.21 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Sulawesi	P-P. Salando	
24	01° 20' 16" U	120° 47' 31" T	Titik Dasar No. TD.044	No. 487
			Pilar Pendekat No. TR.044	1 : 200.000
			Jarak TD.044-TD.044A = 6.05 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Sulawesi	P. Dolangan	
25	01° 22' 40" U	120° 53' 04" T	Titik Dasar No. TD.044A	No. 486, 487
			Pilar Pendekat No. TR.044A	1 : 200.000
			Antara TD.044A-TD.044B	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Sulawesi	P. Dolangan	
26	01° 22' 41" U	120° 53' 07" T	Titik Dasar No. TD.044B	No. 486, 487
			Pilar Pendekat No. TR.044A	1 : 200.000

			Jarak TD.044B-TD.045 = 33.70 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Sulawesi	Tg. Kramat	
27	01° 18' 48" U	121° 26' 36" T	Titik Dasar No. TD.045	No. 486
			Pilar Pendekat No. TR.045	1 : 200.000
			Jarak TD.045-TD.046A = 60.10 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Sulawesi	Kr. Boliogut	
28	01° 08' 17" U	122° 25' 47" T	Titik Dasar No. TD.046A	No. 486
			Pilar Pendekat No. TR.046A	1 : 200.000
			Jarak TD.046A-TD.047 = 41.32 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Sulawesi	P. Bangkit	
29	01° 02' 52" U	123° 06' 45" T	Titik Dasar No. TD.047	No. 485
			Pilar Pendekat No. TR.047	1 : 200.000
			Jarak TD.047-TD.048 = 74.17 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Sulawesi	Laimpangi	
30	01° 09' 29" U	124° 20' 38" T	Titik Dasar No. TD.048	No. 485
			Pilar Pendekat No. TR.048	1 : 200.000
			Jarak TD.048-TD.049A = 43.09 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	

	Laut :	Sulawesi	Manterawu	
31	01° 45' 47" U	124° 43' 51" T	Titik Dasar No. TD.049A	No. 484
			Pilar Pendekat No. TR.049A	1 : 200.000
			Jarak TD.049A-TD.051A = 63.82 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Sulawesi	Makalehi	
32	02° 44' 15" U	125° 09' 28" T	Titik Dasar No. TD.051A	No. 484
			Pilar Pendekat No. TR.051	1 : 200.000
			Jarak TD.051A-TD.053A = 90.35 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Sulawesi	Kawalusu	
33	04° 14' 06" U	125° 18' 59" T	Titik Dasar No. TD.053A	No. 483
			Pilar Pendekat No. TR.053	1 : 200.000
			Jarak TD.053A-TD.054 = 27.01 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Mindanao	P. Kawio	
34	04° 40' 16" U	125° 25' 41" T	Titik Dasar No. TD.054	No. 482
			Pilar Pendekat No. TR.054	1 : 200.000
			Jarak TD.054-TD.055 = 4.98 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Mindanao	P. Marore	
35	04° 44' 14" U	125° 28' 42" T	Titik Dasar No. TD.055	No. 482
			Pilar Pendekat No. TR.055	1 : 200.000
			Antara TD.055-TD.055A	WGS'84

			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Mindanao	P. Marore	
36	04° 44' 25" U	125° 28' 56" T	Titik Dasar No. TD.055A	No. 482
			Pilar Pendekat No. TR.055	1 : 200.000
			Jarak TD.055A-TD.055B = 0.58 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Mindanao	P. Batubawaikang	
37	04° 44' 46" U	125° 29' 24" T	Titik Dasar No. TD.055B	No. 482
			Pilar Pendekat No. TR.055	1 : 200.000
			Jarak TD.055B-TD.056 = 81.75 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Philipina	P. Miangas	
38	05° 34' 02" U	126° 34' 54" T	Titik Dasar No. TD.056	No. 481, 482
			Pilar Pendekat No. TR.056	1 : 200.000
			Antara TD.056-TD.056A	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Philipina	P. Miangas	
39	05° 33' 57" U	126° 35' 29" T	Titik Dasar No. TD.056A	No. 481, 482
			Pilar Pendekat No. TR.056	1 : 200.000
			Jarak TD.056A-TD.057A = 57.91 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Philipina	P. Marampit	
40	04° 46' 18" U	127° 08' 32" T	Titik Dasar No. TD.057A	No. 481
			Pilar Pendekat No. TR.057	1 : 200.000

			Antara TD.057A-TD.057	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Philipina	P. Marampit	
41	04° 45' 39" U	127° 08' 44" T	Titik Dasar No. TD.057	No. 481
			Pilar Pendekat No. TR.057	1 : 200.000
			Jarak TD.057-TD.058A = 7.10 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Philipina	P. Intata	
42	04° 38' 38" U	127° 09' 49" T	Titik Dasar No. TD.058A	No. 481
			Pilar Pendekat No. TR.058A	1 : 200.000
			Antara TD.058A-TD.058	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Philipina	P. Kakarutan	
43	04° 37' 36" U	127° 09' 53" T	Titik Dasar No. TD.058	No. 481
			Pilar Pendekat No. TR.058	1 : 200.000
			Jarak TD.058-TD.059 = 55.63 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Halmahera	Tg. Tampida	
44	03° 45' 13" U	126° 51' 06" T	Titik Dasar No. TD.059	No. 480
			Pilar Pendekat No. TR.059	1 : 200.000
			Jarak TD.059-TD.060 = 122.75 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Halmahera	Tg. Sopi	
45	02° 38' 44" U	128° 34' 27" T	Titik Dasar No. TD.060	No. 479

			Pilar Pendekat No. TR.060	1 : 200.000
			Antara TD.060-TD.061A	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Halmahera	Tg. Gorua	
46	02° 25' 39" U	128° 41' 57" T	Titik Dasar No. TD.061A	No. 479
			Pilar Pendekat No. TR.061	1 : 200.000
			Jarak TD.061A-TD.062 = 50.97 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Halmahera	Tg.Lelai	
47	01° 34' 44" U	128° 44' 14" T	Titik Dasar No. TD.062	No. 479
			Pilar Pendekat No. TR.062	1 : 200.000
			Jarak TD.062-TD.063 = 56.55 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Halmahera	P. Jiew	
48	00° 43' 39" U	129° 08' 30" T	Titik Dasar No. TD.063	No. 478
			Pilar Pendekat No. TR.063	1 : 200.000
			Jarak TD.063-TD.065 = 96.05 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Pasifik	P. Budd	
49	00° 32' 08" U	130° 43' 52" T	Titik Dasar No. TD.065	No. 477
			Pilar Pendekat No. TR.065	1 : 200.000
			Jarak TD.065-TD.066 = 45.91 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Pasifik	P. Fani	

50	01° 05' 20" U	131° 15' 35" T	Titik Dasar No. TD.066	No. 477
			Pilar Pendekat No. TR.066	1 : 200.000
			Antara TD.066-TD.066A	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Samudera :	Pasifik	P. Fani	
51	01° 04' 28" U	131° 16' 49" T	Titik Dasar No. TD.066A	No. 477
			Pilar Pendekat No. TR.066	1 : 200.000
			Jarak TD.066A-TD.070 = 99.81 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Pasifik	P. Miossu	
52	00° 20' 16" S	132° 09' 34" T	Titik Dasar No. TD.070	No. 476
			Pilar Pendekat No. TR.070	1 : 200.000
			Jarak TD.070-TD.070A = 15.77 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Pasifik	Tg. Yamursba	
53	00° 20' 34" S	132° 25' 20" T	Titik Dasar No. TD.070A	No. 476
			Pilar Pendekat No. TR.070A	1 : 200.000
			Jarak TD.070A-TD.071 = 17.72 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Pasifik	Tg. Wasio	
54	00° 21' 42" S	132° 43' 01" T	Titik Dasar No. TD.071	No. 476
			Pilar Pendekat No. TR.071	1 : 200.000
			Jarak TD.071-TD.072 = 122.74 nm	WGS'84

			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Pasifik	P. Fanildo	
55	00° 56' 22" U	134° 17' 44" T	Titik Dasar No. TD.072	No. 475
			Pilar Pendekat No. TR.072	1 : 200.000
			Antara TD.072-TD.072A	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Samudera :	Pasifik	P. Bras	
56	00° 55' 57" U	134° 20' 30" T	Titik Dasar No. TD.072A	No. 475
			Pilar Pendekat No. TR.072	1 : 200.000
			Jarak TD.072A-TD.074 = 97.28 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Pasifik	P. Bepondi	
57	00° 23' 38" S	135° 16' 27" T	Titik Dasar No. TD.074	No. 474
			Pilar Pendekat No. TR.074	1 : 200.000
			Jarak TD.074-TD.076B = 39.41 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Pasifik	Tg. Wasanbari	
58	00° 41' 56" S	135° 51' 21" T	Titik Dasar No. TD.076B	No. 474
			Pilar Pendekat No. TR.077	1 : 200.000
			Jarak TD.076B-TD.077 = 38.90 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Pasifik	Tg. Basari	
59	01° 04' 13" S	136° 23' 14" T	Titik Dasar No. TD.077	No. 473

			Pilar Pendekat No. TR.077	1 : 200.000
			Jarak TD.077-TD.078 = 95.45 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Pasifik	Tg. Narwaku	
60	01° 27' 23" S	137° 55' 51" T	Titik Dasar No. TD.078	No. 472
			Pilar Pendekat No. TR.078	1 : 200.000
			Jarak TD.078-TD.079 = 47.61 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Pasifik	P. Liki	
61	01° 34' 26" S	138° 42' 57" T	Titik Dasar No. TD.079	No. 472
			Pilar Pendekat No. TR.079	1 : 200.000
			Jarak TD.079-TD.080 = 97.06 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Pasifik	Tg. Kamdara	
62	02° 19' 12" S	140° 09' 07" T	Titik Dasar No. TD.080	No. 471
			Pilar Pendekat No. TR.080	1 : 200.000
			Jarak TD.080-TD.080A = 28.56 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Pasifik	Tg. Kelapa	
63	02° 26' 22" S	140° 36' 47" T	Titik Dasar No. TD.080A	No. 471
			Pilar Pendekat No. TR.080A	1 : 200.000
			Jarak TD.080A-TD.081 = 25.22 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Pasifik	Tg. Oinake	

64	02° 36' 16" S	141° 00' 00" T	Titik Dasar No. TD.081	No. 471
			Pilar Pendekat No. TR.081	1 : 200.000
			Antara TD.081-TD.082	WGS'84
			Irian Jaya	
	Laut :	Arafuru	S. Torasi	
65	09° 07' 40" S	141° 01' 10" T	Titik Dasar No. TD.082	No. 470
			Pilar Pendekat No. TR.082	1 : 200.000
			Antara TD.082-TD.082A	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Arafuru	S. Torasi	
66	09° 10' 53" S	140° 59' 07" T	Titik Dasar No. TD.082A	No. 470
			Pilar Pendekat No. TR.082	1 : 200.000
			Antara TD.082A-TD.082B	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Arafuru	S. Torasi	
67	09° 12' 13" S	140° 57' 27" T	Titik Dasar No. TD.082B	No. 470
			Pilar Pendekat No. TR.082	1 : 200.000
			Antara TD.082B-TD.082C	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Arafuru	S. Torasi	
68	09° 12' 00" S	140° 56' 08" T	Titik Dasar No. TD.082C	No. 470
			Pilar Pendekat No. TR.082	1 : 200.000
			Antara TD.082C-TD.083	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Arafuru	S. Blatar	

69	09° 05' 42" S	140° 50' 58" T	Titik Dasar No. TD.083	No. 470
			Pilar Pendekat No. TR.083	1 : 200.000
			Jarak TD.083-TD.085 = 97.35 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Arafuru	Kr. Sametinke	
70	08° 16' 11" S	139° 26' 11" T	Titik Dasar No. TD.085	No. 470
			Pilar Pendekat No. TR.085	1 : 200.000
			Jarak TD.085-TD.086 = 33.00 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Arafuru	Ug. Komoran	
71	08° 26' 09" S	138° 54' 23" T	Titik Dasar No. TD.086	No. 469
			Pilar Pendekat No. TR.086	1 : 200.000
			Jarak TD.086-TD.088A = 74.11 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	Ug. Salah	
72	08° 26' 44" S	137° 39' 28" T	Titik Dasar No. TD.088A	No. 469
			Pilar Pendekat No. TR.088	1 : 200.000
			Antara TD.088A-TD.088E	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Aru	P. Kolepon	
73	08° 12' 49" S	137° 41' 24" T	Titik Dasar No. TD.088E	No. 469
			Pilar Pendekat No. TR.088	1 : 200.000
			Jarak TD.088E-TD.088F = 25.15 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	

	Laut :	Aru	S. Korima	
74	07° 49' 28" S	137° 50' 50" T	Titik Dasar No. TD.088F	No. 469
			Pilar Pendekat No. TR.088	1 : 200.000
			Jarak TD.088F-TD.090 = 93.90 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	S. Cook	
75	06° 21' 31" S	138° 23' 59" T	Titik Dasar No. TD.090	No. 468
			Pilar Pendekat No. TR.090	1 : 200.000
			Jarak TD.090-TD.091 = 30.63 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	Gosong Triton	
76	05° 58' 45" S	138° 03' 22" T	Titik Dasar No. TD.091	No. 467, 468
			Pilar Pendekat No. TR.091	1 : 200.000
			Jarak TD.091-TD.092 = 40.83 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	P. Laag	
77	05° 23' 14" S	137° 43' 07" T	Titik Dasar No. TD.092	No. 467
			Pilar Pendekat No. TR.092	1 : 200.000
			Jarak TD.092-TD.093 = 64.15 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Arafuru	S. Blatar	
69	09° 05' 42" S	140° 50' 58" T	Titik Dasar No. TD.083	No. 470
			Pilar Pendekat No. TR.083	1 : 200.000
			Jarak TD.083-TD.085 = 97.35 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	

	Laut :	Arafuru	Kr. Sametinke	
70	08° 16' 11" S	139° 26' 11" T	Titik Dasar No. TD.085	No. 470
			Pilar Pendekat No. TR.085	1 : 200.000
			Jarak TD.085-TD.086 = 33.00 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Arafuru	Ug. Komoran	
71	08° 26' 09" S	138° 54' 23" T	Titik Dasar No. TD.086	No. 469
			Pilar Pendekat No. TR.086	1 : 200.000
			Jarak TD.086-TD.088A = 74.11 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	Ug. Salah	
72	08° 26' 44" S	137° 39' 28" T	Titik Dasar No. TD.088A	No. 469
			Pilar Pendekat No. TR.088	1 : 200.000
			Antara TD.088A-TD.088E	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Aru	P. Kolepon	
73	08° 12' 49" S	137° 41' 24" T	Titik Dasar No. TD.088E	No. 469
			Pilar Pendekat No. TR.088	1 : 200.000
			Jarak TD.088E-TD.088F = 25.15 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	S. Korima	
74	07° 49' 28" S	137° 50' 50" T	Titik Dasar No. TD.088F	No. 469
			Pilar Pendekat No. TR.088	1 : 200.000

			Jarak TD.088F-TD.090 = 93.90 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	S. Cook	
75	06° 21' 31" S	138° 23' 59" T	Titik Dasar No. TD.090	No. 468
			Pilar Pendekat No. TR.090	1 : 200.000
			Jarak TD.090-TD.091 = 30.63 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	Gosong Triton	
76	05° 58' 45" S	138° 03' 22" T	Titik Dasar No. TD.091	No. 467, 468
			Pilar Pendekat No. TR.091	1 : 200.000
			Jarak TD.091-TD.092 = 40.83 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	P. Laag	
77	05° 23' 14" S	137° 43' 07" T	Titik Dasar No. TD.092	No. 467
			Pilar Pendekat No. TR.092	1 : 200.000
			Jarak TD.092-TD.093 = 64.15 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	Tg. Pohonbatu	
78	04° 54' 24" S	136° 45' 35" T	Titik Dasar No. TD.093	No. 467
			Pilar Pendekat No. TR.093	1 : 200.000
			Jarak TD.093-TD.094 = 41.32 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	Amarapya	
79	04° 38' 41" S	136° 07' 14" T	Titik Dasar No. TD.094	No. 466

			Pilar Pendekat No. TR.094	1 : 200.000
			Jarak TD.094-TD.097A = 96.49 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	P. Ararkula	
80	05° 35' 42" S	134° 49' 05" T	Titik Dasar No. TD.097A	No. 466
			Pilar Pendekat No. TR.097	1 : 200.000
			Jarak TD.097A-TD.098 = 25.02 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	P. Karaweira Br	
81	06° 00' 09" S	134° 54' 26" T	Titik Dasar No. TD.098	No. 465
			Pilar Pendekat No. TR.098	1 : 200.000
			Jarak TD.098-TD.099 = 19.29 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	P. Panambulai	
82	06° 19' 26" S	134° 54' 53" T	Titik Dasar No. TD.099	No. 465
			Pilar Pendekat No. TR.099	1 : 200.000
			Jarak TD.099-TD.099A = 19.95 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	P. Kultubai Utara	
83	06° 38' 50" S	134° 50' 12" T	Titik Dasar No. TD.099A	No. 465
			Pilar Pendekat No. TR.099	1 : 200.000
			Jarak TD.099A-TD.100 = 11.45 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	

	Laut :	Aru	P. Kultubai Selatan	
84	06° 49' 54" S	134° 47' 14" T	Titik Dasar No. TD.100	No. 465
			Pilar Pendekat No. TR.100	1 : 200.000
			Jarak TD.100-TD.100A = 12.62 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	P. Karang	
85	07° 01' 08" S	134° 41' 26" T	Titik Dasar No. TD.100A	No. 465
			Pilar Pendekat No. TR.100A	1 : 200.000
			Antara TD.100A-TD.100B	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Aru	P. Karang	
86	07° 01' 48" S	134° 40' 38" T	Titik Dasar No. TD.100B	No. 465
			Pilar Pendekat No. TR.100B	1 : 200.000
			Jarak TD.100B-TD.101 = 10.25 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	P. Enu	
87	07° 06' 14" S	134° 31' 19" T	Titik Dasar No. TD.101	No. 465
			Pilar Pendekat No. TR.100B	1 : 200.000
			Antara TD.101-TD.101A	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Aru	P. Enu	
88	07° 05' 23" S	134° 28' 18" T	Titik Dasar No. TD.101A	No. 465
			Pilar Pendekat No. TR.100B	1 : 200.000
			Jarak TD.101A-TD.102 = 18.54	WGS'84

			nm	
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	P. Batugoyang	
89	06° 57' 01" S	134° 11' 38" T	Titik Dasar No. TD.102	No. 464, 465
			Pilar Pendekat No. TR.102	1 : 200.000
			Jarak TD.102-TD.103 = 98.34 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	Tg. Weduar	
90	06° 00' 25" S	132° 50' 42" T	Titik Dasar No. TD.103	No. 464
			Pilar Pendekat No. TR.103	1 : 200.000
			Jarak TD.103-TD.104 = 90.19 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	P. Larat	
91	07° 14' 26" S	131° 58' 49" T	Titik Dasar No. TD.104	No. 463
			Pilar Pendekat No. TR.104	1 : 200.000
			Jarak TD.104-TD.105B = 29.55 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Aru	Karang Sarikilmasa	
92	07° 39' 49" S	131° 43' 33" T	Titik Dasar No. TD.105B	No. 463
			Pilar Pendekat No. TR.104	1 : 200.000
			Jarak TD.105B-TD.105 = 34.38 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Timor	P. Asutubun	

93	08° 03' 07" S	131° 18' 02" T	Titik Dasar No. TD.105	No. 463
			Pilar Pendekat No. TR.105	1 : 200.000
			Antara TD.105-TD.105C	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Timor	P. Asutubun	
94	08° 03' 57" S	131° 16' 55" T	Titik Dasar No. TD.105C	No. 463
			Pilar Pendekat No. TR.105	1 : 200.000
			Jarak TD.105C-TD.106 = 11.26 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Timor	P. Selaru Timur	
95	08° 10' 17" S	131° 07' 31" T	Titik Dasar No. TD.106	No. 462, 463
			Pilar Pendekat No. TR.106	1 : 200.000
			Jarak TD.106-TD.106A = 16.24 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Timor	P. Selaru Barat	
96	08° 18' 27" S	130° 53' 20" T	Titik Dasar No. TD.106A	No. 462, 463
			Pilar Pendekat No. TR.106	1 : 200.000
			Jarak TD.106A-TD.107 = 4.52 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Timor	P. Batarkusu	
97	08° 20' 30" S	130° 49' 16" T	Titik Dasar No. TD.107	No. 462
			Pilar Pendekat No. TR.107	1 : 200.000
			Jarak TD.107-TD.107A = 0.51 nm	WGS'84

			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Timor	Fursey	
98	08° 20' 41" S	130° 48' 47" T	Titik Dasar No. TD.107A	No. 462
			Pilar Pendekat No. TR.107	1 : 200.000
			Antara TD.107A-TD.107C	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Laut :	Timor	Tg. Arousu	
99	08° 20' 54" S	130° 45' 21" T	Titik Dasar No. TD.107C	No. 462
			Pilar Pendekat No. TR.107	1 : 200.000
			Jarak TD.107C-TD.108 = 55.73 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Timor	P. Masela	
100	08° 13' 29" S	129° 49' 32" T	Titik Dasar No. TD.108	No. 462
			Pilar Pendekat No. TR.108	1 : 200.000
			Jarak TD.108-TD.109 = 78.22 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Timor	P. Meatimiarang	
101	08° 21' 09" S	128° 30' 52" T	Titik Dasar No. TD.109	No. 461
			Pilar Pendekat No. TR.109	1 : 200.000
			Antara TD.109-TD.115	WGS'84
			Timor-Timur	
	Laut :	Timor	Tg. Wetoh	
102	09° 38' 09" S	124° 59' 39" T	Titik Dasar No. TD.115	No. 459
			Pilar Pendekat No. TR.115	1 : 200.000

			Jarak TD.115-TD.116 = 20.69 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Timor	Tg. Batu Merah	
103	09° 52' 58" S	124° 45' 00" T	Titik Dasar No. TD.116	No. 459
			Pilar Pendekat No. TR.116	1 : 200.000
			Jarak TD.116-TD.117 = 21.27 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Timor	Tg. Haikmeo	
104	10° 07' 14" S	124° 28' 59" T	Titik Dasar No. TD.117	No. 459
			Pilar Pendekat No. TR.117	1 : 200.000
			Jarak TD.117-TD.118 = 6.02 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	

105. ?

No. Urut	Perairan Lintang Bujur		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
	Laut :	Timor	Tg. Tunfano	
105	10° 10' 19" S	124° 23' 44" T	Titik Dasar No. TD.118	No. 459
			Pilar Pendekat No. TR.118	1 : 200.000
			Jarak TD.118-TD.120 = 79.65 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Puleh	
106	10° 49' 47" S	123° 13' 22" T	Titik Dasar No. TD.120	No. 458

			Pilar Pendekat No. TR.120	1 : 200.000
			Jarak TD.120-TD.121 = 23.07 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Dana	
107	11° 00' 36" S	122° 52' 37" T	Titik Dasar No. TD.121	No. 458
			Pilar Pendekat No. TR.121	1 : 200.000
			Jarak TD.121-TD.122 = 65.43 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Merebu	
108	10° 37' 37" S	121° 50' 15" T	Titik Dasar No. TD.122	No. 457
			Pilar Pendekat No. TR.122	1 : 200.000
			Jarak TD.122-TD.123 = 34.98 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Dana	
109	10° 50' 00" S	121° 16' 57" T	Titik Dasar No. TD.123	No. 457
			Pilar Pendekat No. TR.123	1 : 200.000
			Antara TD.123-TD.123A	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Samudera :	Hindia	P. Dana	
110	10° 49' 54" S	121° 16' 38" T	Titik Dasar No. TD.123A	No. 457
			Pilar Pendekat No. TR.123	1 : 200.000
			Jarak TD.123A-TD.124 = 57.55 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Ngunju	
111	10° 19' 02" S	120° 27' 13" T	Titik Dasar No. TD.124	No. 456
			Pilar Pendekat No. TR.124	1 : 200.000
			Jarak TD.124-TD.125 = 19.90 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Mangudu	
112	10° 20' 22" S	120° 07' 02" T	Titik Dasar No. TD.125	No. 456
			Pilar Pendekat No. TR.125	1 : 200.000

			Antara TD.125-TD.125A	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Samudera :	Hindia	P. Mangudu	
113	10° 20' 08" S	120° 05' 56" T	Titik Dasar No. TD.125A	No. 456
			Pilar Pendekat No. TR.125	1 : 200.000
			Jarak TD.125A-TD.128B = 72.43 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	

114. ?

No. Urut	Perairan Lintang Bujur		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
	Samudera :	Hindia	Tg. Merapu	
114	09° 41' 55" S	119° 03' 27" T	Titik Dasar No. TD.128B	No. 455, 455
			Pilar Pendekat No. TR.128B	1 : 200.000
			Antara TD.128B-TD.128	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Samudera :	Hindia	Tg. Karoso	
115	09° 33' 46" S	118° 55' 29" T	Titik Dasar No. TD.128	No. 455, 456
			Pilar Pendekat No. TR.128	1 : 200.000
			Jarak TD.128-TD.129 = 48.64 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Toro Doro	
116	08° 53' 22" S	118° 28' 02" T	Titik Dasar No. TD.129	No. 455
			Pilar Pendekat No. TR.129	1 : 200.000
			Jarak TD.129-TD.130A = 84.56 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Talonan	
117	09° 06' 15" S	117° 03' 25" T	Titik Dasar No. TD.130A	No. 454
			Pilar Pendekat No. TR.130	1 : 200.000
			Jarak TD.130A-TD.130 = 2.64 nm	WGS'84

			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Talonan	
118	09° 06' 37" S	117° 00' 46" T	Titik Dasar No. TD.130	No. 454
			Pilar Pendekat No. TR.130	1 : 200.000
			Jarak TD.130-TD.131 = 60.94 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Sophialouisa	
119	08° 55' 20" S	116° 00' 08" T	Titik Dasar No. TD.131	No. 454
			Pilar Pendekat No. TR.131	1 : 200.000
			Jarak TD.131-TD.133 = 25.38 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Sedihing	
120	08° 49' 11" S	115° 35' 13" T	Titik Dasar No. TD.133	No. 454
			Pilar Pendekat No. TR.133	1 : 200.000
			Jarak TD.133-TD.134A = 24.47 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Ungasan	
121	08° 51' 06" S	115° 10' 32" T	Titik Dasar No. TD.134A	No. 453
			Pilar Pendekat No. TR.134A	1 : 200.000
			Antara TD.134A-TD.134	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	

122. ?

No. Urut	Perairan Lintang Bujur		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
	Samudera :	Hindia	Tg. Mebulu	
122	08° 50' 56" S	115° 06' 31" T	Titik Dasar No. TD.134	No. 453
			Pilar Pendekat No. TR.134	1 : 200.000
			Jarak TD.134-TD.135 = 34.75 nm	WGS'84

			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Bantenan	
123	08° 47' 14" S	114° 31' 33" T	Titik Dasar No. TD.135	No. 453
			Pilar Pendekat No. TR.135	1 : 200.000
			Jarak TD.135-TD.138 = 74.98 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Barung	
124	08° 30' 30" S	113° 17' 37" T	Titik Dasar No. TD.138	No. 452
			Pilar Pendekat No. TR.138	1 : 200.000
			Jarak TD.138-TD.139 = 94.26 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Sekel	
125	08° 24' 24" S	111° 42' 31" T	Titik Dasar No. TD.139	No. 451
			Pilar Pendekat No. TR.139	1 : 200.000
			Jarak TD.139-TD.139A = 11.90 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Panehan	
126	08° 22' 17" S	111° 30' 41" T	Titik Dasar No. TD.139A	No. 451
			Pilar Pendekat No. TR.139	1 : 200.000
			Jarak TD.139A-TD.140 = 48.75 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Batur	
127	08° 12' 03" S	110° 42' 31" T	Titik Dasar No. TD.140	No. 451
			Pilar Pendekat No. TR.140	1 : 200.000
			Jarak TD.140-TD.143 = 102.08 nm	WGS'84

			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Nusakambangan	
128	07° 47' 05" S	109° 02' 34" T	Titik Dasar No. TD.143	No. 450
			Pilar Pendekat No. TR.143	1 : 200.000
			Jarak TD.143-TD.144A = 36.34 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Legokjawa	
129	07° 49' 17" S	108° 25' 57" T	Titik Dasar No. TD.144A	No. 449
			Pilar Pendekat No. TR.144A	1 : 200.000
			Jarak TD.144A-TD.144C = 6.59 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	

130. ?

No. Uru t	Perairan Lintang Bujur		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
	Samudera :	Hindia	P. Manuk	
130	07° 49' 11" S	108° 19' 18" T	Titik Dasar No. TD.144C	No. 449
			Pilar Pendekat No. TR.144	1 : 200.000
			Jarak TD.144C-TD.144 = 1.38 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Tawulan	
131	07° 49' 03" S	108° 17' 55" T	Titik Dasar No. TD.144	No. 449
			Pilar Pendekat No. TR.144	1 : 200.000
			Jarak TD.144-TD.145 = 27.50 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Gedeh	
132	07° 44' 32" S	107° 50' 32" T	Titik Dasar No. TD.145	No. 449
			Pilar Pendekat No. TR.145	1 : 200.000

			Jarak TD.145-TD.146 = 88.14 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Ug. Genteng	
133	07° 23' 20" S	106° 24' 14" T	Titik Dasar No. TD.146	No. 448
			Pilar Pendekat No. TR.146	1 : 200.000
			Jarak TD.146-TD.147 = 56.96 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Deli	
134	07° 01' 00" S	105° 31' 25" T	Titik Dasar No. TD.147	No. 448
			Pilar Pendekat No. TR.147	1 : 200.000
			Jarak TD.147-TD.148A = 18.35 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Karang Pabayang	
135	06° 51' 17" S	105° 15' 44" T	Titik Dasar No. TD.148A	No. 447, 448
			Pilar Pendekat No. TR.148	1 : 200.000
			Jarak TD.148A-TD.148 = 1.67 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Guhakolak	
136	06° 50' 22" S	105° 14' 20" T	Titik Dasar No. TD.148	No. 447, 448
			Pilar Pendekat No. TR.148	1 : 200.000
			Jarak TD.148-TD.151 = 73.97 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Batu kecil	
137	05° 53' 45" S	104° 26' 26" T	Titik Dasar No. TD.151	No. 447
			Pilar Pendekat No. TR.151	1 : 200.000
			Jarak TD.151-TD.152 = 50.33 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Ug. Walor	
138	05° 14' 22" S	103° 54' 57" T	Titik Dasar No. TD.152	No. 446
			Pilar Pendekat No. TR.152	1 : 200.000

			Jarak TD.152-TD.154A = 94.80 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	

139. ?

No. Urut	Perairan Lintang Bujur		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
	Samudera :	Hindia	Tg. Kahoabi	
139	05° 30' 50" S	102° 21' 11" T	Titik Dasar No. TD.154A	No. 445, 446
			Pilar Pendekat No. TR.154A	1 : 200.000
			Jarak TD.154A-TD.154 = 5.17 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Labuho	
140	05° 31' 13" S	102° 16' 00" T	Titik Dasar No. TD.154	No. 445
			Pilar Pendekat No. TR.154	1 : 200.000
			Antara TD.154-TD.154B	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Samudera :	Hindia	Tg. Labuho	
141	05° 30' 30" S	102° 14' 42" T	Titik Dasar No. TD.154B	No. 445
			Pilar Pendekat No. TR.154	1 : 200.000
			Jarak TD.154B-TD.155 = 13.09 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Kooma	
142	05° 21' 35" S	102° 05' 04" T	Titik Dasar No. TD.155	No. 445
			Pilar Pendekat No. TR.155	1 : 200.000
			Jarak TD.155-TD.156 = 102.15 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Mega	
143	04° 01' 12" S	101° 01' 49" T	Titik Dasar No. TD.156	No. 444
			Pilar Pendekat No. TR.156	1 : 200.000
			Jarak TD.156-TD.158 = 60.36 nm	WGS'84

			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Sibarubaru	
144	03° 17' 48" S	100° 19' 47" T	Titik Dasar No. TD.158	No. 443, 444
			Pilar Pendekat No. TR.158	1 : 200.000
			Jarak TD.158-TD.159 = 33.96 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Betumonga	
145	02° 50' 14" S	99° 59' 55" T	Titik Dasar No. TD.159	No. 443
			Pilar Pendekat No. TR.159	1 : 200.000
			Jarak TD.159-TD.161 = 80.33 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Sinyaunyau	
146	01° 51' 58" S	99° 04' 34" T	Titik Dasar No. TD.161	No. 442
			Pilar Pendekat No. TR.161	1 : 200.000
			Jarak TD.161-TD.161B = 16.43 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Simansih	
147	01° 40' 43" S	98° 52' 35" T	Titik Dasar No. TD.161B	No. 442
			Pilar Pendekat No. TR.161	1 : 200.000
			Antara TD.161B-TD.162	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	

148. ?

No. Urut	Perairan Lintang Bujur		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
	Samudera :	Hindia	Tg. Sakaladat	
148	01° 13' 32" S	98° 36' 07" T	Titik Dasar No. TD.162	No. 442
			Pilar Pendekat No. TR.162	1 : 200.000
			Jarak TD.162-TD.164B = 81.46 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	

	Samudera :	Hindia	P. Simuk	
149	00° 05' 33" S	97° 51' 14" T	Titik Dasar No. TD.164B	No. 441
			Pilar Pendekat No. TR.164	1 : 200.000
			Antara TD.164B-TD.164	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Samudera :	Hindia	P. Simuk	
150	00° 04' 05" S	97° 50' 07" T	Titik Dasar No. TD.164	No. 441
			Pilar Pendekat No. TR.164	1 : 200.000
			Jarak TD.164-TD.167 = 89.23 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Wunga	
151	01° 12' 47" U	97° 04' 48" T	Titik Dasar No. TD.167	No. 440
			Pilar Pendekat No. TR.167	1 : 200.000
			Jarak TD.167-TD.168 = 11.59 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	Tg. Toyolawa	
152	01° 24' 19" U	97° 03' 38" T	Titik Dasar No. TD.168	No. 440
			Pilar Pendekat No. TR.168	1 : 200.000
			Jarak TD.168-TD.170 = 96.15 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Simeulucut	
153	02° 31' 47" U	95° 55' 05" T	Titik Dasar No. TD.170	No. 439
			Pilar Pendekat No. TR.170	1 : 200.000
			Jarak TD.170-TD.171 = 40.87 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Salaut Besar	
154	02° 57' 51" U	95° 23' 34" T	Titik Dasar No. TD.171	No. 438, 439
			Pilar Pendekat No. TR.171	1 : 200.000
			Antara TD.171-TD.171C	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Samudera :	Hindia	P. Salaut Besar	

155	02° 58' 57" U	95° 23' 06" T	Titik Dasar No. TD.171C	No. 438, 439
			Pilar Pendekat No. TR.171A	1 : 200.000
			Jarak TD.171C-TD.174 = 113.61 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	

156. ?

No. Urut	Perairan Lintang Bujur		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
	Samudera :	Hindia	P. Raya	
156	04° 52' 33" U	95° 21' 46" T	Titik Dasar No. TD.174	No. 437
			Pilar Pendekat No. TR.174	1 : 200.000
			Jarak TD.174-TD.175 = 25.87 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Rusa	
157	05° 16' 34" U	95° 12' 07" T	Titik Dasar No. TD.175	No. 437
			Pilar Pendekat No. TR.175	1 : 200.000
			Jarak TD.175-TD.176A = 33.89 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Benggala	
158	05° 47' 34" U	94° 58' 21" T	Titik Dasar No. TD.176A	No. 437
			Pilar Pendekat No. TR.176A	1 : 200.000
			Jarak TD.176A-TD.177 = 18.88 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Samudera :	Hindia	P. Rondo	
159	06° 04' 30" U	95° 06' 45" T	Titik Dasar No. TD.177	No. 437
			Pilar Pendekat No. TR.177	1 : 200.000
			Antara TD.177-TD.177A	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Samudera :	Hindia	P. Rondo	

160	06° 04' 30" U	95° 07' 11" T	Titik Dasar No. TD.177A	No. 437
			Pilar Pendekat No. TR.177	1 : 200.000
			Jarak TD.177A-TD.178 = 16.66 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Malaka	Ug. Le Meule	
161	05° 53' 50" U	95° 20' 03" T	Titik Dasar No. TD.178	No. 437
			Pilar Pendekat No. TR.178	1 : 200.000
			Jarak TD.178-TD.179 = 40.63 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Malaka	Ug. Pidie	
162	05° 30' 12" U	95° 53' 16" T	Titik Dasar No. TD.179	No. 436, 437
			Pilar Pendekat No. TR.179	1 : 200.000
			Jarak TD.179-TD.180 = 58.07 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Malaka	Ug. Peusangan	
163	05° 16' 31" U	96° 49' 57" T	Titik Dasar No. TD.180	No. 436
			Pilar Pendekat No. TR.180	1 : 200.000
			Jarak TD.180-TD.181 = 39.58 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Malaka	Tg. Jamboaye	
164	05° 15' 04" U	97° 29' 40" T	Titik Dasar No. TD.181	No. 435, 436
			Pilar Pendekat No. TR.181	1 : 200.000
			Antara TD.181-TD.181A	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	

165. ?

No. Urut	Perairan Lintang Bujur		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
	Selat :	Malaka	P. Paru Buso	
165	05° 13' 01" U	97° 32' 54" T	Titik Dasar No. TD.181A	No. 435

			Pilar Pendekat No. TR.181	1 : 200.000
			Jarak TD.181A-TD.182 = 29.19 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Malaka	Ug. Peureula	
166	04° 53' 38" U	97° 54' 49" T	Titik Dasar No. TD.182	No. 435
			Pilar Pendekat No. TR.182	1 : 200.000
			Jarak TD.182-TD.183 = 35.86 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Malaka	Ug. Tamiang	
167	04° 25' 36" U	98° 17' 15" T	Titik Dasar No. TD.183	No. 435
			Pilar Pendekat No. TR.183	1 : 200.000
			Jarak TD.183-TD.184 = 82.41 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Malaka	P. Berhala	
168	03° 46' 38" U	99° 30' 03" T	Titik Dasar No. TD.184	No. 434
			Pilar Pendekat No. TR.184	1 : 200.000
			Jarak TD.184-TD.185 = 89.42 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Malaka	P. Batu Mandi	
169	02° 52' 10" U	100° 41' 05" T	Titik Dasar No. TD.185	No. 433
			Pilar Pendekat No. TR.185	1 : 200.000
			Jarak TD.185-TD.186 = 76.97 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Malaka	Tg. Punah	
170	02° 05' 42" U	101° 42' 30" T	Titik Dasar No. TD.186	No. 432, 433
			Pilar Pendekat No. TR.186	1 : 200.000
			Jarak TD.186-TD.186A = 57.08 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Malaka	Tg. Parit	
171	01° 31' 29" U	102° 28' 13" T	Titik Dasar No. TD.186A	No. 432

			Pilar Pendekat No. TR.186A	1 : 200.000
			Jarak TD.186A-TD.187 = 39.29 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Malaka	Tg. Kedabu	
172	01° 06' 04" U	102° 58' 11" T	Titik Dasar No. TD.187	No. 432
			Pilar Pendekat No. TR.187	1 : 200.000
			Jarak TD.187-TD.188 = 23.58 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	

173. ?

No. Urut	Perairan Lintang Bujur		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
	Selat :	Malaka	P. Iyu Kecil	
173	01° 11' 30" U	103° 21' 08" T	Titik Dasar No. TD.188	No. 432
			Pilar Pendekat No. TR.188	1 : 200.000
			Jarak TD.188-TD.189 = 2.67 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Malaka	P. Karimun Kecil	
174	01° 09' 59" U	103° 23' 20" T	Titik Dasar No. TD.189	No. 431, 432
			Pilar Pendekat No. TR.189	1 : 200.000
			Jarak TD.189-TD.190 = 15.87 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Main	P. Nipa	
175	01° 09' 13" U	103° 39' 11" T	Titik Dasar No. TD.190	No. 431
			Pilar Pendekat No. TR.190	1 : 200.000
			Antara TD.190-TD.190A	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	
	Selat :	Main	P. Nipa	
176	01° 09' 12" U	103° 39' 21" T	Titik Dasar No. TD.190A	No. 431
			Pilar Pendekat No. TR.190	1 : 200.000

			Jarak TD.190A-TD.191 = 3.00 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Main	P. Pelampong	
177	01° 07' 44" U	103° 41' 58" T	Titik Dasar No. TD.191	No. 431
			Pilar Pendekat No. TR.191	1 : 200.000
			Jarak TD.191-TD.191A = 4.54 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Main	Kr. Helen Mars	
178	01° 07' 27" U	103° 46' 30" T	Titik Dasar No. TD.191A	No. 431
			Pilar Pendekat No. TR.191A	1 : 200.000
			Jarak TD.191A-TD.191B = 3.06 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Main	Kr. Benteng	
179	01° 09' 26" U	103° 48' 50" T	Titik Dasar No. TD.191B	No. 431
			Pilar Pendekat No. TR.191B	1 : 200.000
			Jarak TD.191B-TD.192 = 4.44 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Singapore	Batu Berhanti	
180	01° 11' 06" U	103° 52' 57" T	Titik Dasar No. TD.192	No. 431
			Pilar Pendekat No. TR.192	1 : 200.000
			Jarak TD.192-TD.193 = 11.91 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	

181. ?

No. Urut	Perairan Lintang Bujur		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
	Selat :	Singapore	P. Nongsa	
181	01° 12' 29" U	104° 04' 47" T	Titik Dasar No. TD.193	No. 431
			Pilar Pendekat No. TR.193	1 : 200.000

			Jarak TD.193-TD.194 = 18.83 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Selat :	Singapore	Tg. Sading	
182	01° 12' 16" U	104° 23' 37" T	Titik Dasar No. TD.194	No. 431
			Pilar Pendekat No. TR.194	1 : 200.000
			Jarak TD.194-TD.195 = 10.02 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
	Laut :	Natuna	Tg. Berakit	
183	01° 14' 35" U	104° 33' 22" T	Titik Dasar No. TD.195	No. 431
			Pilar Pendekat No. TR.001	1 : 200.000
			Antara TD.195-TD.001	WGS'84
			Garis Pangkal Biasa	

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
ttd.
Lambock V. Nahattands

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2002
TENTANG
DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK
GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA

UMUM

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang ditetapkan untuk menindaklanjuti ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, dalam Pasal 6 menentukan bahwa Garis-garis Pangkal Kepulauan Indonesia harus dicantumkan dalam peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan posisinya, atau dapat pula dibuat Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan disertai referensi Datum Geodetis yang diperlukan. Pembuatan peta laut perairan Indonesia yang memadai untuk menggambarkan garis-garis pangkal kepulauan memerlukan waktu pembuatan yang lama, di samping memerlukan dana dan sumber daya manusia yang besar. Di samping itu perubahan pantai dan dasar laut di sekitarnya oleh kekuatan alam menyebabkan bahwa kegiatan pembuatan Peta Navigasi memerlukan kegiatan yang bertahap, terus-menerus, sistematis dan melembaga. Berhubung dengan itu sambil menunggu pembuatan Peta Navigasi yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara bertahap, perlu dibuat Daftar Koordinat Geografis Titik-titik untuk menarik garis pangkal kepulauan untuk kegiatan pelayanan dan penegakan hukum di Perairan Indonesia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dalam perairan kepulauan dapat ditarik garis-garis penutup untuk menetapkan batas Perairan Pedalaman di Teluk, di Muara Sungai atau Terusan, di Kuala dan di daerah Pelabuhan. Walaupun ketentuan Pasal 50 tersebut tidak menentukan bahwa garis batas perairan pedalaman di perairan kepulauan dapat ditarik di sepanjang pantai, perairan yang terletak pada sisi dalam Garis Air Rendah sepanjang pantai mempunyai kedudukan sebagai perairan pedalaman. Berhubung dengan itu garis rendah tersebut juga merupakan batas perairan pedalaman dalam perairan

kepulauan. Ketentuan mengenai penetapan batas Perairan Pedalaman tersebut di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia tidak terdapat suatu ketentuan untuk diatur lebih lanjut, namun demi kepastian hukum mengenai penetapan batas Perairan Pedalaman dalam Perairan Kepulauan perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Titik terluar pada Garis Air Rendah pantai yang berbatasan dengan negara tetangga yang berhadapan atau berdampingan yang merupakan titik terluar bersama untuk penarikan garis pangkal ditetapkan berdasarkan perjanjian kedua negara serta memenuhi ketentuan Hukum Internasional. Perjanjian perbatasan dengan negara tetangga tersebut pengesahannya dilakukan dengan Undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada Peraturan Pemerintah ini dilampirkan Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Daftar Koordinat Geografis tersebut merupakan lampiran pada Peraturan Pemerintah ini dan tidak dimasukkan sebagai ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini, dengan tujuan agar perubahan atau pembubaran (updating) data dalam Daftar Koordinat Geografis tersebut dapat dilakukan dengan tidak perlu mengubah ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Selain untuk kepentingan pelayanan dan untuk penegakan hukum di perairan Indonesia, Daftar Koordinat tersebut juga dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menentukan bahwa Daftar Koordinat tersebut harus didepositkan di Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Garis lurus yang ditarik antara 2 (dua) titik pada Garis Air Rendah tersebut merupakan garis yang ditarik secara lurus antara dua titik berdampingan yang lazim dilakukan dalam batas-batas pengertian navigasi dan pemetaan untuk kepentingan navigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan dilakukan dengan memperhatikan tatanan letak kepulauan atau kelompok pulau-pulau yang letaknya berurutan dan bersambungan secara beraturan, oleh karena itu penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan tidak dapat dilakukan menyimpang dari arah konfigurasi umum kepulauan.

Pengertian konfigurasi umum kepulauan merupakan pengertian yang tujuannya identik dengan pengertian arah umum pantai, yaitu untuk mencegah perluasan laut teritorial suatu negara dengan cara yang tidak sewajarnya.

Ayat (5)

Pemanfaatan elevasi surut dilakukan dengan memperhatikan konfigurasi umum kepulauan dan panjang garis pangkal.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pulau adalah daratan yang berbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan tetap berada di atas permukaan air pada air pasang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kuala adalah bagian perairan di depan mulut sungai yang memiliki keutuhan ekosistem dengan perairan muara sungai.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat Penjelasan Umum alinea 9 dan alinea 10.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Lihat penjelasan Umum alinea 9.

Pasal 10

Mengenai besarnya tugas yang dihadapi dalam menetapkan secara benar semua Garis Pangkal Kepulauan yang meliputi seluruh garis pantai Indonesia serta tugas untuk menetapkan kembali garis-garis pangkal yang berubah karena alam, maka

demi kepastian hukum, penyelesaian penegakan hukum yang terjadi di daerah demikian dapat dilakukan melalui pengamatan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat Penjelasan Pasal 10. Di samping hal tersebut, perubahan dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, perlu didepositkan di Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ayat (3)

Lihat Penjelasan ayat (2).

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Lampiran : 8



**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan, dan keamanan;
- b. bahwa pulau-pulau kecil tertular Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea/Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL
TERLUAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
- (2) Pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan koordinat titik terluarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Pasal 2

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan:

- a. menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional,
- pertahanan Negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
- b. memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;
- c. memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah:

- a. Wawasan nusantara;
- b. Berkelanjutan;
- c. Berbasis masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

1. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang:
 - a. sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - b. infrastruktur dan perhubungan;
 - c. pembinaan wilayah;
 - d. pertahanan dan keamanan;
 - e. ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 6

1. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.
2. Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
 - b. Wakil Ketua : Merangkap anggota
 1. Wakil Ketua I : Menteri Kelautan dan Perikanan
 2. Wakil Ketua II : Menteri Dalam Negeri
 - c. Anggota:
 1. Menteri Pertahanan
 2. Menteri Luar Negeri

3. Menteri Perhubungan
 4. Menteri Pekerjaan Umum
 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 6. Menteri Kesehatan
 7. Menteri Pendidikan Nasional
 8. Menteri Keuangan
 9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 10. Menteri Kehutanan
 11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
 12. Menteri Negara Lingkungan Hidup
 13. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
 14. Sekretaris Kabinet
 15. Panglima Tentara Nasional Indonesia
 16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
 17. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
- c. Sekretaris: Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Pasal 7

1. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan wadah koordinasi non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
2. Tim Koordinasi mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat mengundang dan atau meminta pendapat dari instansi-instansi pemerintah terkait dan atau pihak lain yang dianggap perlu.
4. Tim Koordinasi menyampaikan laporan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

- Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 9

1. Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari-hari dibantu oleh Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Tim Kerja terdiri dari 2 (dua) tim, yaitu:
 - i. Tim Kerja I membidangi sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, ekonomi, sosial, dan budaya;
 - ii. Tim kerja II membidangi pembinaan wilayah pertahanan dan keamanan.
3. Tim Kerja I diketuai oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.
4. Tim Kerja II diketuai oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam

Negeri.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri Kelautan dan Perikanan dibantu oleh Sekretariat.
2. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif.
3. Sekretariat secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja struktural di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang menangani pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
4. Ketua Sekretariat ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

